



Lembaga Penelitian
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

MUTU

PENDIDIKAN ISLAM

di Kota Tangerang Selatan Banten

MUTU PENDIDIKAN ISLAM di Kota Tangerang Selatan Banten



Lembaga Penelitian
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Penulis:

■ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA ■ Willy Octaviano, Lc. MA
■ Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA ■ Dra. Madinatul Musyarofah; ■ Arip Sariipudin, S.Kom

MUTU PENDIDIKAN ISLAM
DI KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN

Disusun Oleh:

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA
Willy Octaviano, Lc. MA
Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA
Dra. Madinatul Musyarofah
Arip Saripudin, S.Kom



Lembaga Penelitian
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Diterbitkan pertama kali di Ciputat, Indonesia, pada 2011
UIN Jakarta PRESS
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda no. 95 Ciputat, Tangerang Selatan
Telepon (021) 7401925, Faks. (021) 7402982
Website: www.uinjkt.ac.id
E-Mail: uinjakartapress@uinjkt.ac.id

@2011 Tim Peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

**MUTU PENDIDIKAN ISLAM
DI KOTA TANGERANG SELATAN BANTEN**
(Kumpulan Tulisan Antara Tahun 1988-2008)

Penulis:
Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA
Willy Octaviano, Lc. MA
Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA
Dra. Madinatul Musyarofah
Arip Saripudin, S.Kom

Desain Sampul/Tata letak: Ayiep

ISBN: 980-765-00-41

Dicetak oleh percetakan Faza Media, Ciputat.
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat taufik dan hidayah-Nya, penelitian *Mutu Pendidikan Islam di Kota Tangerang Selatan Banten* ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing ummat dengan cermat dan teliti, sehingga membuahkan hasil yang dapat dirasakan hingga saat ini.

Selanjutnya disampaikan bahwa penelitian ini dilaksanakan dalam rangka memperoleh informasi yang lengkap, utuh, mendalam dan kredibel tentang mutu pendidikan Islam pada umumnya dan mutu Madrasah Aliyah pada khususnya yang berada di Kota Tangerang Selatan, Banten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berharga bagi Pemerintah, khususnya Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Banten, Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, serta kalangan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam guna menghadapi persaingan yang makin ketat di era globalisasi. Dipilihnya Madrasah Aliyah sebagai obyek penelitian, antara lain karena dua alasan.

Pertama, bahwa mutu Madrasah Aliyah ini berkaitan erat dengan mutu perguruan tinggi, baik perguruan tinggi agama maupun umum. Hal demikian terjadi, karena lulusan Madrasah Aliyah adalah sebagai calon mahasiswa pada perguruan tinggi tersebut. Jika lulusan Madrasah Aliyah tersebut bermutu tinggi, maka lulusan perguruan tinggi-pun akan bermutu tinggi pula. Demikian sebaliknya.

Kedua, bahwa tamatan Madrasah Aliyah yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi biasanya langsung terjun ke masyarakat dan diserap oleh lapangan kerja dalam berbagai bidang. Dengan demikian, jika mutu lulusan Madrasah Aliyah tersebut unggul, maka akan menghasilkan mutu tenaga kerja yang unggul (*great employers*) pula.

Disadari, sungguhpun telah dilakukan secara maksimal, namun diakui bahwa penelitian ini masih banyak mengandung berbagai kekurangan, baik dari segi informasi atau data yang digali, metodologi yang digunakan, analisa dan lain sebagainya. Untuk itu saran dan koreksi yang konstruktif dari para pembaca akan di hargai dengan sebaik-baiknya.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini kami haturkan terima kasih sebanyak-banyaknya.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah kami memohon semoga usaha ini menjadi amal shalih yang bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 10 Oktober 2011

Prof. Dr. H. Abuddin Nata, MA.

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Daftar Isi
Kata Pengantar

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah
 - 1. Identifikasi Masalah
 - 2. Pembatasan Masalah
 - 3. Perumusan Masalah
- C. Penelitian Terdahulu yang Relevan
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - 1. Tujuan
 - 2. Manfaat
- E. Definisi Operasional
 - 1. Pengertian Mutu
 - 2. Pendidikan Madrasah Aliyah
- F. Metodologi
 - 1. Jenis Penelitian dan Sumber Data
 - 2. Obyek Penelitian
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Pengolahan Data
- G. Rencana Sistematika Penulisan Laporan
- H. Pelaksana
- I. Waktu
- J. Biaya

BAB II. TEORI DAN SEJARAH STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH INDONESIA

A. Perdebatan tentang Mutu Pendidikan

B. Indikator Mutu Pendidikan Madrasah

1. Kinerja Sekolah
2. Kurikulum
3. Ketersediaan Panduan Pelaksanaan
4. Kesiapan Sekolah
5. Kesiapan Sumber Daya Manusia
6. Ketersediaan Fasilitas
7. Penerapan Manajemen Berbasis TQM
8. Penerapan Budaya Kerja Yang Unggul (*Great Employee*)
9. Penerapan Kepemimpinan Efektif
10. Penerapan Multi Media Pembelajaran
11. Penggunaan Bahasa Asing
12. Lingkungan dan Atmosfir Akademik
13. Penerapan Paradigma Baru Proses Belajar Mengajar

C. Sejarah Strategi Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia

1. Pengertian Madrasah dan Sejarah Lahirnya
2. Kebijakan Peningkatan Mutu Madrasah

BAB III KONDISI SOSIOLOGIS KOTA TANGERANG SELATAN

A. Hubungan Keadaan Masyarakat dengan Pendidikan

B. Kondisi Geografis dan Demografis

C. Kondisi Stratifikasi dan Struktur Sosial

1. Stratifikasi dan Struktur Ekonomi
2. Stratifikasi dan Struktur Pendidikan

D. Kondisi Kehidupan Beragama dan Budaya

E. Kondisi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

F. Kondisi Kesehatan Masyarakat

G. Infrastruktur Pemerintahan

BAB IV MUTU MADRASAH ALIYAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

- A. Profil Madrasah Aliyah Secara Singkat
 - 1. Madrasah Aliyah Negeri Serpong
 - 2. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong
 - 3. Madrasah Aliyah Nurul Falah Serpong
 - 4. Madrasah Aliyah Nurasholihat
 - 5. Madrasah Aliyah Soebono Mantofani
 - 6. Madrasah Aliyah Madinatunnajah
 - 7. Madrasah Aliyah Islamiyah
 - 8. Madrasah Aliyah Muhammadiyah 01
 - 9. Madrasah Aliyah Sunanul Husna
 - 10. Madrasah Aliyah Darussalam
 - 11. Madrasah Aliyah Al-Amanah al-Gontory
 - 12. Madrasah Aliyah Jamiyah Islamiyah
 - 13. Madrasah Aliyah Hasanussolihat
 - 14. Madrasah Aliyah Darul Hikmah
 - 15. Madrasah Aliyah Ummul Qura
 - 16. Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan
- B. Profil Mutu Madrasah Aliyah
 - 1. Standard Isi/Kurikulum
 - 2. Standar Proses Belajar Mengajar
 - 3. Standar Kompetensi Lulusan
 - 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 5. Standar Sarana Prasarana
 - 6. Pedoman/Standar Pengelolaan yang Dimiliki Sekolah
 - 7. Standar Pembiayaan
 - 8. Standar Penilaian Pendidikan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

Daftar Pustaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat sejumlah pemikiran yang melatar-belakangi perlunya dilakukan penelitian tentang *Mutu Pendidikan Islam di Kota Tangerang Selatan Banten* ini, sebagai berikut.

Pertama, sebagai akibat dari kebijakan globalisasi pendidikan, dewasa ini pendidikan Islam tengah menghadapi badai besar (*turbulance*) yang harus direspon secara tepat, cepat, konsepsional dan profesional dengan menghasilkan mutu lulusan pendidikan Islam yang unggul dan bermutu tinggi. Badai besar tersebut berupa munculnya berbagai paradigma baru pendidikan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keberlanjutan eksistensi dan fungsi pendidikan Islam di masa depan, antara lain amat bergantung pada kemampuan pendidikan Islam tersebut dalam merespon berbagai paradigma baru pendidikan tersebut dengan cara meningkatkan mutu dan keunggulannya.

Kedua, bahwa paradigma baru pendidikan tersebut antara lain: 1)perubahan visi pendidikan ke arah yang lebih unggul dan terdepan dalam melahirkan lulusan yang siap memasuki lapangan kerja yang dibutuhkan dunia usaha dan industri (Dudi) dan jasa; 2)perubahan fungsi tenaga kependidikan ke arah yang lebih dapat berperan sebagai inspirator, motivator, fasilitator dan penggerak perubahan sosial (*agent of social change*); 3)perubahan proses belajar mengajar ke arah yang lebih memberikan peran kepada peserta didik (*student centris*); 4)perubahan pengelolaan pendidikan ke

arah yang lebih berbasis pada teknologi informasi (*the information of technological centris*) (ITC); 5)perubahan lingkungan pendidikan ke arah yang lebih berbasis pada masyarakat (*social based learning*) secara lebih luas; yakni sikap yang memandang bahwa masyarakat bukan hanya sebagai sasaran atau objek pendidikan, melainkan juga sebagai subjek yang ikut terlibat dalam merumuskan berbagai kebijakan pendidikan; 6)perubahan kelembagaan pendidikan yang lebih mengarah pada bentuk usaha bidang jasa (*business corporate*) yang tunduk pada logika-logika bisnis, seperti *customer service oriented*, logika hukum transaksional, *supply and demand* dan sebagainya. Semua paradigma baru pendidikan tersebut mengharuskan adanya pendidikan Islam yang unggul dan bermutu tinggi.¹

Ketiga, bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan, termasuk pendidikan Islam dalam rangka merespon paradigma baru pendidikan ke arah yang lebih sesuai dengan tantangan era globalisasi sebagaimana tersebut di atas, merupakan salah satu agenda yang mendapatkan perhatian baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Adanya peningkatan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain ditujukan untuk mendukung terlaksananya program wajib belajar, juga untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan melalui peningkatan berbagai komponen pendidikan, seperti peningkatan mutu tenaga pendidik (guru dan dosen) dan kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, dan lain sebagainya.

Keempat, bahwa dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Islam mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (*Raudlatul Athfal*), Ibtidaiyah, Tsanawiyah, 'Aliyah sampai dengan Perguruan Tinggi Islam, sudah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional.

¹ Lihat Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan dengan Pendekatan Multisipliner*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), cet. II, hal. 243-271.

Dengan demikian secara sistemik tidak ada lagi dikhotomi, perbedaan atau pemisahan status dan perlakuan antara pendidikan Islam dengan pendidikan nasional. Adanya kebijakan nasional ini mengharuskan adanya perlakuan yang sama antara pendidikan nasional dan pendidikan Islam, termasuk perlakuan dalam anggaran, peningkatan dan pengembangannya ke arah yang lebih bermutu.

Kelima, terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang di masa lalu cukup diminati dan menjadi *favorit* masyarakat, namun saat ini menjadi lembaga pendidikan yang tidak populer lagi dan ditinggalkan masyarakat; dan terdapat pula lembaga pendidikan yang di masa lalu tidak diperhatikan masyarakat, namun di masa sekarang mengalami kemajuan yang pesat dan menjadi *favorit* masyarakat. Keadaan lembaga pendidikan yang demikian itu sangat erat kaitannya dengan respon yang mereka berikan terhadap berbagai perubahan paradigma lembaga pendidikan tersebut.

Keenam, Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut dalam *General Agreement for Trading Service (GATS)*, yaitu Kesepakatan Umum untuk Pelayanan Perdagangan yang antara lain menempatkan pendidikan sebagai salah satu komoditas yang diperdagangkan. Dengan kesepakatan ini, maka Indonesia harus membuka diri terhadap negara lain yang ingin membuka usaha pendidikannya di Indonesia. Dengan demikian Indonesia memiliki peluang untuk membuka usaha pendidikannya di negara lain, dan negara lain juga memiliki peluang untuk membuka usaha pendidikannya di negara lain. Keadaan ini menghendaki adanya kesiapan lembaga pendidikan Islam di Indonesia untuk bersaing dengan lembaga pendidikan yang berasal dari negara lain yang jauh lebih siap dari berbagai aspeknya: sumber daya manusia, sarana prasarana, manajemen, *financial*, dan pengakuan internasional (*international recognize*) dibanding dengan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Kesiapan lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi persaingan tersebut mengharuskan adanya peningkatan

seluruh komponen pendidikannya sehingga mampu menghasilkan lulusan yang lebih unggul dan kompetitif.

Ketujuh, saat ini sudah ada sebagian dari lembaga pendidikan Islam yang memberikan respon terhadap berbagai paradigma baru pendidikan tersebut. Mereka telah melakukan inovasi dan pengembangan terhadap berbagai komponen pendidikan tersebut ke arah yang lebih bermutu dan sesuai dengan tantangan zaman. Namun upaya tersebut terkadang menghilangkan visi keislamannya yang bertumpu pada aspek akidah, ibadah dan akhlak mulia. Mereka seperti orang yang menari di atas genderang orang lain, atau menggunakan baju yang ukuran, model dan coraknya tidak sesuai dengan jati diri, karakter dan ke'arifan budaya dan nilai-nilai Islami.

Kedelapan, sejalan dengan visi yang bernuansa menjawab tantangan globalisasi tersebut, maka berbagai komponen pendidikan: kurikulum, bahan ajar, proses belajar mengajar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, mutu lulusan dan evaluasi pendidikan terus diinovasi dan dikembangkan. Berbagai upaya tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keunggulan yang kompetitif (*competitive advantage*) dengan terlebih dahulu melihat berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan tantangan yang terdapat di luar, yang di dalam *strategic planning* dikenal dengan istilah SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Treatment*).²

² *The strategis management of an organization entail three going processes: analysis, decision, and action. That is, strategic management is concerned with the analysis of the hierarchy of the strategic goal (vision, mission, and strategic objectives) along with the analysis of the internal and external environment of the organization. Next, leaders must make strategic decision. These decisions, broadly speaking, address two basic question: What industries should we compete in? How should we compete in those industries? These question also often involve an organization's domestic as well as well as its international operation. And last are the action that must be taken.* Lihat Gregory G. Dose and C.T. Lumpkin, *Strategic Management Creating Competitive Advantages*, (McGraw-Hill Irwin, no. year,) hal, 6-7 Lihat juga Fred R. David, *Strategic Management Concepts and Cases*, yang mengatakan: *Strategic*

B. Identifikasi, Pembatasan dan Perumusan Masalah

Identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Identifikasi Masalah

Islam dari sejak awal kelahirannya telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap masalah pendidikan yang bermutu tinggi. Ayat yang pertama kali diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yakni surat *al-'Alaq* ayat 1 s.d 5 misalnya,³ telah menekankan pentingnya pendidikan dan pengajaran melalui kegiatan membaca dan menulis dalam arti yang seluas-luasnya. Membaca (*Iqra'*) sebagaimana dimaksud dalam surat *al-'Alaq* tersebut meliputi kegiatan mengumpulkan, mengetahui, memahami, mengklasifikasi, menyimpulkan dan memverifikasi. Demikian pula menulis (*bi al-qalam*) sebagaimana dimaksud ayat tersebut, termasuk kepada mencatat, mengukur, menimbang, menakar, merekam, mengopi, menyimpan dalam disket, mendokumentasikan dan seterusnya. Melalui kegiatan membaca dan menulis ini, dunia Arab (khususnya) yang *nomad* (hidup berpindah-pindah) yang sebelumnya tidak mengenal baca tulis, mengandalkan hafalan dan tidak memiliki kebudayaan dan peradaban, telah menjadi bangsa yang menjadi pelopor lahirnya kebudayaan dan peradaban umat manusia selama lebih kurang tujuh abad lamanya, yakni dari abad ke-7 sampai dengan 13 Masehi. Melalui kegiatan membaca dan

management can be defined as the art and science of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable and organization to achieve its objectives. As this definition implies, strategic management focuses on integrating management, marketing, finance/accounting, production/operation, research and development, and computer information system to achieve organizational success Lihat Fred R. David, *Strategic Management Concepts and Cases*, (Perason: Prentice Hall:Pearson Educational International, 2009), hal. 36

³ *Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemueh, Yang mengajari (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajari manusia apa yang belum diketahuinya. (Q.. al-'Alaq, 96:1-5).*

menulis tersebut di kalangan Islam tidak hanya telah lahir para ulama yang mumpuni dalam bidang ilmu agama, melainkan juga dalam bidang ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, fisika, optika, astronomi, kedokteran, seni, arsitektur, dan lain sebagainya.⁴

Selain itu, umat Islam pada zaman tersebut sudah memiliki tradisi ilmiah yang sangat kuat, seperti *rihlal ilmiah* (melakukan perjalanan jauh guna menuntut ilmu), membaca, menulis, menerjemahkan buku, membangun perpustakaan, laboratorium penelitian dan lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi yang amat variatif, menyediakan dana pendidikan yang cukup melalui lembaga *zakat*, *infaq* dan *waqaf*, melakukan penelitian yang bervariasi, seperti penelitian *bayani* (ilmu agama), *burhani* (ilmu sosial), *ijbari* (ilmu fisika dan ilmu terapan), *'irfani* (ilmu tasawuf), dan *jadali* (filsafat).⁵ Berbagai upaya tersebut dilakukan secara sungguh-sungguh dan berkualitas.⁶

Melalui berbagai upaya sebagaimana tersebut di atas, ummat Islam telah berhasil mewujudkan fungsi dan misinya sebagai pembawa rahmat, kedamaian, keharmonisan dan kesejahteraan bagi seluruh ummat manusia dan seluruh alam (*rahmatan lil alamin*). Pada saat itu, ummat Islam menjadi kiblat peradaban dunia. Kota Baghdad yang berada di Irak, Granada

⁴ Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1994), cet. I, hal. 76-89; Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2011), cet. I, hal. 87=90/

⁵ Lihat Ahmad Syalabi, *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1982), cet. I, hal. 24-67; Michael Stanton, *Higher Learning in Islam (Perguruan Tinggi dalam Islam)*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1994), cet. I, hal. 74-95; Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2010), cet. I, hal. 70-98; Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1994), cet. I, hal. 70-125.

⁶ Melakukan usaha yang sungguh-sungguh dan berkualitas adalah merupakan bagian dari tradisi ajaran Islam. Di dalam al-Qur'an Allah SWT menyatakan: "*Mahasuci (Allah) yang di tangan-Nya semua kerajaan, dan Dia Mahakuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya Dia menguji kamu siapakah yang lebih baik di antara kamu amalnya. Dai Dia Maha Perkasa lagi Maga Pengampun*". (Q.S. al-Mulk, 67:1-2).

dan Seville yang berada di Spanyol, dan Kairo yang berada di Mesir termasuk pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia. Peradaban dunia yang semula berpusat di Mesopotami, Babilonia, Yunani, India, China, dan Persia telah berpindah ke dunia Islam. Berbagai pelajar baik dari Timur, Barat dan Eropa pergi berduyun-duyun ke berbagai pusat ilmu pengetahuan dan peradaban dunia Islam tersebut.

Di kalangan para ahli telah terdapat kajian analisis yang mencari faktor-faktor penyebab terjadinya kemajuan dunia Islam itu. Hasil kajian para ahli tersebut menemukan, bahwa penyebab kemajuan dunia Islam saat itu, antara lain karena faktor *internal* dan *eksternal*. Secara *internal* ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam al-Qur'an dan al-hadis sangat menekankan pentingnya pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban melalui kegiatan membaca, menulis dan melakukan penelitian yang sungguh-sungguh dan berkualitas sebagaimana tersebut di atas. Sedangkan secara *eksternal*, karena umat Islam menemukan dan mengembangkan warisan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban yang ditinggalkan Yunani, India, China, dan Persia. Berbagai warisan kebudayaan, peradaban dan warisan ilmiah dari berbagai bangsa tersebut telah direvitalisasi kembali melalui kegiatan penerjemahan dan proses dialektika dan sintesa. Melalui kegiatan ini, umat Islam tidak begitu saja menerima warisan ilmu dan budaya dari bangsa-bangsa tersebut, melainkan terlebih dahulu mengkajinya secara mendalam untuk kemudian membangun epistemologi baru yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, yakni ajaran yang menganggap bahwa sesuatu yang bersifat realitas dan niscaya adanya, bukan hanya yang dapat diamati oleh pancaindera, atau disimpulkan melalui penalaran, melainkan juga sesuatu yang dapat diyakini oleh hati, diterima oleh intuisi serta yang disampaikan oleh wahyu. Melalui upaya ini, umat Islam telah berhasil mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan berdasar pada epistemologi yang jauh lebih kokoh, *integrated* dan *holistic*. Atas dasar ini pula, maka

tidaklah mengherankan jika di kalangan ulama Islam dijumpai para pakar yang ahli dalam ilmu agama, seperti tafsir, hadis dan teologi, namun dalam waktu yang bersamaan, mereka juga ahli dalam bidang ilmu umum, seperti fisika, matematika, astronomi, kedokteran, seni, filsafat, arsitektur, dan lain sebagainya.⁷ Mereka itu selanjutnya dikenal sebagai ilmuwan yang ensiklopedik.

Melalui berbagai warisan ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban yang dikembangkan umat Islam tersebut, maka warisan ilmu pengetahuan Yunani, India, China dan Persia yang terbenakalai dan hampir punah itu dapat dihidupkan, diselamatkan dan dikembangkan oleh umat Islam dalam rangka mewujudkan keadaan dunia yang sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Inilah yang oleh sejarah disebut sebagai abad keemasan Islam (*The Golden Age of Islam*). Keadaan dunia Islam yang demikian itu berbeda dengan keadaan di Eropa dan Barat yang pada saat itu tengah berada dalam abad ke kegelapan (*The Dark Age*) sebagai akibat dari praktek politik yang diktator, kuatnya dogmatisme kalangan agama terhadap kebebasan para ilmuwan, serta terjebaknya mereka ke dalam pola hidup masyarakat yang bercorak feodalistik, khurafat, bid'ah dan takhayul.

Namun demikian, mulai abad ke 14 M. sampai dengan akhir abad ke-18 M. dunia Islam terjebak dalam konflik politik yang berkepanjangan, baik secara *internal* maupun *eksternal*, tertutupnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang sudah mapan, kehidupan yang lebih

⁷ Di kalangan umat Islam, terdapat ulama yang selain ahli dalam bidang ilmu agama, seni dan filsafat, mereka juga ahli dalam bidang kedokteran, farmasi, astronomi dan lain sebagainya. Mereka itu antara lain al-Kindi, al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Miskawaih, al-Ghazali, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, al-Khawarizmi, al-Fajari, al-Fargani, al-Tusi dan masih banyak lagi. Lihat Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2010), Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1994), cet. I, hal. 130-145; Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta:UI Press, 1977), cet. I, hal. 20-31;

menekankan aspek *spiritual* dan *ritual* yang terlepas dari *spirit*-nya, terjebak pada praktek kultus individu, *khurafah*, *bid'ah* dan *takhayul*, terjadinya dikhotomi dalam bidang pendidikan agama dan umum, serta hilangnya tradisi ilmiah sebagaimana tersebut di atas. Akibat dari keadaan yang demikian itu, maka umat Islam menjadi terpecah belah, terkotak-kotak ke dalam *mazdhab* dan aliran politik, tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban, dan akhirnya menjadi bangsa yang dijajah oleh bangsa Eropa dan Barat, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Portugis, Belanda dan sebagainya.⁸

Kebijakan setiap negara penjajah terhadap negara jajahannya berbeda-beda. Portugis dan Belanda misalnya termasuk penjajah yang umumnya menyengsarakan dan membodohkan rakyat jajahannya. Sedangkan Inggris dan Perancis termasuk bangsa yang menerapkan strategi penjajahannya dengan cara memberdayakan rakyat jajahannya melalui kegiatan pendidikan. Untuk itu beberapa negara jajahan Inggris dan Perancis, seperti Mesir dan India, lebih mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu. Melalui akses inilah, maka di Mesir dan India terdapat sejumlah pemikir Islam yang tercerahkan, yang selanjutnya menyuarakan ide-ide pembaruan dan kebangkitan Islam yang selanjutnya membawa kepada gerakan kemerdekaan negara Islam. Ide-ide pembaruan dan kebangkitan Islam tersebut selanjutnya mempengaruhi pula beberapa tokoh Islam di Indonesia, seperti Ki Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, Muhammad Natsir dan lainnya. Melalui upaya para tokoh dan segenap komponen bangsa Indonesia lainnya ini, pada gilirannya dapat membawa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang.

Secara geografis, kini dunia Islam di seluruh dunia sudah tidak ada lagi yang berada di bawah penjajahan negara-negara Eropa dan Barat. Namun dari segi ekonomi, politik, kebudayaan dan peradaban masih banyak negara Islam yang berada dalam

hegemoni negara-negara adi daya, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Adapun penyebab utama terjadinya keadaan yang demikian itu, karena negara-negara Islam pada umumnya keterbelakangan dalam bidang pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka strategi utama yang harus digunakan adalah dengan melakukan pembaruan dan peningkatan mutu pendidikan dengan tetap berbasis pada ajaran Islam dan budaya bangsa sendiri.

Pendidikan Islam sebagaimana pendidikan lainnya menganut sistem berjenjang, yakni mulai dari tingkat pra sekolah (*Raudlatul Athfal* atau Taman Kanak-kanak), tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, 'Aliyah sampai dengan Perguruan Tinggi Islam, seperti Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI), negeri dan swasta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam baik negeri maupun swasta. Setiap jenjang pendidikan ini memiliki hubungan yang erat antara satu dan lainnya. Jika mutu pendidikan pada tingkat pra sekolahnya baik dan unggul, maka mutu pendidikan pada tingkat selanjutnya juga akan baik dan unggul pula.

Selain itu pendidikan Islam juga merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang antara satu dan lainnya saling berhubungan erat. Komponen tersebut adalah visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, guru, murid, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan, lingkungan, evaluasi, dan lain sebagainya. Berbagai komponen pendidikan tersebut harus ditingkatkan mutunya secara bersama-sama, karena antara satu dan lainnya saling mempengaruhi. Sebagai contoh, jika seorang calon siswa memiliki minat, motivasi, dan kecerdasan yang tinggi, namun guru, proses belajar mengajar, sarana prasarana dan lingkungannya tidak mendukung, maka bakat, minat, motivasi dan kecerdasan anak tersebut tidak akan tumbuh dengan baik, malah sebaliknya akan menjadi kerdil, seperti tanaman bonsai. Keadaan ini mengharuskan adanya upaya peningkatan terhadap seluruh komponen pendidikan.

Perhatian terhadap peningkatan dan pengembangan pendidikan Islam yang bermutu tinggi dan sesuai dengan tantangan globalisasi sebagaimana tersebut di atas, selain menjadi perhatian pemerintah pusat, juga menjadi perhatian Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Dalam program jangka panjang dan menengah Kota Tangerang Selatan misalnya ditegaskan, bahwa peningkatan mutu pendidikan telah menjadi perhatian utama. Hal ini selain sesuai dengan posisi geografis Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah yang bertetangga dengan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, juga sejalan dengan dinamika pertumbuhan dan perkembangan Kota Tangerang Selatan sebagai kota jasa dan industri yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁹

Dalam situasi dan kondisi Kota Tangerang Selatan yang demikian itu, maka seluruh penduduknya, terutama yang beragama Islam harus memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini perlu ditekankan, karena sebagian besar penduduk Kota Tangerang Selatan terdiri dari umat Islam yang tergolong miskin yang kurang dapat mengakses pendidikan yang bermutu. Sebagian besar dari mereka juga masih sebagai pedagang kecil, dan petani miskin.

Keadaan umat Islam yang demikian itu perlu segera diatasi, karena dapat menjadi sumber timbulnya berbagai kerawanan dan kecemburuan sosial yang mengarah pada meningkatkannya kriminalitas, perilaku *anarkhisme*, *radikalisme*, konflik sosial dan lain sebagainya.

Melalui paparan tersebut di atas maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini dapat

⁹ Lihat H. Ahadi, MM, *Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan 2011 (Bidang Pendidikan)* pada Seminar Alumni Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, 11 November 2010. Pada halaman 2 makalah itu dikatakan, bahwa prioritas 3 adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, dengan sasaran: meningkatnya angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, meningkatnya rasio guru/murid dan meningkatnya rasio guru/murid perkelas rata-rata.

dikemukakan sebagai berikut. *Pertama*, bahwa dari sejak awal kelahirannya Islam memiliki perhatian dan komitmen yang besar untuk memajukan dunia pendidikan. *Kedua*, bahwa kemajuan Islam telah memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan bangsa-bangsa di dunia. *Ketiga*, bahwa dari sejak awal, Islam telah berpengalaman dalam menghadapi era globalisasi, yaitu ketika ummat Islam mencerap ilmu pengetahuan dari Yunani, India, China dan Persia. *Keempat*, Islam telah berpengalaman dalam melakukan proses dealektika internal dengan berbagai unsur dari luar untuk selanjutnya melahirkan kebudayaan baru yang tetap tidak kehilangan visi transendentalnya. *Kelima*, saat ini kedaan ummat Islam pada umumnya tertinggal dari Eropa dan Barat, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan peradaban pada umumnya. *Keenam*, saat ini telah lahir kesadaran baru dari kalangan ummat Islam untuk membangun kembali kejayaannya, dengan cara memajukan dunia pendidikannya. *Ketujuh*, bahwa peningkatan mutu pendidikan harus berlangsung secara simultan, yakni dengan cara memperbaiki seluruh komponen pendidikan yang terdapat pada seluruh jenjang pendidikan Islam. *Kedelapan*, Kota Tangerang Selatan memiliki perhatian dan agenda utama dalam peningkatan mutu pendidikan.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penelitian ini akan dibatasi pada upaya menggambarkan secara utuh, komprehensif, tepat dan akurat terhadap mutu pendidikan Islam pada jenjang Madrasah Aliyah yang berada di Kota Tangerang Selatan, baik negeri maupun swasta. Pembatasan masalah ini didasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, bahwa jenjang pendidikan Madrasah Aliyah menempati posisi yang strategis dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya, karena lulusan Madrasah Aliyah ini selain

dapat memasuki lapangan kerja, juga dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan demikian, mutu lulusan perguruan tinggi sangat ditentukan oleh mutu lulusan Madrasah Aliyah.

Kedua, bahwa jenjang pendidikan Madrasah Aliyah merupakan akumulasi dari mutu jenjang pendidikan sebelumnya. Dengan demikian, mutu lulusan Madrasah Aliyah sangat ditentukan oleh mutu lulusan jenjang pendidikan sebelumnya. Jika mutu lulusan Madrasah Aliyah tersebut baik dan unggul, maka dapat diasumsikan, bahwa mutu lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah tersebut juga baik dan unggul. Oleh karena itu, jika hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mutu lulusan Madrasah Aliyah dalam keadaan rendah, maka dapat diduga keras, bahwa mutu lulusan Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah juga rendah. Keadaan ini akan berimplikasi pada perlunya peningkatan mutu pendidikan secara simultan, yakni mulai dari tingkat pra sekolah, dasar dan menengah.

Ketiga, bahwa Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta yang berada di Kota Tangerang Selatan jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Madrasah Ibtidaiyah dan Tsanawiyah. Dengan jumlah Madrasah yang lebih kecil ini, yakni sekitar 19 buah, maka penelitian ini menggunakan *total sampling*, yakni menggunakan seluruh Madrasah Aliyah yang berada di Kota Tangerang Selatan sebagai obyek penelitian. Dengan cara demikian, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh dan data yang lebih komprehensif dan representatif.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, maka masalah pokok penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan. Dari rumusan masalah pokok ini dapat pula dikemukakan turunan masalahnya sebagai berikut.

- a) Bagaimanakah persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan?
- b) Bagaimana mutu komponen pendidikan pada Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan?
- c) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan?

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh penelusuran tim peneliti, belum ada hasil penelitian yang secara khusus meneliti mengenai pengaruh globalisasi terhadap lahirnya berbagai paradigma baru pendidikan serta respon Kota Tangerang Selatan Banten terhadapnya. Kalaupun ada penelitian, namun sifatnya parsial atau spesifik, yakni penelitian terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam yang didasarkan pada aspek-aspek tertentu saja. Misalnya penelitian terhadap manajemen pengelolaan pendidikan pada Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong Tangerang Banten; penelitian terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar pada Madrasah Pembangunan; dan penelitian tentang profil guru pada Sekolah Islam Al-Izhar, Bumi Serpong Damai (BSD).

Berbagai penelitian tersebut bertujuan selain dalam rangka memperoleh temuan guna penyelesaian studi si peneliti, juga sebagai bahan masukan bagi peningkatan dan pengembangan lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Penelitian yang memotret secara komprehensif mengenai keadaan mutu pendidikan Islam secara keseluruhan di Kota Tangerang Selatan yang selanjutnya menjadi bahan masukan yang berharga bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan tersebut belum dilakukan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian tentang mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Tujuan

Sejalan dengan identifikasi dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang lengkap, utuh, akurat dan komprehensif tentang mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan, Banten.

2. Manfaat

Hasil penelitian ini amat bermanfaat bagi Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan khususnya, dan Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Banten Umumnya, serta Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam melakukan langkah-langkah pembinaan terhadap Madrasah Aliyah yang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan, sehingga menjadi lembaga pendidikan yang unggul, handal dan terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Berkaitan dengan judul penelitian di atas, yakni Mutu Pendidikan Islam, maka perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut.

1. Pengertian Mutu

Preffer dan Coote sebagaimana dikutip Edward dan Sallis mengatakan, bahwa mutu adalah sebagai konsep yang licik (*a slippery concept*). Hal ini disebabkan, karena istilah "bermutu" berkaitan dengan sudut pandang dan sudut kepentingan pengguna istilah yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi, disebabkan oleh konsep mutu yang bertolak dari standar absolut yang beranggapan bahwa mutu merupakan suatu keindahan, kebenaran yang pasti dan tanpa kompromi. Sementara yang relatif bertolak dari pikiran bahwa mutu merupakan sesuatu yang "*not be expensive and exclusive, my be*

beautiful but not necessarily, so they do not have to be special. They can be ordinary, commonplace and familiar". Hal ini didasarkan pada kenyataan adanya perbedaan antara kepentingan subjek penghasil barang atau jasa dengan kepentingan pemakai barang atau jasa. Saat subjek berorientasi pada kepentingan pemakai, para pemakai sendiri lebih berorientasi pada persepsinya masing-masing tentang mutu. Dalam dunia pendidikan, secara substantif mutu mengandung dua hal. *Pertama* sifat, dan *kedua* taraf. Sifat adalah sesuatu yang menerangkan keadaan benda. Sedangkan taraf menunjukkan kedudukannya dalam suatu skala.

Selanjutnya deskripsi mutu yang berdasarkan pendekatan ekonomi menekankan pada relevansi keluaran pendidikan dengan lapangan kerja yang ditampilkan melalui istilah "siap pakai", "siap kerja", "siap latih", dan seterusnya. Hal ini berbeda dengan deskripsi yang memakai pendekatan intrinsik dan instrumental pendidikan. Pendekatan kedua ditampilkan melalui istilah-istilah sikap, kepribadian dan kemampuan intelektual sesuai dengan tuntutan tujuan pendidikan nasional. Mutu pendidikan dapat didefinisikan berdasarkan pendekatan dua dimensi, yakni intrinsik dan instrumental. Pendekatan intrinsik orientasinya substantif. Sedangkan pendekatan instrumental orientasinya situasional dan institusional.¹⁰

Selanjutnya Stephen Uselac sebagaimana dikutip Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, mengatakan, bahwa mutu bukan hanya menentukan produk dan jasa, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia. Berkenaan dengan ini, maka di kalangan para ahli terdapat sejumlah definisi tentang mutu sebagai berikut.

- a) *Performance to the standard expected by the customer;*
- b) *Meeting the customers need the first time and every time;*

¹⁰ Lihat Uwes Sanusi, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I, hal. 27.

- c) *Providing our customers with products and services that consistently meet their needs and expectations;*
- d) *Doing the right the first time, always striving for improvement, and always satisfying the customer;*
- e) *A pragmatic system of continual improvement, a way to successfully organize man and machines;*
- f) *The meaning of excellence;*
- g) *The best product that you can produce with the materials that you have to works with;*
- h) *Continuous good product which a customer can trust;*
- i) *Not only satisfying customers, but delighting them, innovating, creating.*¹¹

Selanjutnya ada pula yang berpendapat bahwa *quality is an emerging concept. In the past, quality meant “conformance to valid customer requirements” that is, as long as an output fell within acceptable limits, called specification limits, around a desire value, called the nominal value (denoted by) or target value, it was deemed conforming, good, or acceptable. We refer to this as the goalpost definition of quality. The nominal value and specification limit are based on the perceived needs and wants of customers.*

Artinya: bahwa mutu adalah sebuah konsep yang bersifat mendesak dan terus berkembang. Pada masa lalu, mutu diartikan sebagai upaya memberikan pelayanan yang benar kepada kebutuhan pelanggan, dan karena itu setiap yang dihasilkan harus memenuhi batas yang dapat diterima pelanggan, yang selanjutnya disebut sebagai batas yang bersifat spesifik, sekitar nilai yang diharapkan yang selanjutnya disebut nilai nominal atau nilai yang ditargetkan, yang selanjutnya

¹¹ Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2003), cet. V, hal. 3.

disebut sebagai kebutuhan yang diminta, yang baik, atau yang dapat diterima.¹²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kualitas meliputi: 1) usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan; 2) kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan, dan 3) kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini, mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa mendatang).

Dengan demikian, kualitas merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

Di dalam penelitian ini, pengertian kualitas atau mutu yang digunakan adalah perpaduan antara pengertian kualitas yang didasarkan pada pendekatan intrinsik dan ekstrinsik. Dengan pendekatan intrinsik, maka yang dimaksud dengan kualitas di sini adalah kualitas yang berkaitan dengan sikap, kepribadian dan keadaan tentang sesuatu yang bersifat luhur dan mulia berdasarkan nilai-nilai agama Islam dan budaya Indonesia. Dan yang dimaksud dengan pendekatan yang ekstrinsik, adalah kualitas yang didasarkan pada upaya memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang sifatnya dinamis.

2. Pendidikan Madrasah Aliyah

Pendidikan Madrasah Aliyah yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua segi. *Pertama* dari segi jenjang, yaitu pendidikan umum yang berciri khas keislaman yang berada pada tingkat setelah Madrasah Tsanawiyah, dan sebelum Perguruan Tinggi. *Kedua*, dari segi sistem, yaitu pendidikan yang di dalamnya terdapat berbagai komponen pendidikan: visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, lingkungan, evaluasi dan kerjasama yang antara satu dan lainnya

¹² Lihat Howard S. Gitlow, Ect, *Quality Management*, (MacGraw –Hill Irwin, 2005), hal. 17

saling berkaitan. Berbagai komponen tersebut akan dilihat mutu atau kualitasnya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta penjelasan dan penjabaran atas peraturan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.¹³

Dengan demikian, yang dimaksud dengan mutu pendidikan Madrasah Aliyah dalam penelitian ini adalah kualitas atau mutu dari seluruh komponen pendidikan yang terdapat pada Madrasah Aliyah yang sesuai dengan ajaran Islam serta memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas atau mutu tersebut keadaannya bersifat dinamis dan berhubungan dengan jasa pendidikan yang memenuhi atau melebihi harapan.

F. Metodologi

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan riset kualitatif, yakni sebuah riset yang bertumpu pada upaya mencari makna atau menemukan aspek yang fundamental dan substantif yang didasarkan pada data-data yang berhasil dikumpulkan. Data-data tersebut selanjutnya dihubungkan antara satu dan lainnya, serta bersifat saling menjelaskan antara satu dan lainnya.

Dengan demikian penelitian ini tidak bertolak dari sebuah hipotesa atau asumsi yang ingin dibuktikan, melainkan bertolak dari keinginan untuk memperoleh temuan tentang kondisi obyektif tentang mutu pendidikan Islam yang ada di

¹³ Lihat *Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005*; Himpunan Permendiknas tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Standar Kepala Sekolah, Standar Pengawas Sekolah dan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, (Jakarta:Asa Mandiri, 2008), cet. I.

Tangerang Selatan secara utuh dan komprehensif, yaitu mutu yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar lulusan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Penelitian ini merupakan perpaduan antara riset perpustakaan (*library research*) dengan riset lapangan (*field research*). Dengan demikian data-data yang digunakan dalam penelitian ini selain melalui penelusuran informasi yang ada di dalam Peraturan Perundangan, kebijakan dan laporan Pemerintah Daerah/Kota Tangerang, buku, jurnal ilmiah, koran, data-data yang diambil dari *website* dan *digital library*, juga melalui observasi atau pengamatan terhadap kegiatan belajar mengajar pada Madrasah Aliyah, wawancara dengan Pejabat Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Banten, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan; para pakar pendidikan Islam, para Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan, serta penyebaran daftar isian kepada setiap Madrasah Aliyah se Kota Tangerang Selatan.

Dengan demikian, konsep riset yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic, critical and self-critical enquiry which aim to contribute towards the advancement of knowledge and wisdom*. Yaitu sebuah usaha yang bersifat sistematis, kritis dan memenuhi kebutuhan yang bersifat kritis dengan tujuan untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu dan kebijakan.¹⁴

¹⁴ Lihat Ann R.J. Briggs and Marianne Coleman, *Research Methods in Educational Leadership and Management*, (Los Angeles-London-New Delhi-Singapore:SAGE Publications, 2007), hal. 14

2. Obyek Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka obyek penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut.

No.	Bidang Penelitian	Uraian/Deskripsi
1.	Persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. 2. Persepsi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. 3. Persepsi Para Kepala Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan. 4. Persepsi Tokoh Masyarakat dan Pendidik di Kota Tangerang Selatan.
2.	Komponen Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutu Standar Isi/Kurikulum 2. Mutu Standar Proses 3. Mutu Standar Kompetensi Lulusan 4. Mutu Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Mutu Standar Sarana dan Prasarana 6. Mutu Pedoman yang Dimiliki Sekolah 7. Mutu Standar Pembiayaan/Anggaran Sekolah/Madrasah 8. Mutu Standar Penilaian
3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Eksternal: 1)kebijakan pemerintah; 2)anggaran pendidikan; 3)sosio kultural; 4)lapangan kerja. 2. Faktor internal: 1)penyelenggara pendidikan; 2)pengelola pendidikan.

4.	Langkah-langkah Strategis yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan.	Jumlah ruangan kelas, jumlah ruangan guru, ruang pimpinan, ruang staf, laboratorium, ruang praktikum, perpustakaan, musholla, lapangan olahraga, sanggar seni, ruang pertemuan/aula, kantin, ruang istirahat guru dan siswa, jaringan internet, taman/ruang sosialisasi, kuantitas dan kualitas dari masing-masing sarana prasarana tersebut, kondisi keterpakaian, dan peralatan lainnya. Selain itu dilihat pula keadaan lingkungan dari segi kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan dan kenyamanan.
----	--	---

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dapat dikemukakan sebagai berikut.

a) Studi Dokumentasi.

Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka pengumpulan data tertulis berupa peraturan dan kebijakan Pemerintah Propinsi Banten tentang pendidikan, peraturan dan kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan tentang pendidikan, peraturan dan kebijakan Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Banten, peraturan dan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, laporan tahunan masing-masing instansi terkait, buku, jurnal ilmiah, kumpulan pidato pejabat terkait, koran lokal dan nasional, serta data-data yang diperoleh dari *website* dan *digital library*. Data-data yang terdapat dalam dokumen tersebut akan diteliti keasliannya, tahun pembuatannya, orang-orang yang terlibat dalam

penyusunan dokumen tersebut, serta hal-hal lainnya yang terkait.¹⁵

b) Wawancara Mendalam (*Deep Interview*)

Wawancara mendalam (*deep interview*) dalam penelitian ini dilakukan dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah. Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas pendidikan Kota Tangerang Selatan, Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Propinsi Banten, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, para pakar pendidikan Islam, para kepala sekolah Aliyah.¹⁶ Wawancara dilakukan dalam rangka mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu sebagaimana tersebut di atas, untuk keperluan informasi yang sarasannya terdiri dari para informan.

c) Observasi

¹⁵ Secara metodologis penggunaan bahan dokumen tidak ada perbedaan, artinya penggarapan bahan dokumen sebagai metode historis yang pokok oleh para ahli ilmu sosial perlu dilakukan menurut aturan-aturan umum yang telah lama digariskan dalam metodologi sejarah. Jadi sebelum mengolah fakta dan data sesuai dengan persoalan masyarakat yang hendak diteliti, dokumen itu perlu dianalisa lebih dahulu secara kritis menurut metodologi sejarah. Misalnya sampai dimanakah dokumen itu asli. Bagaimana diidentifikasikan orang yang membuat dokumen itu? Apakah fakta-fakta yang termuat dalam dokumen itu nyata, dan bagaimana menentukan kenyataannya. Lihat Sartono Kartodirdjo, Metode Penggunaan Bahan Dokumen, dalam Kuntjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1983), cet. V, hal. 44.

¹⁶ Wawancara dalam suatu penelitian yang bertujuan menyimpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan pembantu utama dari metode observasi. Wawancara ada dua macam, yaitu wawancara untuk mendapatkan keterangan dan data dari individu-individu tertentu untuk keperluan informan, dan wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang pribadi, pendirian atau pandangan dari individu yang diwawancarai untuk keperluan komparasi yang sarasannya disebut responden. Lihat Koentjaraningrat, Metode Wawancara dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1983), cet. V, hal. 138.

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap lokasi dan lingkungan di mana proses kegiatan belajar mengajar, pengelolaan administrasi, lingkungan, sarana prasarana, pelayanan, kebersihan, ketertiban, keamanan, keindahan, kenyamanan serta hal-hal lainnya dilakukan pada Madrasah Aliyah se Kota Tangerang Selatan. Observasi ini dilakukan secara terkendali, yakni dengan menggunakan daftar wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁷

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data terkumpul, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah pengolahan data (*data processing*) dan analisis data yang mencakup:

a) Reduksi Data

Merangkum, mengikhtisar dan menyeleksi data-data yang sudah terkumpul, baik yang berasal dari studi dokumentasi, maupun hasil observasi, wawancara mendalam dengan berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas, ke dalam pola, kategori, memilah dan memilih, menentukan fokus, tema, dan pokok permasalahan yang sesuai dengan obyek penelitian.

b) Display Data

Menyajikan hasil reduksi data ke dalam sejumlah matrik yang sesuai dengan pola, kategori, fokus, tema dan

¹⁷ Pengumpulan bahan keterangan mengenai kenyataan yang hendak dipelajari dengan menggunakan cara pengamatan dapat diselenggarakan oleh seorang peneliti saja, dan kalau perlu tanpa biaya apapun. Dalam usaha pengembangan pengetahuan ilmiah mengenai segala sesuatu yang diwujudkan oleh alam semesta, pengamatan merupakan metode yang pertama-tama digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Pengamatan sebagai cara penelitian, menuntut jaminan bahwa hasil pengamatan memang sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran perhatian. Untuk hal itu, seorang peneliti harus berusaha membandingkan bilamana mungkin hasil pengamatannya dengan hasil pengamatan orang lain yang pernah melakukan pengamatan yang sama. Lihat Harsa W. Bachtiar, "Pengamatan sebagai suatu Metode Penelitian", dalam Koentaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1983), cet. V, hal. 108.

pokok permasalahan yang hendak dipahami dan dimengerti duduk persoalannya. Matrik-matrik *display* data ini di samping untuk memetakan data yang telah direduksi, juga untuk memudahkan pengkontruksian dalam menuturkan, menyimpulkan, dan menginterpretasi data, juga berfungsi sebagai daftar yang dapat secara ringkas dan cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan; bila data dianggap masih kurang atau belum lengkap, dapat segera dicari pada sumber-sumber yang relevan.

c) *Menganalisis Data*

Data-data yang telah direduksi dan di-*display* sebagaimana tersebut di atas, kemudian dianalisis secara obyektif, kritis, utuh, komprehensif, holistik, *integrated* dan secara fungsional dapat saling menjelaskan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Melalui cara ini, maka analisis yang bersifat *trianggulasi* dapat diterapkan. Dalam analisis tersebut juga digunakan teori-teori pendidikan yang terkait dengan penjaminan mutu pendidikan, yakni teori-teori pendidikan yang berkaitan dengan standar isi/kurikulum, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, standar sarana prasarana, standar pembiayaan, standar lulusan dan standar evaluasi pendidikan.

d) *Menarik Kesimpulan dan Rekomendasi*

Berdasarkan analisis tersebut di atas, kemudian ditarik kesimpulan yang berisafat utuh, komprehensif dan holistik, yang isinya selain jawaban atas masalah yang dirumuskan, juga menghasilkan sebuah temuan pokok yang menggambarkan keadaan mutu pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan dalam kaitannya dengan respon terhadap globalisasi pendidikan.

Dari kesimpulan tersebut kemudian diajukan pula rekomendasi, berupa usul, saran dan masukan bagi penentuan kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam bidang

peningkatan mutu pendidikan Madrasah Aliyah serta kaitannya dengan respon terhadap tantangan pendidikan di era globalisasi.

a) Penyajian Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini disajikan secara *verbal* (dalam bentuk kata-kata dan kalimat) yang disusun secara sistematis sebagai hasil pembacaan dan analisis terhadap objek kajian, sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan, selain untuk memudahkan pemahaman, juga dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana pertanyaan utama penelitian (*main research question*) telah dimukan jawabannya.

b) Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak berpretensi ingin menjawab semua masalah pendidikan secara tuntas, atau seluruh pertanyaan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan Islam, serta berbagai respon terhadap globalisasi pendidikan. Secara spesifik, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang keadaan mutu pendidikan Madrasah Aliyah yang tersebar di Kota Tangerang Selatan. Mutu pendidikan Madrasah Aliyah tersebut adalah yang berkaitan dengan isi/kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, proses belajar mengajar, sarana prasarana, pembiayaan, pengelolaan, lulusan dan evaluasi pendidikan.

Penegasan mengenai hal ini penting dikemukakan sejak awal, mengingat sejumlah keterbatasan yang mungkin dihadapi, seperti keterbatasan waktu dan dana yang tersedia. Keterbatasan lain boleh jadi terletak pada literatur yang dapat diakses peneliti untuk kepentingan penelitian. Namun betapapun demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan masukan, gagasan, pemikiran dan informasi bagi perumusan kebijakan tentang peningkatan mutu pendidikan Islam pada umumnya, dan mutu Madrasah Aliyah pada khususnya di Kota Tangerang Selatan, Banten.

G. Sistematika Penulisan Laporan

Penulisan laporan penelitian ini terdiri dari 5 bab dengan uraian dan cakupan isinya sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan.

Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, penelitian yang terdahulu, tujuan dan manfaat penelitian; metodologi penelitian yang memuat tentang jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan menarik kesimpulan serta rekomendasi.

Bab II. Teori dan Sejarah Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah di Inonesia.

Bab ini berisi pendapat dan perdebatan para pakar pendidikan tentang mutu pendidikan, berbagai macam indikator mutu pendidikan madrasah, strategi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Uraian pada bab ini berdasar pada data hasil penelitian kepustakaan (*library research*).

Bab III. Kondisi Sosiologis Kota Tangerang Selatan.

Bab ini dikemukakan hubungan antara perkembangan masyarakat dengan pendidikan, kondisi geografis dan demografis Kota Tangerang Selatan, kondisi kehidupan beragama dan budaya Kota Tangerang Selatan, serta kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruhnya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

Bab IV. Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan.

Bab ini berisi informasi tentang mutu visi, misi, tujuan, kurikulum, proses belajar mengajar, tenaga pendidik (guru) dan kependidikan, sarana prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, lulusan pendidikan, pengelolaan pendidikan, lingkungan pendidikan dan evaluasi pendidikan, yang semuanya ini diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi ke lokasi penelitian yakni Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan yang jumlahnya sebanyak 4 buah (20%) dari total Madrasah Aliyah yang ada.

Bab V. Penutup.

Pada bab ini dikemukakan penutup berupa kesimpulan yang berisi jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini, yang dituangkan dalam bentuk temuan yang bersikap konsepsional teoritis. Selain itu pada bab penutup ini dikemukakan tentang saran dan rekomendasi yang perlu ditindak lanjut oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan, para pemangku dan pengelola satuan pendidikan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan.

Pada bagian akhir laporan penelitian ini juga dicantumkan daftar pustaka, daftar tabel, grafik, foto-foto yang relevan, serta biodata peneliti secara lengkap.

H. Pelaksana

Penelitian ini dilaksanakan oleh sebuah tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Nomor: Un.01/KPA/244/2011 (sebagaimana terampir). Tim ini selengkapny sebagai berikut.

1. Ketua : Prof. Dr. Abuddin Nata, MA.
2. Sekretaris : Willy Octaviano, Lc., MA
3. Anggota : 1) Dr. Abd. Rozak A. Sastra, MA
2) Dra. Madinatul Musyarofah
3) Arip Saripudin, S.Kom.

4. Pembantu : Mahasiswa 6 orang (terdiri 3 orang semester 4 dan 3 orang semester 6) Fakultas Dirasat Islamiyah.

Uraian tugas masing-masing tim peneliti ini diuraikan dalam bagian tersendiri.

I. Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian ini selama 6 bulan yaitu dari mulai Mei s/d Oktober 2011. Jadwal penelitian selengkapnya dibuat tersendiri.

J. Biaya

Penelitian ini dibiayai oleh Anggaran DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011.

BAB II

TEORI DAN SEJARAH STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MADRASAH DI INDONESIA

A. Perdebatan tentang Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan acapkali menjadi bahan kajian dan perbincangan bukan saja di kalangan para ahli pendidikan, melainkan juga di kalangan para ahli lainnya, terutama kalangan pengguna jasa dan lulusan pendidikan. Hal yang demikian terjadi, karena mutu pendidikan memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada masyarakat modern yang bergerak dalam bidang industri dan jasa.

Lebih dari itu, sejak akhir abad ke-20 atau ketika memasuki *millenium ke-3* atau era globalisasi¹⁸ pembinaan mutu

¹⁸ Era global adalah era persaingan. Para pakar, khususnya para futurolog, telah memberikan berbagai skenario mengenai kehidupan dunia abad 21. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat dirangkum pada empat ciri, yaitu 1) dunia tanpa batas; 2) kemajuan ilmu dan teknologi, 3) kesadaran terhadap HAM serta kewajiban asasi manusia, dan 4) masyarakat mega kompetisi. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi, sekat-sekat kehidupan manusia menjadi sirna. Dunia seakan-akan menjadi suatu tempat yang disebut suatu *placeless society*. Dengan demikian, komunikasi antarmanusia, hubungan antarmanusia, masyarakat dan bangsa menjadi transparan. Tidak ada lagi yang dapat ditutup-tutupi. Inilah yang selanjutnya dikenal dengan istilah dunia tanpa batas, atau *global village*. Selanjutnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi begitu pesat, sehingga dunia membentuk suatu masyarakat yang baik, yakni masyarakat ilmu pengetahuan atau *knowledge society*. Teknologi komunikasi telah menolong penyebaran ilmu pengetahuan dan selanjutnya pengembangan dan

pendidikan menjadi agenda pada seluruh bangsa-bangsa di dunia dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini terjadi karena pada *millenium* ketiga itu antara lain ditandai oleh adanya persaingan yang ketat di antara negara-negara di dunia untuk saling merebut pasar untuk memasarkan berbagai produk negaranya, termasuk produk dalam bidang jasa pendidikan. Produk jasa bidang pendidikan yang bermutulah yang diprediksi akan mendapatkan pasar di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai negara di dunia telah meletakkan dasar-dasar, indikator dan prosedur untuk menetapkan pengakuan terhadap produk atau jasa yang dinilai bermutu. Adanya program *International Certificate Organisation* (ISO), Standard Nasional Pendidikan (SNP), Badan Akreditasi

pemanfaatannya untuk peningkatan mutu kehidupan manusia selanjutnya. Kemajuan teknologi komunikasi telah membantu umat manusia untuk mengenal ilmu pengetahuan dengan mudah, lebih cepat, lebih banyak dan up to date. Sementara itu runtuhnya ideologi komunis serta ideologi otoriter lainnya telah menonjolkan nilai-nilai kemanusiaan dan hakikat manusia sebagai suatu yang harus dihormati. Hak-hak asasi manusia di manapun di dunia ini adalah sama, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk dihidupi. Sejalan dengan itu, setiap manusia wajib memiliki tanggung jawab untuk memelihara masyarakat yang bebas dari ketakutan, bebas dari paksaan, dan bebas untuk mewujudkan kehidupannya sendiri dengan memperhatikan kepentingan hidup bersama. Manusia tidak dapat lagi hidup secara solitaire (tertutup dan terpencil). Masyarakat terbuka yang tanpa batas ini memungkinkan terjadinya kerjasama antarmasyarakat dan antarbangsa. Satu bangsa tidak dapat hidup terisolasi tanpa kerja sama dengan bangsa yang lain. Dan, di dalam hidup yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu dan setiap kelompok akan terjadi kompetisi yang sehat antarmasyarakat, antarbangsa. Dengan demikian, manusia abad 21 mempunyai kesempatan untuk berkembang sepenuhnya sesuai dengan potensi yang ada padanya. Kesempatan untuk berkembang akan memungkinkan seseorang atau kelompok masyarakat atau bangsa untuk berbuat sesuatu yang terbaik bagi dirinya, bagi masyarakatnya, dan bagi umat manusia. Lihat Mochtar Buuchori, *Pendidikan Antisipatoris*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), cet. V, hal. 98-102; Abuddin Nata, *Pendidikan Islam di Era Global*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2006), cet. I, hal. 216-217; Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I, hal. 3-10; Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. II, hal. 43-50; Jamal Ma'mur Asmani, *Tipts Efektif Menjadi Sekolah Berstandar Nasional dan Internasional*, (Jogjakarta:Harmoni, 20011), cet. I, hal. 19-23.

Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT), Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM) dan lain sebagainya menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan telah masuk sebagai salah satu agenda nasional dan internasional.

Mutu pendidikan selanjutnya telah masuk ke dalam bagian dari faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih lembaga pendidikan untuk para putera-puterinya. Masyarakat menganggap bahwa pendidikan yang bermutu itulah yang harus diberikan kepada para putera puterinya, sehingga dapat menjamin keberhasilan mereka dalam merebut berbagai peluang kerja dalam kehidupan yang makin kompetitif.

Sejalan dengan itu telah muncul pula paradigma baru yang melihat bahwa mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu adalah sebagai sebuah investasi yang menguntungkan. Masyarakat melihat bahwa lulusan dari lembaga pendidikan yang bermutu dan *recognise* memiliki nilai jual dan daya tawar yang tinggi. Lulusan pendidikan yang bermutu memiliki *civil effect* yang menentukan keterjaminan lulusan tersebut untuk memperoleh lapangan kerja yang secara ekonomi dan psikologis memiliki nilai yang strategis.

Selanjutnya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas, madrasah telah masuk ke dalam sistem pendidikan nasional. Dalam keadaan yang demikian, maka madrasahpun mau tidak mau harus ikut arus modernisasi dan globalisasi yang menuntut keunggulan mutu pendidikan yang diselenggarakannya.

Uraian pada bab ini selain akan menjelaskan teori tentang mutu pendidikan yang nantinya akan digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai dan menganalisa hasil temuan dalam penelitian ini, juga akan mengemukakan berbagai langkah dan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan segenap lapisan sosial lainnya dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Kajian terhadap kebijakan peningkatan mutu pendidikan madrasah ini selanjutnya digunakan sebagai

bahan perbandingan dengan kebijakan peningkatan mutu pendidikan madrasah yang terdapat di Kota Tangerang Selatan.

B. Indikator Mutu Pendidikan Madrasah

Indikator yang digunakan dalam menilai mutu pendidikan Madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama pada dasarnya sama dengan indikator yang digunakan dalam menilai mutu pendidikan umum yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, yaitu indikator mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam peraturan tersebut lingkup standar nasional pendidikan meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.¹⁹ Berbagai standar ini selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas), sehingga masing-masing standar tersebut menjadi jelas indikatornya, dan selanjutnya dapat digunakan untuk menilai penyelenggaraan pendidikan pada berbagai institusi pendidikan. Dalam penelitian ini berbagai indikator standar nasional pendidikan ini diolah sedemikian rupa, tanpa menghilangkan substansinya. Hal ini dilakukan, karena dalam dokumen Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang indikator berbagai standar pendidikan tersebut demikian luas dan detail, sehingga secara teknis sulit untuk diterapkan. Indikator mutu pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya sama dengan indikator mutu pendidikan dalam standar nasional pendidikan, namun sudah diolah sedemikian rupa.

¹⁹ Lihat *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005 Bab II, Pasal 2 ayat (1) tentang Standar Nasional Pendidikan*, (Bandung:Fokusmedia, 2010), hal. 66.

Secara kualitatif bahwa sekolah termasuk madrasah yang bermutu, adalah sekolah/madrasah yang mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan, potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan potensi peserta didik berdasarkan 8 standar nasional, sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas.²⁰

Secara lebih terperinci, bahwa sekolah yang bermutu yang selanjutnya didorong menjadi Sekolah Standar Nasional (SSN), adalah sekolah yang memiliki persyaratan minimal sebagai berikut:

1. Kinerja Sekolah

Kinerja sekolah yang dibuktikan dengan: 1)terakreditasi A; 2)rata-rata nilai UN tiga tahun terakhir minimal 7,00; 3)persentase kelulusan UN lebih kurang 90% untuk tiga tahun terakhir; 4)animo tiga tahun terakhir lebih dari daya tampung yang tersedia; 5)prestasi akademik dan non akademik yang dicapai cukup menggembirakan; 6)melaksanakan manajemen berbasis sekolah; 7)jumlah peserta didik per kelas minimal 32 orang; 8)ada pertemuan rutin antara pimpinan dan guru; serta 9)ada pertemuan rutin kepala sekolah dengan orang tua peserta didik.

2. Kurikulum

Kurikulum pada sekolah yang tergolong bermutu ditandai oleh: 1)memiliki Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang mencerminkan kurikulum SSN; 2)beban belajar dinyatakan dengan Satuan Kredit Semester; dan 3)mata pelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik dikelompokkan menjadi 3(tiga), yaitu pokok, pilihan wajib dan pilihan bebas.

²⁰ Luhut Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Menjadi Sekolah Berstandar Nasional dan Internasional*, (Jogjakarta:Harmoni, 2011), cet. I, hal. 43.

3. Ketersediaan Panduan Pelaksanaan

Ketersediaan panduan pelaksanaan, antara lain ditandai oleh: 1)memiliki pedoman pembelajaran; 2)memiliki pedoman pemilihan mata pelajaran sesuai dengan potensi dan minat peserta didik; 3)memiliki panduan penetapan potensi peserta didik, dan 4)memiliki pedoman penilaian.

4. Kesiapan Sekolah

Kesiapan sekolah antara lain ditandai oleh: 1)sekolah menyatakan kesiapan melaksanakan Sistem Kredit Semester (SKS); 2)persentase guru yang menyatakan siap melaksanakan SKS lebih kurang 90 persen; 3)pernyataan staf administrasi akademik bersedia melaksanakan SKS, dan 4)kemampuan staf administrasi akademik dalam menggunakan komputer.

5. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Kesiapan sumber daya manusia antara lain ditandai oleh: 1)persentase guru memenuhi kualifikasi akademik lebih kurang 75%; 2)relevansi guru setiap mata pelajaran dengan latar belakang pendidikan lebih kurang 75%; 3)rasio guru dan peserta didik 1:20; 4)jumlah tenaga administrasi akademik sesuai ketentuan; dan 5)rasio guru bimbingan konseling/karier sesuai ketentuan.

6. Ketersediaan Fasilitas

Ketersediaan fasilitas antara lain ditandai oleh: 1)ruang kelas yang cukup, bersih, indah, dan nyaman; 2)ruang perpustakaan yang cukup, bersih, indah dan nyaman; 3)ruang laboratorium biologi dan peralatannya; 4)ruang laboratorium fisika dan peralatannya; 5)ruang laboratorium kimia dan peralatannya; 6)ruang laboratorium komputer dan peralatannya; 7)ruang laboratorium bahasa; 8)ruang laboratoroum IPS; 9)ruang laboratorium agama; 10)ruang pimpinan dan peralatannya; 11)ruang guru dan peralatannya;

12)ruang tata usaha dan peralatannya;13)tempat ibadah; 14)ruang konseling; 15)ruang unit kerja siswa (UKS); 16)ruang organisasi kesiswaan; 17)jamban; 18)gudang; 19)ruang sirkulasi; 20)tempat bermain/olahraga, dan ruang multimedia.²¹

7. Penerapan Manajemen Berbasis TQM

Penerapan *Total Quality Management* (Manajemen Mutu Terpadu) dalam dunia pendidikan mengharuskan adanya lima hal yang harus dilakukan, yaitu:

Pertama, perbaikan secara terus menerus (*continous improvement*). Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terus menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang ditetapkan. Konsep ini juga berarti bahwa antara institusi pendidikan senantiasa memperbaharui proses berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Jika tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola institusi pendidikan dengan sendirinya akan merubah mutu, serta selalu memperbaiki komponen produksi atau komponen produksi atau komponen-komponen yang ada dalam institusi pendidikan.

Kedua, menentukan standar mutu (*quality assurance*). Konsep ini digunakan untuk menetapkan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan. Standar mutu pendidikan misalnya dapat berupa pemilikan atau akuisisi kemampuan dasar pada masing-masing bidang pembelajaran, dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu, pihak manajemen juga harus menentukan standar mutu materi kurikulum dan standar evaluasi yang akan dijadikan sebagai alat untuk mencapai standar kemampuan dasar. Standar mutu proses pembelajaran harus pula ditetapkan,

²¹ Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Menjadi Sekolah Bestandar Nasional dan Internasional*, op, cit, hal. 43-46.

dalam arti bahwa pihak manajemen perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang diharapkan dapat berdaya guna untuk mengoptimalkan proses produksi dan untuk melahirkan produk yang sesuai, yaitu yang menguasai standar mutu pendidikan berupa standar kemampuan dasar. Dengan kata lain, penilaian diarahkan pada dua aspek hasil pembelajaran, yaitu *instructional effect* dan *nurturant effect*. *Instructional effect* adalah hasil-hasil yang kasat mata dari proses pembelajaran. Sedangkan *nurturant effect* adalah hasil-hasil laten proses pembelajaran, seperti terbentuknya kebiasaan membaca, memecahkan masalah dan sebagainya. Standar mutu lulusan dan evaluasi inilah yang paling menentukan sebuah pendidikan yang bermutu.²² Selain standar mutu materi kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi juga diperlukan penetapan standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan, standar mutu sarana prasarana, standar mutu pengelolaan, dan standar mutu lingkungan pendidikan.

Ketiga, perubahan kultur (*change of culture*). Konsep ini bertujuan membentuk budaya organisasi yang menghargai mutu dan menjadikan mutu sebagai orientasi semua komponen organisasional. Jika manajemen ini ditetapkan di institusi pendidikan, maka pihak pimpinan harus berusaha membangun kesadaran para anggotanya, mulai dari pemimpin sendiri, staf, guru, pelajar dan berbagai unsur terkait, seperti pemimpin yayasan, orang tua, dan para pengguna lulusan pendidikan akan pentingnya mempertahankan dan

²² Pada umumnya, masyarakat menilai sebuah pendidikan yang bermutu dari mutu lulusannya yang didasarkan pada hasil evaluasi yang kredibel (terpercaya), valid dan recognize. Sedangkan berbagai komponen pendidikan lainnya yang mempengaruhi mutu lulusan tersebut, seperti tenaga pendidik, proses belajar mengajar, kurikulum, dan lainnya kurang mendapatkan perhatian. Hal yang demikian berbeda dengan penilaian dari pemerintah dan para pakar pendidikan yang menilai mutu pendidikan dari seluruh komponen pendidikan yang mempengaruhinya. Untuk itu dua titik pandangan penilaian tersebut harus menjadi perhatian para pengelola pendidikan. Dengan demikian, komitmen para pengelola pendidikan akan diarahkan pada terwujudnya mutu pendidikan yang unggul yang didukung oleh berbagai komponen pendidikan yang unggul pula.

meningkatkan mutu pembelajaran, baik mutu hasil maupun proses pembelajaran. Perubahan kultur ke arah kultur mutu ini antara lain dilakukan dengan menempuh cara-cara; perumusan keyakinan bersama, intervensi nilai-nilai keagamaan, yang dilanjutkan dengan perumusan visi dan misi organisasi institusi pendidikan.

Keempat, perubahan organisasi (*upside-down organization*). Jika visi dan misi serta tujuan organisasi sudah berubah atau mengalami perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem atau struktur organisasi yang melambangkan hubungan-hubungan kerja struktur organisasi yang melambangkan hubungan-hubungan kerja dan kepengawasan dalam organisasi. Perubahan ini menyangkut perubahan kewenangan, tugas-tugas dan tanggung jawab. Misalnya, dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, struktur organisasi dapat berubah terbalik dibandingkan dengan struktur konvensional. Jika dalam struktur konvensional berturut-turut dari atas ke bawah; *senior manager*; *middle manager*; *teacher* dan *support staff*.

Kelima, mempertahankan hubungan dengan pelanggan (*keeping done to the customer*). Karena organisasi pendidikan menghendaki kepuasan pelanggan, maka perlunya mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. Dan inilah yang dikembangkan dalam *unit public relation*. Berbagai informasi antara organisasi pendidikan dan pelanggan harus terus menerus dipertukarkan, agar institusi pendidikan senantiasa dapat melakukan perubahan-perubahan atau improvisasi yang diperlukan, terutama berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta kebutuhan pelanggan. Bukan hanya itu, pelanggan juga diperkenankan melakukan kunjungan, pengamatan, penilaian dan pemberian masukan kepada institusi pendidikan. Semua masukan itu selanjutnya akan diolah dalam rangka mempertahankan dan

meningkatkan mutu proses dan hasil-hasil pembelajaran. Dan yang perlu diperhatikan, bahwa dalam manajemen berbasis sekolah, guru, dan staf justru dipandang sebagai pelanggan internal, sedangkan pelajar, termasuk orangtua pelajar dan masyarakat umum, termasuk pelanggan eksternal. Pelanggan internal dan pelanggan eksternal tersebut dapat dipuaskan melalui interval kreatif pimpinan institusi pendidikan.²³

8. Penerapan Budaya Kerja yang Unggul (*Great Employee*)

Budaya organisasi memiliki makna yang luas. Menurut Luthan sebagaimana dikutip Abd Azis Wawab, bahwa budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi, karena setiap anggota organisasi akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima di lingkungannya. Selanjutnya Saparlin yang juga dikutip Abdul Azis Wahab mengatakan, bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan dan kebiasaan dalam suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan norma-norma perilaku organisasi. Budaya organisasi merupakan *cognitive framework* yang meliputi sikap, nilai-nilai, norma perilaku dan harapan-harapan yang disumbangkan oleh anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan pola keyakinan dan nilai (*values*) organisasi yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan oleh organisasi sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar aturan berperilaku dalam organisasi.²⁴

Budaya organisasi memiliki berbagai fungsi. Antara lain: 1) identitas dan citra masyarakat; 2) pengikat dalam masyarakat;

²³ Liha Edward Sallis, *Total Quality Management in Education, Manajemen Mutu Pendidikan*, (terj.) Ahmad Ali Riyadi dan Fahrurrozi, (Jakarta: IRCiSoD, 2006), cet. II, hal. 7 sd 12; Lihat pula Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 2 sd 3.

²⁴ Lihat Abdul Azis Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. I, hal. 212

3) sumber inspirasi, kebanggaan dan suatu sumber daya, komoditi ekonomi; 4) kemampuan untuk membentuk nilai tambah; 5) pola perilaku yang berisi norma-norma tingkah laku dan menggariskan batas-batas toleransi sosial; 6) pengganti formalisasi; 7) sebagai warisan; 8) mekanisme adaptasi terhadap budaya; dan 9) proses bangsa konkruen dengan negara sehingga terbentuk *nation state*.²⁵

Dalam prakteknya terdapat budaya yang lemah dan yang kuat, yang sehat dan yang sakit. Budaya perusahaan yang kuat saja tidak cukup, ia juga mesti sehat. Sebab budaya yang kuat bisa juga negatif, dan itu yang paling berbahaya.²⁶

Membentuk budaya organisasi yang sehat dan kuat itu dimulai dari mengidentifikasi nilai budaya inti (*core values*) dan *instrumental values*. *Core values* (nilai budaya inti) ini biasanya tidak banyak, dan bersifat universal yang diturunkan langsung oleh *founding father*. Dengan kata lain, nilai-nilai inti merupakan warisan dari *founding fathers* atau para pendiri organisasi. Nilai inti tersebut bersifat universal, karena nilai-nilai tersebut diperlukan oleh organisasi apapun dan di mana pun, seperti kejujuran dan integritas. Mulai dari organisasi sosial, pendidikan sampai industri, bahkan politik, baik itu di Indonesia maupun di Amerika, Jepang atau China. Semuanya memerlukan kedua nilai tersebut. Warisan itu bisa secara eksplisit disampaikan langsung atau dituliskan oleh sang pendiri, namun juga bisa bersifat tidak langsung (*implicit*). Sedangkan *instrumental values* (nilai-nilai instrumental) adalah seperangkat nilai yang dikembangkan dan disesuaikan dengan dua hal berikut: a) kuadran budaya yang diharapkan (*expected culture*), serta b) tipikal bisnis dari organisasi yang ada. Sebagai contoh lagi tentang budaya *clan*, sebagai budaya yang telah ditetapkan sebagai budaya yang diharapkan. Dalam hal ini seperangkat nilai yang sesuai dengan

²⁵ Lihat Abdul Azis Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan...* op, cit, hal. 21

²⁶ Lihat Herry Tjahjono, *Culture Based Leadership Menuju Kebesaran Diri & Organisasi Melalui Kepemimpinan Berbasis Budaya dan Budaya Kinerja Tinggi*, (Jakarta:Kompas Gramedia, 2011), cet. I.138.

budaya *clan* bisa diambil sebagai *instrumental values*. Di sana telah tercantum beberapa nilai budaya instrumental sesuai dengan kuadran atau jenis budaya masing-masing.

Selain itu terdapat pula enam rahasia budaya kinerja tinggi (*high performance culture*), yaitu: 1) *values alignment* (penyelerasan nilai-nilai); 2) *societal goal*, yaitu seperangkat nilai tertentu yang menghubungkan produk atau jasa yang dihasilkan dengan tujuan-tujuan sosial yang lebih besar; 3) *decision making*, yaitu kemampuan mengambil keputusan. Nilai-nilai organisasi (dan tujuan lebih tinggi/*higher purpose*) adalah basis dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), baik pada *level* strategis maupun operasional. Salah satu syarat menjadi pemimpin yang baik dan besar adalah kemampuan melakukan *decision making management* secara sempurna; 4) *financial performance*, yaitu bahwa antara kinerja keuangan, keselarasan nilai inti dan instrumental organisasi dengan nilai-nilai diri karyawan terdapat keterkaitan yang kuat (*strong link*); 5) *culture as a secret weapon*, yaitu bahwa budaya perusahaan dapat dijadikan ujung tombak untuk memenangkan persaingan; dan 6) *values correlation*, yang menunjukkan bahwa sebuah budaya bisa diukur dan dikuantifikasi. Korelasi nilai ini berhubungan dengan variabel spesifik yang disebut sebagai kinerja/peforma, dan inilah rahasia terbesar dari budaya perusahaan.²⁷

Untuk membentuk budaya kinerja tinggi itu dapat dilakukan dengan lima tahap, yaitu: 1) dimulai dari atas (*it starts at the top*); 2) ukurlah budaya saat ini (*measure the current culture*); 3) identifikasi dengan jelas tujuan dan nilai (*clearly identify the organization's purpose & values*); 4) komunikasikan tujuan dan nilai-nilai itu ke segenap karyawan (*communicate the intentions to all employees*); dan 5) ajarlah semua manajer untuk ikut membentuk lingkungan, atau mengampanyekan tujuan dan

²⁷ Lihat Herty Tjahjoni, *Culture Based Leadership*, op, cit, hal.. 117 sd 127.

nilai-nilai (*start teaching all managers how to create environment*).²⁸

Di antara budaya kerja unggul tersebut misalnya disiplin, jujur, ikhlas, kerja keras, teliti, kerjasama, mengutamakan mutu, ramah, santun, manusiawi, peduli, hati-hati, *empathy*, *simpathy*, kebersamaan, dan efisien.

9. Penerapan Kepemimpinan Efektif

Menurut Hemhill & Coons (1957), kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Tannenbaum, Weschler & Massarik (1961), kepemimpinan adalah pengaruh antara pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu, yang diarahkan melalui proses komunikasi ke arah satu atau beberapa tujuan tertentu. Dalam pada itu Rauch & Behling (1984) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Selanjutnya Jacobs & Jacques (1990) mengatakan, bahwa kepemimpinan adalah sebuah proses memberi makna (pengaruh yang bermakna) terhadap suatu kolektif dan mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan dalam mencapai tujuan.²⁹ Dengan demikian inti dari kepemimpinan adalah seni mempengaruhi individu atau kelompok agar melakukan sebuah kegiatan dengan penuh kesungguhan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Hubungan kepemimpinan dengan manajem ibarat tangga dan sandarannya. Manajemen ibarat tangganya, sedangkan kepemimpinan ibarat sandarannya.

Dilihat dari fungsinya, menurut Sondang P. Siagian (1988) sebagaimana dikutip Abdul Azis Wahab, kepemimpinan

²⁸ Lihat Herry Tjahjono, *Culture Based Leadership*, op. cit, hal.128-131.

²⁹ Definisi-definisi tersebut dikutip oleh Abdul Azis Wahab dalam *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan*, op, cit, hal. 83.

terdiri dari (1)sebagai penentu arah; (2)sebagai wakil dan juru bicara organisasi, (3)sebagai komunikator yang aktif, (4)sebagai mediator, dan (5)sebagai integrator.³⁰

Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang efektif, yaitu kepemimpinan yang berfungsi: (1)mengambil keputusan, (2)memberikan intruksi; (3)memberikan arahan dan konsultasi; (4)melakukan fungsi partisipasi, dan (5)melakukan fungsi delegatif.³¹

Dalam konteks pendidikan, seorang pimpinan yang baik adalah yang (1)rendah hati dan sederhana; (2)bersifat suka menolong; (3)sabar dan memiliki kestabilan emosi; (4)percaya kepada diri sendiri; (5)jujur, adil, dan dapat dipercaya, serta (6)memiliki keahlian dalam jabatan yang diembannya.³²

Selain itu saat ini muncul pula konsep kepemimpinan berdasarkan kecerdasan emosi. Yaitu kepemimpinan yang senantiasa memberikan resonansi (getaran) dan energi positif kepada kelompok (karyawan) yang dipimpinya, seperti sikap menghargai hasil kerja orang lain, menyebarkan rasa *simpathy* dan *empathy* kepada anak buahnya, bersikap baik sangka, ramah, menyebarkan senyum dan melindungi. Dengan energi positif yang ditebarkannya itu membuat orang merasa lebih optimis tentang kemampuannya untuk mencapai tujuan, meningkatkan kreativitas dan ketrampilan dalam mengambil keputusan, dan membuat orang menjadi suka membantu.³³

Hasil penelitian telah membuktikan bahwa di samping adanya relasi yang jelas antara iklim kerja dengan kondisi kerja atau gaji, pemimpin yang resonan juga mempunyai peran penting. Pada umumnya, semakin tingginya tuntutan emosi

³⁰ Lihat Abdul Azis Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan...* op. Cit., hal. 91.

³¹ Lihat Abdul Azis Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*, loc, cit, hal. 90-98.

³² Lihat Sbdul Azis Wahab, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan*, op, cit, hal. 136.

³³ Lihat Daniel Goleman, *Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet. I, hal. 15.

suatu pekerjaan, pemimpin semakin perlu bersikap empatik dan suportif. Pemimpinlah yang mempengaruhi iklim pelayanan dan dengan demikian memberi landasan bagi karyawan untuk memuaskan pelanggan.

Salah satu tanda pemimpin yang resonan adalah adanya sekelompok pengikut yang bervibrasi dengan energi semangat dan antusiasme pemimpin. Ciri pemimpin yang berbasis emosi, adalah bahwa resonansi menguatkan dan memperpanjang nada dampak emosi kepemimpinan. Semakin tinggi tingkat resonansi orang-orang, semakin sedikit suara derak statis di dalam interaksi mereka; resonansi mengurangi gangguan suara pada sistem.³⁴

10. Penerapan Multimedia Pembelajaran

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa sekolah yang unggul ditandai oleh adanya penggunaan *information technology* (IT) atau multimedia dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas, pelayanan administrasi akademik, penyampaian informasi dan komunikasi, penyediaan bahan informasi dan lain sebagainya. Berkenaan dengan ini, maka di lembaga pendidikan tersebut tersedia *website*, internet, dan berbagai multimedia yang dapat digunakan untuk mengkases berbagai informasi yang dibutuhkan.

11. Penggunaan Bahasa Asing

Faktor bahasa menjadi utama, karena ia adalah alat komunikasi sebagai *starting point* dalam melakukan kerjasama. Tanpa penguasaan mendalam terhadap bahasa asing, secara tidak langsung akan terjadi eliminasi dan marginalisasi, karena keluar dari *mainstream* yang berlaku.

³⁴ Lihat Daniel Goleman, *Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, op, cit, hal. 22.

12. Lingkungan dan Atmosfir Akademik

Lingkungan dan atmosfer akademik adalah kondisi fisik dan non fisik yang antara satu dan lainnya dirancang dalam suatu konsep yang diarahkan guna menciptakan sebuah keadaan yang memungkinkan para peserta didik dapat mengembangkan berbagai potensi, bakat, dan kemampuannya secara optimal. Lingkungan tersebut misalnya tersedianya sarana dan prasarana belajar mengajar yang kondusif, bahan perpustakaan dan sumber informasi lainnya yang dibutuhkan, sistem bimbingan yang efektif dan menyenangkan, sistem informasi dan komunikasi melalui jaringan IT yang efektif, suasana lingkungan fisik yang bersih, tertib, aman, indah dan nyaman, tersedianya sarana ibadah, sarana olahraga, sarana pengembangan bakat dan minat, tempat istirahat, pusat jajanan, *book-store* dan lain sebagainya yang tertata dalam sebuah sistem yang terpadu.

13. Penerapan Paradigma Baru Proses Belajar Mengajar

Sebuah lembaga pendidikan yang bermutu juga ditandai oleh adanya penerapan paradigma baru dalam kegiatan belajar mengajar. Yaitu: (1) mengubah cara belajar dari model warisan menjadi cara belajar pemecahan masalah; (2) dari hafalan ke dialog; (3) dari pasif ke *heuristic*; (4) dari memiliki ke menjadi; (5) dari mekanis ke kreatif; (6) dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi yang kuat; (7) dari memandang dan menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan menjadi memandang dan menerima ilmu dalam dimensi proses, dan (8) fungsi pendidikan bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal, tetapi mengolah dan mengembangkan (hati) dan keterampilan. Oleh karena itu, keteladanan, asrama, dan kelompok-kelompok kecil merupakan cara-cara yang amat baik dalam menumbuh-kembangkan budi pekerti luhur, kesetiakawanan sosial, disiplin, dan etos kerja.³⁵

³⁵ Lihat Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I, hal. 49.

Ketiga belas indikator sekolah yang bermutu sebagaimana tersebut di atas itulah yang akan digunakan sebagai referensi atau tolok ukur dalam memotret mutu Madrasah Aliyah yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Ketiga belas indikator itulah yang selanjutnya dituangkan dalam daftar wawancara mendalam (*deep interview*) dengan para nara sumber, daftar pertanyaan (angket), serta dalam melakukan observasi.

C. Sejarah Strategi Peningkatan Mutu Madrasah di Indonesia

Sejarah strategi peningkatan mutu madrasah di Indonesia dapat diartikan sebagai upaya merekonstruksi informasi tentang langkah-langkah dan kebijakan strategis yang pernah diterapkan di Indonesia dalam rangka peningkatan mutu madrasah.

Berkenaan dengan hal ini, maka pada sub bab ini dijelaskan pengertian madrasah pada umumnya dan madrasah di Indonesia, serta langkah-langkah peningkatan mutu madrasah yang pernah dilakukan di Indonesia. Uraian tentang sejarah strategi peningkatan mutu madrasah ini diperlukan dalam sebagai bahan untuk melakukan analisa perbandingan dengan kebijakan peningkatan mutu madrasah Aliyah yang berlangsung di Kota Tangerang Selatan.

1. Pengertian Madrasah dan Sejarah Lahirnya.

Kata madrasah berasal dari bahasa Arab, *darasa*, *yadridu*, *darsatan wa madrasatan* yang secara harfiah berarti tempat belajar. Menurut hasil penelitian Mahmud Qombar, bahwa kata madrasah sebelum adanya madrasah Nidzamiah belum menjadi istilah yang masyhur. Namun sesungguhnya kata madrasah diambil dari bahasa Ibraniyah atau Aramiah yang asalnya *midras* atau *madras* jamaknya *madaris* yang kemudian diringkaskan bacaannya menjadi *madaris*.³⁶

³⁶ Lihat Mahmud Qombar, *Dirasat Turatsiyah fi al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Tsaqafah al-Dauhah, 1405 H./1985), hal. 22

Madrasah dalam perkembangan selanjutnya menjadi salah satu nama lembaga pendidikan Islam. Madrasah merupakan perkembangan dari masjid. Akibat besarnya semangat belajar umat Islam, membuat masjid-masjid penuh dengan *halaqah-halaqah*. Dari tiap-tiap *halaqah* terdengar suara guru-guru yang menjelaskan pelajaran atau suara perdebatan dalam proses belajar mengajar, sehingga menimbulkan kebisingan yang mengganggu ibadah.³⁷ Semakin banyak umat Islam yang tertarik untuk menuntut ilmu, menyebabkan masjid penuh dan tidak muat untuk menampung murid-murid yang belajar dan mendorong lahirnya bentuk lembaga pendidikan baru. Perkembangan bentuk lembaga ini melalui tiga tahap, yaitu dari masjid, ke masjid khan, kemudian menjadi madrasah.³⁸

Mengenai kajian tentang munculnya madrasah di dunia Islam, banyak ahli sejarah yang berbeda pendapat. Syalabi misalnya menyatakan, bahwa madrasah yang mula-mula muncul di dunia Islam adalah madrasah Nidzamia yang didirikan oleh Nidzam al-Muluk, Perdana Menteri Dinasti Saljuk, pada tahun 1065-1067. Pendapat Syalabi ini didukung oleh Philip K. Hitti. Sedangkan menurut Athiyah al-Abrasyi, dengan mengutip pendapat al-Maqrizi, bahwa Madrasah al-Baihaqiyah adalah madrasah yang pertama didirikan pada akhir abad ke-4 H. (abad ke 11 M.) Sejalan dengan Athiyah, Richard W. Bulliet berpendapat, bahwa dua abad sebelum Madrasah Nidzamia muncul, di Nisyapur sudah berdiri madrasah, yaitu Miyan Dahiyah.³⁹

Terdapat perbedaan antara tujuan pada madrasah Nidzamia dengan Madrasah di Nisyapur. Madrasah Nidzamia didirikan dengan tujuan untuk menyebarkan paham ideologi Sunni, sebagai lawan dari ideologi Syi'ah. Berkenaan dengan itu,

³⁷ Lihat Ahmad Syalabi, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 106.

³⁸ Lihat Harun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I, hal. 99.

³⁹ Lihat Richard W. Bulliet, *The Patrician of Nisyapur: a Study in Medieval Islamic Social History*, (USA: Harvard University Press, 1972), hal. 48.

maka berbagai komponen yang terkait dengan Madrasah Nidzamiyah tersebut seperti mata pelajaran, tenaga pendidik, bahan bacaan, lingkungan dan lain sebagainya adalah berkaitan dengan ideologi Sunni. Sedangkan tujuan berdirinya madrasah sebelumnya banyak berkaitan dengan pengajaran agama pada umumnya dan pengajaran fiqih pada khususnya, bahkan istilah madrasah itu sendiri, pada mulanya merupakan nama bagi suatu madzhab dalam fiqih.

Teori lahirnya madrasah tersebut berbeda dengan teori lahirnya madrasah di Indonesia. Madrasah di Indonesia pada mulanya merupakan bentuk modernisasi atau pembaruan dari lembaga pendidikan pesantren yang bercorak tradisional. Madrasah di Indonesia sebagaimana yang terdapat pada *Adabiyah School* yang didirikan oleh Abdullah Ahmad adalah lembaga pendidikan formal atau sistem klasikal yang diadopsi dari model pendidikan Belanda. Pada *Adabiyah School* itu di samping diajarkan ilmu agama Islam, juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti matematika, biologi, fisika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, bahasa Belanda dan bahasa Arab. Dengan kata lain, bahwa madrasah yang lahir di Indonesia pada mulanya merupakan lembaga pendidikan Islam unggulan dalam rangka menyaingi pendidikan unggulan yang dibangun oleh Belanda. Namun dalam perkembangan selanjutnya terdapat sejumlah orang yang mendirikan madrasah hanya dengan modal semangat *lillahi ta'ala*, serta merupakan sistem klasikal, namun yang diajarkan hanya pengetahuan agama. Madrasah dalam perkembangan selanjutnya menjadi semacam sekolah keagamaan, atau sekolah yang hanya mengajarkan ilmu agama Islam atau yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah inilah yang telah melakukan peran mencetak ulama yang mumpuni, memelihara tradisi Islam serta melakukan peran Islamisasi.

Selanjutnya sejak keluarnya SKB 3 Menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) pada tahun 1975, madrasah tidak lagi hanya

mengajarkan ilmu agama Islam, melainkan sudah mengajarkan ilmu agama sebanyak 30% dan ilmu umum sebanyak 70%.

Selanjutnya karena kebijakan SKB 3 Menteri ini dianggap tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang mumpuni ilmu agamanya, maka didirikanlah Madrasah Aliyah Program Khusus, yaitu Madrasah yang mencetak ahli ilmu agama Islam, pada zaman Munawir Sjadzali sebagai Menteri Agama, dan kemudian menjadi Madrasah Keagamaan pada zaman Tarmidzi Taher sebagai Menteri Agama, dan kemudian pada tahun 1994, menjadi Sekolah Umum yang berciri khas agama Islam.

2. Kebijakan Peningkatan Mutu Madrasah.

Kebijakan peningkatan mutu madrasah dalam rangka memenuhi ciri-ciri sebagaimana tersebut di atas, sesungguhnya telah dilakukan sejak lama, antara lain melalui Undang-undang No. 4 Tahun 50, Jo. No. 12 Tahun 1954, Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional, Tahapan Pertama tahun 1961-1969; Ketetapan MPRS No. XXVII/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; Kebijakan Menteri Agama Tahun 1967 untuk menegerikan madrasah dalam semua tingkatan mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai dengan Aliyah; Keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1971 tentang Kurikulum Madrasah yang kemudian disempurnakan pada tahun 1973; Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 3 Menteri) tahun 1975; Keputusan Menteri Agama tentang Kurikulum Tahun 1976 yang diberlakukan pada tahun 1978, kemudian disempurnakan pada tahun 1984 dan 1987; Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam yang berpusat di Mesir, India, Turki dan lainnya; Pembukaan Madrasah Aliyah Program Keagamaan berdasarkan SK Menteri Agama No. 73 Tahun 1987 yang kemudian dirubah menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) berdasarkan SK Menteri Agama No. 374 Tahun 1993; Kebijakan tentang

Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Model tahun 1993; Perubahan Madrasah menjadi Sekolah Umum yang berciri khas keislaman pada tahun 1994; dan lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTS), Otonomisasi Pendidikan, Pelaksanaan Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat (MBS) serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Kegamaan. Di dalam seluruh kebijakan tersebut terdapat misi dan tujuan meningkatkan mutu madrasah. Untuk lebih jelasnya berbagai kebijakan tersebut dapat dikemukakan secara singkat sebagai berikut.

a) Undang-undang No. 4 Tahun 50, Jo. No. 12 Tahun 1954.

Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Jo. No.12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah telah disinggung tentang pendidikan agama.⁴⁰ Dalam UU No. 4 Tahun 1950 beberapa ketentuan mengenai pendidikan agama diatur misalnya pada pasal 20 bahwa (a)apakah suatu jenis sekolah memberi pelajaran agama adalah tergantung pada umur dan kecerdasaran

⁴⁰ Undang-undang ini pada dasarnya merupakan usaha memenuhi rekomendasi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) 17 Desember 1945, yang menuntut adanya pembaharuan pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Salah satu rekomendasi itu menyangkut pendidikan agama sebagai berikut: Pengajaran agama hendaklah mendapat perhatian yang semestinya dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipeluknya. Tentang cara melakukan ini baiklah Kementerian mengadakan perundingan dengan Badan Pekerja. Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaklah pula mendapatkan perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntunan dan bantun material dari pemerintah. Sebelum lahirnya Undang-undang ini pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan mengenai pendidikan agama, misalnya yang pertama sekali adalah Peraturan Bersama Menteri PP&K dan Menteri Agama No. 1142/Bhg. A (pengajaran) tanggal 2-12-1946 dan No.1285/Kj. (Agama) tanggal 2-12-1946. Dalam peraturan ini antara lain disebutkan bahwa pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah rendah sejak kelas IV.

murid-muridnya; (b) murid-murid yang sudah dewasa boleh menetapkan ikut atau tidaknya dalam pelajaran agama; (c) sifat pengajaran agama dan jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam Undang-undang tentang jenis sekolahnya; (d) pelajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas. Meskipun Undang-undang ini tidak mengatur tentang pendidikan madrasah, tetapi cukup mengisyaratkan sejauhmana pemerintah memperhatikan pendidikan agama. Dalam kenyataannya, semakin baik kebijakan tentang pendidikan agama di sekolah-sekolah agaknya semakin positif dalam mempertahankan pendidikan madrasah sebagaimana dapat diamati pada perkembangan-perkembangan berikutnya di masa Orde Baru.⁴¹

Meskipun dalam Undang-undang tersebut pendidikan agama atau madrasah masih berada di luar sistem pendidikan nasional, namun keadaannya sudah lebih baik daripada pendidikan agama di zaman Pemerintahan Kolonial Belanda atau Jepang. Dan dengan demikian juga bisa diduga bahwa mutu pendidikan agama akan lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam Undang-undang tersebut pendidikan agama sudah diakui keberadaannya. Pada pasal 10 ayat (2) Undang-undang tersebut dinyatakan, bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.

- b) Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional, Tahapan Pertama tahun 1961-1969.

Dalam kaitannya dengan pendidikan Nasional, ketetapan MPRS No. II/MPRS tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional, antara lain menyebutkan bahwa

⁴¹ Lihat Mulyanto Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*, (Jakarta:LPIK, Balitbang Agama, Depag, 1977.

pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid tidak ikut serta, apabila wali murid-murid dewasa menyatakan keberatannya.⁴²

Ketetapan tersebut memang belum mengubah status pendidikan agama sebagai mata pelajaran minor/pilihan, tetapi telah memperluas jangkauannya sampai tingkat universitas. Dalam kaitannya dengan madrasah, ketetapan ini telah memberi perhatian-meskipun tidak terlalu berarti-dengan merokemendasikan agar madrasah hendaknya berdiri sendiri sebagai badan otonom di bawah pengawasan Departemen Agama, bukan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan rekomendasi ini, madrasah tetap berada di luar sistem pendidikan nasional. Tetapi usulannya yang konkrit dalam ketetapan ini merupakan langkah pengakuan terhadap eksistensi madrasah dalam kerangka pendidikan nasional.

c) Pembukaan Madrasah Wajib Belajar.

Pada tahun 1958 Kementerian Agama mengusahakan pengembangan madrasah dengan mengusahakan pengembangan madrasah dengan memperkenalkan model Madrasah Wajib Belajar (MWB).⁴³ Madrasah yang masa belajarnya delapan tahun ini memuat

⁴² Lihat Maskun, Kebijakan Orde Baru terhadap Madrasah, dalam *Madrasah, Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol 2, No. 3, Jakarta:PPIM, 1998; hal. 23.

⁴³ Model Madrasah Wajib Belajar dapat dipandang sebagai salah satu tonggak perkembangan dan pembaharuan madrasah di Indonesia yang merupakan kontribusi pemerintah Orde Lama. Model ini pada dasarnya menyusul kebijakan-kebijakan sebelumnya yang sudah demi sedikit mengusahakan pemberian mata pelajaran umum secara formal dalam lembaga pendidikan tersebut. Puncak perkembangan madrasah sebelum masa Orde Baru adalah Model Madrasah Wajib Belajar (MWB). Diidealisasikan bahwa kurikulum MWB mengembangkan tiga perkembangan, yaitu perkembangan otak atau akal, perkembangan hati atau perasaan, dan perkembangan tangan atau kecekatan/keterampilan. Lihat Mulyanto Sumardi, op. cit, hal.46-54.

kurikulum pengajaran yang terpadu antara aspek keagamaan, pengetahuan umum dan keterampilan. Di dalam Madrasah Wajib Belajar ini pelajaran agama mendapatkan perhatian yang lebih besar, sehingga mutu lulusannya sudah dapat membaca kitab-kitab berbahasa Arab sesuai dengan tingkatannya, seperti *Fathul Qarib* dalam bidang Fiqih, *Tankih al-Qaul* dalam bidang hadis; *Jurumiah* dalam bidang nahu, *al-Kailani* dalam bidang *Sharaf*, dan *Nurul Yaqin* dalam bidang sejarah Islam.

- d) Ketetapan MPRS No. XXVII/1966 tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.

Perhatian yang lebih serius terhadap pendidikan agama dapat diamati setelah kemunculan pemerintahan Orde Baru. Pada masa-masa awal pemerintahan ini UU Pendidikan Nasional yang lebih sempurna memang belum dapat dirumuskan. Tetapi kebijakan yang dikembangkannya cenderung lebih mendasar dan menyeluruh. Ketetapan MPRS No. XXVII.1966 tentang "Agama, Pendidikan dan Kebudayaan", jelas memperlihatkan kecenderungan itu dengan menunjukkan secara kuat peran agama. Dalam konsiderannya tentang penetapan itu antara lain dinyatakan, bahwa agama, pendidikan dan kebudayaan adalah merupakan unsur mutlak dalam rangka *nation and character building*.

Kaitannya dengan pendidikan agama, ketetapan itu memberi status yang lebih berarti. Pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh semua siswa dan mahasiswa serta menjadi syarat kelulusan ujian akhir. Berbeda dengan undang-undang dan ketetapan sebelumnya, dalam ketetapan yang dimaksud, siswa dan mahasiswa tidak diberi hak untuk mengajukan keberatannya dalam mengikuti pelajaran agama. Keputusan ini jelas dimaksudkan untuk menempatkan agama sebagai pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Pemerintah Orde Baru terus merespon aspirasi ummat Islam yang berusaha menjadikan madrasah sebagai salah satu pilar sistem pendidikan nasional. Meskipun belum tersedia peraturan yang pasti, madrasah dikembangkan dalam berbagai bentuk yang tidak terbatas pada Madrasah Diniyah. Dalam hal ini, pemerintah bersikap realistik dengan memanfaatkan lembaga pendidikan yang sudah ada seperti madrasah, melalui usaha modifikasi, khususnya dalam hal kurikulumnya. Madrasah-pada semua tingkatannya-yang pada awalnya didominasi oleh pelajaran-pelajaran agama, setahap demi setahap diarahkan untuk mengajarkan mata-mata pelajaran umum. Dengan demikian lulusan madrasah secara kualitatif dapat dianggap sama dengan lulusan sekolah lainnya.

Sebagai bukti bagi pengakuan terhadap madrasah yang dikelola Kementerian Agama, dapat dilihat dari kenyataan bahwa waktu itu madrasah yang mengikuti ketentuan-ketentuan Kementerian Agama diberikan subsidi, sejumlah madrasah swasta juga ditingkatkan statusnya menjadi madrasah negeri-meskipun masih terbatas pada tingkat Ibtidaiyah.

- e) Kebijakan Menteri Agama Tahun 1967 untuk Menegerikan Madrasah.

Dalam rangka melaksanakan TAP MPRS No. XXVI/1966, pada tahun 1967 Menteri Agama mengeluarkan kebijakan untuk menegerikan sejumlah madrasah dalam semua tingkatan, mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah. Melalui usaha ini, sebanyak 123 Madrasah Ibtidaiyah telah dinegerikan. Total Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) menjadi 358. Dalam waktu yang bersamaan, juga telah berdiri sekitar 182 Madrasah Tsanawiyah Negeri dan 42 Madrasah Aliyah Negeri.⁴⁴ Dengan memberikan status

⁴⁴ Dengan penegerian ini berarti murid-murid madrasah negeri dengan sendirinya bertambah hingga 157.794 untuk murid Ibtidaiyah; 32.208 murid

negeri ini, tanggung jawab pengelolaan memang menjadi beban pemerintah, tetapi pengaturan dan kontrol atas madrasah itu menjadi lebih efektif. Dengan penegerian ini, maka setiap madrasah selain mendapatkan anggaran dari negara, juga pembinaan manajemen, menyediakan tenaga guru yang lebih terlatih, dan pengawasan yang lebih intensif. Keadaan ini memiliki pengaruh positif bagi peningkatan mutu pendidikan madrasah.

f) Gerakan Pembaharuan Islam.

Munculnya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad ke 20 sebagai akibat dari adanya pengaruh gerakan pembaharuan Islam di berbagai negara seperti Mesir⁴⁵, India/Pakistan dan Turki Usmani, telah memberi pengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan madrasah. Dengan menggunakan rentang waktu antara 1900 sampai dengan 1945, Karel A. Stembrink mengidentifikasi empat faktor yang mendorong gerakan pembaharuan Islam di Indonesia awal abad 20, antara lain: (1)faktor keinginan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis; (2)faktor semangat nasionalisme dalam melawan penjajah; (3)faktor memperkuat basis gerakan sosial, ekonomi,

Tsanawiyah, dan 7.249 murid Aliyah. Untuk pertama kalinya penegerian madrasah tingkat Aliyah digunakan nama Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Dua madrasah swasta yang pertama sekali dinegerikan berdasarkan SK Menteri Agama No. 80 Tahun 1967 adalah Madrasah Aliyah Al-Islam di Surakarta dan Madrasah Aliyah di Magetan. Lihat Maskun, Kebijakan Orde Baru terhadap Madrasah, op. cit, hal. 25.

⁴⁵ Dari sudut pandang ide secara umum, gerakan pembaharuan di Indonesia agaknya dipengaruhi secara kuat oleh pemikiran dan usaha tokoh-tokoh pembaharu Timur Tengah pada akhir abad ke-19, khususnya Jamal al-Din al-Afghani dan Muhammad Abduh. Kedua tokoh ini dipandang sangat penting dalam menyalakan api pembaharuan pada akhir abad ke-19 hampir di seluruh dunia Islam. Lihat Mohamed Abuulakhir Zaki, *Modern Muslim Thought in Egypt and Its Impact on Islam di Malaya*, (London:University of London, 1963). Lihat pula Maksum, *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I, hal. 84.

budaya, dan politik; serta (4) faktor pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia.⁴⁶

Seiring dengan agenda pembaharuan Islam tersebut, maka terdapat kesadaran di kalangan elit tertentu, khususnya di Minangkabau, Sumatera Barat, untuk menghilangkan praktek-praktek keagamaan dalam masyarakat yang sudah bercampur aduk dengan adat dan kebiasaan lokal, kembali kepada semangat al-Qu'an dan al-Sunnah yang tidak mengenal dikhotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, dengan cara memperbaharui kurikulum madrasah dengan memasukan mata pelajaran umum.

g) Respon terhadap Politik Pemerintah Hindia Belanda.

Politik Pemerintah Hindia Belanda antara lain ditandai oleh adanya sikap diskriminatif terhadap rakyat jajahannya, termasuk diskriminatif dalam bidang pendidikan. Bangsa Indonesia, termasuk umat Islam yang menjadi jajahan Pemerintah Hindia Belanda tidak memiliki akses atau peluang untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Rakyat Indonesia pada umumnya, dan umat Islam pada khususnya hanya mendapatkan pendidikan tingkat dasar dengan mutu yang rendah. Untuk itu, maka Abdullah Ahmad di Sumatera Barat mendirikan *Adabiyah School* dengan mutu yang tidak kalah dengan mutu pendidikan Belanda. Di sekolah ini tidak hanya diajarkan ilmu agama Islam, melainkan juga ilmu-ilmu umum seperti berhitung, sejarah, biologi, fisika, ilmu-ilmu sosial, bahasa Inggris, bahasa Belanda, Bahasa Arab dan berbagai praktikum di laboratorium. Demikian pula di Jawa, K.H. Ahmad Dahlan melalui lembaganya Muhammadiyah juga mendirikan sekolah yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama Islam, juga pengetahuan umum, dengan menggunakan sistem sekolah, lengkap dengan

⁴⁶ Lihat Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta:LP3ES, 1994), cet. II, hal. 26-29.

administrasinya sebagaimana yang dikembangkan oleh Pemerintah Belanda.⁴⁷

- h) Keputusan Menteri Agama No. 52 Tahun 1971 tentang Kurikulum Madrasah yang kemudian disempurnakan pada Tahun 1973.

Kurikulum madrasah secara nasional diberlakukan secara nasional berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.52 Tahun 1971. Dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan, kurikulum itu kemudian dikenal dengan nama kurikulum 1973. Dari struktur materi yang ditawarkan kurikulum itu sudah mencerminkan perkembangan yang serius dalam rangka mengarahkan madrasah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Komponen-komponen kurikulum itu meliputi tidak saja mata-mata pelajaran agama, tetapi juga mata-mata pelajaran umum dan mata-mata pelajaran kejuruan. Khusus pada tingkat Aliyah, struktur kurikulumnya sama dengan MTsN, yang terdiri dari empat kelompok: Dasar, Pokok, Pilihan, dan Ekstra Kurikulum. Dalam Kelompok Dasar diajarkan delapan mata pelajaran; dalam kelompok Pokok diajarkan 15 mata pelajaran dan dalam Kelompok Khusus hanya tercantum dua mata pelajaran; sedangkan dalam Kelompok Ekstra Kurikuler tercatat mata pelajaran Kepramukaan dan Koperasi. Berkaitan dengan kurikulum 1973 ini terkandung makna sebagai berikut: *Pertama*, adanya standar pendidikan bagi madrasah pada setiap jenjang yang dapat berlaku juga bagi madrasah-madrasah swasta; *Kedua*, adanya acuan yang lebih detail dalam hal mata pelajaran yang dapat dijadikan dasar kerja dan pengembangan bagi pendidikan madrasah; *Ketiga*, dan ini amat penting, mata pelajaran umum dan kejuruan di madrasah dengan demikian telah mendapat landasan formal; apalagi dalam

⁴⁷ Luhut Maksum, *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I, hal. 92-96.

jumlah yang cukup tinggi melebihi jumlah yang telah dilakukan para pembaharu pada masa-masa sebelumnya.

Dengan adanya usaha-usaha tersebut, maka *civil effect* bagi lulusannya pun menjadi teratur. Madrasah dengan demikian tidak bisa diragukan lagi sebagai lembaga pendidikan yang pengelolaan, struktur dan kurikulumnya mendekati sekolah-sekolah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).

Di samping itu, pada perkembangan berikutnya, upaya peningkatan kualitas madrasah terus dilakukan Departemen Agama, antara lain melalui penataan administrasi dan manajemen, peningkatan kualitas guru dan mutu proses belajar mengajar, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan madrasah.⁴⁸

i) SKB 3 Menteri Tahun 1975.

Pada tahun 1975 dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai "Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Dalam Surat Keputusan Bersama itu, masing-masing Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Dalam Negeri memikul tanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah. SKB 3 Menteri itu antara lain memuat ketentuan yang menyamakan tingkatan MI sama dengan SD, Tsanawiyah sama dengan SMP, dan Aliyah sama dengan SMA; Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat; mata pelajaran umum pada madrasah sebanyak 70% dan mata pelajaran agama sebanyak 30%; pengelolaan madrasah dilakukan oleh Menteri Agama; pembinaan mata

⁴⁸ Lihat Kurikulum MIN 7 Tahun, MTs AIN, 3 Th, dan MAAIN, (Jakarta: Direktorat Bimas Islam Departemen Agama RI, 1974), hal. 196-200.

pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama; dan pembinaan dan pengawasan mata pelajaran umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Lahirnya SKB 3 Menteri tersebut dapat diartikan sebagai pengakuan yang lebih jelas dan kuat terhadap keberadaan madrasah, dan sekaligus merupakan langkah strategis menuju tahapan integrasi madrasah ke dalam Sistem Pendidikan Nasional. Dengan SKB ini, madrasah tidak lagi dapat disebut sebagai madrasah yang sepenuhnya bersifat keagamaan, melainkan menjadi madrasah yang mendekati sekolah umum, namun muatan agamanya lebih kuat. Dilihat dari segi kepentingan mencetak calon ahli agama, SKB ini tidak dapat diharapkan. Namun dari segi kepentingan lulusan madrasah dapat memasuki sekolah umum, dapat dilihat sebagai sebuah peningkatan dan perluasan akses. Upaya ini mendapat tanggapan yang menggembirakan. Diperolehnya Inpres untuk seribu madrasah pada tahun 1978 dan beberapa tahun kemudian datang permintaan dari Rektor IPB, Prof. Dr. Andi Hakim Nasution untuk mengirim beberapa lulusan terbaik Madrasah Aliyah sebagai mahasiswa PMDK di IPB,⁴⁹ menunjukkan adanya peningkatan mutu tamatan madrasah yang sudah diakui oleh kalangan akademisi.

⁴⁹ Permintaan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution ini disampaikan kepada Prof. Dr. Zakiah Daradjat dalam sebuah memo, yang kemudian disampaikan kepada A.A. Syis yang telah menghantikannya sebagai Direktur Pendidikan Agama. Adapun jumlah yang diminta lima orang siswa, akan tetapi dia mengatakannya sepuluh siswa dengan alasan tersendiri. Terakhir didapat laporan dari salah seorang dosen agama di IPB, bahwa mahasiswa alumni Madrasah Aliyah tersebut telah ikut menyemarakkan kehidupan keagamaan di kampus melalui kegiatan yang mungkin tidak terlalu direncanakan, yaitu barter ilmu yang mereka lakukan dengan teman-temannya yang berasal dari sekolah umum. Hal ini membuktikan, bahwa mutu madrasah tidak kalah dengan mutu sekolah umum.

- j) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 merupakan tonggak penting dalam rangka menghapus "dualisme" sistem pendidikan di Indonesia yang berada di bawah naungan Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan Nasional. Selain itu UU tersebut juga merupakan babak awal pengintegrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Dengan pengintegrasian ini secara yuridis madrasah mendapatkan anggaran dari APBN secara lebih adil, sehingga memungkinkan madrasah dapat meningkatkan dan mengembangkan berbagai komponen yang dibutuhkan, seperti penyediaan infra struktur, sarana prasarana, pengembangan kurikulum, pembinaan manajemen, peningkatan mutu guru, dan lain sebagainya. Semuanya ini pada gilirannya dapat berpengaruh bagi peningkatan mutu pendidikan madrasah.

- k) Pembukaan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK).

Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1987. Madrasah ini menurut penggagasnya, yakni Prof, Dr. H. Munawir Sjadzali, MA, didirikan dalam rangka mendapatkan calon-calon yang berkualitas atau bibit-bibit unggul bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN). MAPK memberikan pelajaran 70% agama, dan 30% umum. Eksperimen Munawir Sjadzali itu nampak cukup berhasil. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa ketika ia berkunjung ke Mesir, ia diberi tahu ada sekitar 47 atau 48 orang lulusan MAN PK yang diterima di Al-Azhar, tanpa *mu'adalah* (tes masuk). Hal ini menunjukkan bahwa

mutu madrasah Aliyah telah mengalami peningkatan yang luar biasa.⁵⁰

l) Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK).

Madrasah Aliyah Keagamaan didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 374 Tahun 1993 dengan menggunakan kurikulum tahun 1994. Menurut Tamidzi Taher, sebagai penggagas MAK tersebut, bahwa keberadaan MAK sebenarnya dimaksudkan untuk "mencetak" orang-orang seperti Quraish Shihab. Tujuan pencetakan ulama ini, mengingatkan kita pada fungsi madrasah di masa awal kelahirannya, yang menurut Azyumardi Azra ada tiga hal. *Pertama*, sebagai media penyampaian pengetahuan agama (*transfer of Islamic Knowledge*); *Kedua*, sebagai media pemelihara tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*); *Ketiga*, sebagai media "pencetak" ulama (*reproduction of ulama*). Fungsi-fungsi ini dapat dikatakan sebagai fungsi tradisional madrasah.⁵¹

Keberadaan MAK tidak bisa dipisahkan, bahkan merupakan kelanjutan dari berbagai perubahan dan penyesuaian-dari MAPK (Madrasah Aliyah Program Keagamaan). Program Keagamaan yang dicanangkan pada masa kepemimpinan Prof. Munawir Sjadzali ini dinilai sukses. Karena dirancang sebagai program khusus, MAPK tidak bisa berlangsung terus. Apalagi dengan ditetapkannya UUSPN 1989, maka walaupun dilanjutkan ia harus mengalami sejumlah penyesuaian. Dalam konteks inilah kemudian diambil kebijakan untuk mengubah MAPK menjadi MAK. Salah satu kelebihan MAK adalah menggunakan model *boarding school* (sekolah berasrama) dalam sistem belajar mengajarnya. Di Indonesia model

⁵⁰ Lihat Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA. MAPK: Eksperimen itu Ternyata Berhasil., dalam Madrasah, Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan, Vol. I, No. 4. (Jakarta: PPIM, 1998), hal.7-8.

⁵¹ Lihat Madrasah Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan, Vol. I, No. 4 (Jakarta:PPIM, Tahun 1998, hal. 4.

tersebut jelas tidak asing lagi bagi kalangan praktisi pendidikan Islam, karena selama berabad-abad bangsa Indonesia telah mengenalnya dalam bentuk pondok pesantren. Kelebihan model "sekolah berasrama" tidak hanya terletak pada pengawasan total terhadap siswa dalam belajar dan luasnya waktu luang yang dimiliki siswa juga mengalami latihan kemandirian dan terlatih untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Di samping itu yang tak kalah pentingnya, para siswa terbiasa disiplin dalam menggunakan waktu. Dengan kelebihan-kelebihan itu, maka harapan untuk sukses akan lebih besar dibandingkan dengan model-model lain. Dengan demikian, kualitas lulusan MAK dapat diandalkan pengetahuannya agamanya.⁵² Hal ini terlihat dengan jelas, bahwa kebijakan mendirikan MAK memiliki misi meningkatkan mutu lulusan madrasah, terutama dalam penguasaan dalam bidang ilmu agama Islam.

m) Kebijakan tentang Madrasah Tsanawiyah (M.Ts.) Model tahun 1993

Madrasah Model mengemban misi khusus. Ia tidak hanya bertanggung jawab meningkatkan prestasi dan kualitas dirinya, tetapi juga kualitas dan prestasi madrasah di sekelilingnya. Misi kedua itu dirancang melalui KKM (Kelompok Kerja Madrasah) yang dipimpin oleh kepala madrasah model dan beranggotakan kepala-kepala madrasah di sekelilingnya. Madrasah Model ini mulai diselenggarakan pada tahun 1993 dan baru diselenggarakan untuk Madrasah Tsanawiyah. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk masa mendatang juga akan diselenggarakan di tingkat Aliyah. Berkaitan dengan Madrasah Model ini, Departemen Agama memperoleh

⁵² Lihat Madrasah. Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan, Vol. I, No. 4, (Jakarta;PPIM, 1998), hal. 6.

pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) untuk meningkatkan kualitas madrasah. Dengan dana talangan itu di bawah proyek JSEP (*Junior Secondary Education Project*). Depag mengembangkan 54 M.Ts Model yang tersebar di 26 propinsi di Indonesia.⁵³

- n) Perubahan Madrasah menjadi Sekolah Umum yang berciri khas keislaman pada Tahun 1994.

Pada tahun 1994 Departemen Agama telah menetapkan berlakunya kurikulum baru yang kemudian dikenal dengan kurikulum 1994 yang mensyaratkan pelaksanaan sepenuhnya kurikulum sekolah umum di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud). Berbeda dengan kurikulum sebelumnya pada tahun 1975, di mana madrasah memberikan 70% mata pelajaran umum, dan 30% mata pelajaran agama Islam, pada kurikulum tahun 1994 madrasah diwajibkan menyelenggarakan sepenuhnya (100%) mata pelajaran umum sebagaimana di sekolah-sekolah umum di bawah Depdiknas.⁵⁴ Dengan demikian, madrasah menjadi sekolah umum yang berciri khas agama Islam, yakni sungguhpun para siswa memperoleh pelajaran umum, namun mereka harus memiliki jiwa keagamaan yang kuat (*religiusitas*), sehingga ilmunya itu tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam. Namun demikian, di Madrasah Aliyah terdapat juga program studi keagamaan yang bertujuan untuk mencetak calon ahli agama Islam. Program keagamaan ini sebagai pengganti dari program MAK yang telah ada sebelumnya. Dengan berlakunya kurikulum 1994, maka MAK menjadi program keagamaan yang terdapat di dalam Madrasah

⁵³ MTs Model Lokomotif Peningkatan Kualitas Madrasah dalam Madrasah, *Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vol. 2, No. 3, (Jakarta:PPIM, 1998), hal.5.

⁵⁴ Lihat Jajat Burhanuddin, *Madrasah dan Islam di Indonesia: Kajian Awal*, dalam *Madrasah, Juunal Komunikasi Dunia Perguruan*, Vo. I, No. 4, (Jakarta:PPIM, 19998), hal. 24.

Aliyah. Namun demikian, madrasah program keagamaan ini agak kurang diminati dibandingkan dengan program lainnya, sebagai akibat dari perubahan pola pikir masyarakat terhadap program agama Islam sebagai program yang kurang terkait langsung dengan dunia kerja yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi.

- o) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, keberadaan madrasah semakin diakui secara lebih nyata dan lebih kuat. Selain itu, lahirnya Undang-undang tersebut juga dilatar belakangi oleh keinginan yang kuat untuk meningkatkan mutu pendidikan, termasuk madrasah, agar tidak tertinggal dengan mutu pendidikan negara-negara lain. Hal tersebut dilakukan, karena memasuki abad ke-21 atau millinium ke-3 ini, pendidikan sudah termasuk komoditas bidang jasa yang diperdagangkan. Dan agar komoditas tersebut dapat bersaing dengan komoditas jasa pendidikan dari negara lain, maka komoditas jasa tersebut harus ditingkatkan mutunya. Untuk kepentingan ini, maka sebagai turunannya lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) dengan berbagai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional sebagai yang menjabarkannya. Berbagai ketentuan tentang standar nasional pendidikan ini mencakup pula pendidikan keagamaan. Pada bab VI, tentang Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan Pasal 30, ayat (3 dan 4) dinyatakan, bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan

berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.⁵⁵

p) Program Otonomi Daerah.

Otonomi Daerah secara singkat dapat diartikan sebagai pemberian kewenangan secara lebih luas kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang terdapat di daerahnya. Kebijakan ini merupakan perubahan atas pendekatan yang sentralistik yang dilakukan pemerintah di masa lalu, dengan beberapa pertimbangan: a) bahwa pendekatan sentralistik mengakibatkan biaya mahal sebagai akibat proses birokrasi yang terlalu panjang; b) bahwa apa yang ditentukan dari pusat terkadang tidak sejalan dengan kebutuhan yang diharapkan; c) bahwa pemerintah di daerah adalah yang lebih mengetahui terhadap masalah yang dihadapinya, sehingga kebijakan yang mereka tetapkan akan menyentuh langsung pada masalah yang dihadapi. Kebijakan Otonomi Daerah ini diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya Bab IV pasal 7, tentang kewenangan pemerintah Pusat dan Daerah yang menyatakan bahwa seluruh masalah pembangunan bidang pendidikan, energi dan sumber daya mineral, kesehatan, perdagangan, dan lain diserahkan kepada Pemerintah Daerah, kecuali 1) politik luar negeri, 2) pertahanan keamanan, 3) peradilan; 4) moneter dan fiskal, serta 5) agama. Dengan adanya Otonomi Daerah ini, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan peluang untuk menyelenggarakan berbagai kebijakan dalam bidang pendidikan, termasuk peningkatan mutunya. Namun kebijakan ini menimbulkan masalah bagi madrasah, karena madrasah selain berkaitan dengan bidang pendidikan juga berkaitan dengan bidang agama

⁵⁵ Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:Depdiknas, 2003), cet. I, hal. 16.

yang menjadi urusan pemerintah pusat, bukan urusan pemerintah daerah.

Dalam hubungan ini ada dua pilihan. *Pilihan pertama, sentralisasi*, yaitu Departemen Agama dapat secara langsung menyelenggarakan pembinaan dan mengendalikan madrasah-madrasah di seluruh wilayah Indonesia. Pilihan pertama ini mengandung akibat sebagai berikut. *Pertama*, dana untuk melakukan pembinaan dan pengembangan madrasah berasal dari bidang agama yang jumlahnya terbatas. *Kedua*, madrasah dimungkinkan tidak menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. *Ketiga*, dapat menghambat kreativitas para guru dan kepala madrasah. *Keempat*, masyarakat kurang peduli, bahkan menggantungkan sumber pendanaan kepada pemerintah pusat. *Kelima*, informasi dari bawah (sekolah) ke pusat harus melalui jalur yang panjang, dan persoalan yang harus memerlukan penanganan segera menjadi terbengkalai. *Pilihan kedua, otonomi*, yaitu madrasah sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat II, sehingga pemerintah daerah akan ikut menanggung beban biaya dan pembinaan madrasah. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang kewenangan dalam penanganan bidang pendidikan pemerintah daerah tingkat II. Namun pilihan kedua ini belum dapat diputuskan. Saat ini, keadaan pemerintah daerah dalam mensikapi kebijakan tersebut tidak seragam. Pemerintah Daerah yang memiliki komitmen bagi kepentingan ummat Islam yang kuat, akan mencari jalan keluar untuk membantu madrasah dalam meningkatkan mutunya melalui berbagai bantuan dana, guru, sarana prasarana dan lain sebagainya.

q) Pelaksanaan Manajemen TQM.

Inti dari Manajemen Mutu Terpadu (*Total Quality Management*) adalah memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan kepada pelanggan. Untuk melaksanakan misi ini, maka seluruh komponen yang berkaitan dengan

manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan dan penilaian dilakukan dengan menggunakan standar mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan internal, maupun pelanggan eksternal. Manajemen Mutu Terpadu yang semula digunakan dalam kegiatan ekonomi, kini digunakan dalam kegiatan pendidikan, karena pendidikan sudah dianggap sebagai komoditi dalam bidang jasa yang diperjual-belikan, dan membiayai pendidikan merupakan investasi yang harus menguntungkan. Adanya Standar Nasional Pendidikan, serta pusat peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan pada setiap lembaga pendidikan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan TQM.

r) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Masyarakat (MBM).

Manajemen Berbasis Masyarakat (MBS) merupakan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, termasuk madrasah, dengan cara melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian madrasah. Pelaksanaan MBM ini antara lain dengan adanya Komite Sekolah atau Komite Madrasah yang di dalamnya yang terdapat perwakilan orang tua siswa. Dengan adanya MBM ini, maka pengelola satuan pendidikan tidak dapat sesuka hatinya melakukan berbagai kebijakan dalam pendidikan, melainkan harus bertanggung jawab kepada masyarakat dengan cara menunjukkan kinerja yang baik serta menghasilkan lulusan yang bermutu.

s) Pelaksanaan Kurikulum KBK/KTSP.

Kurikulum Bebas Kompetensi (KBK) atau yang sering disebut juga Kurikulum Tahun 2004 memiliki kaitan erat dengan misi peningkatan mutu pendidikan. Jika pada kurikulum sebelumnya lebih berorientasi pada subjek *matter* atau menguasai materi pelajaran sebanyak-banyaknya secara kognitif (*to know*), pada pada KBK selain

disertai menguasai proses serta pengalaman dalam mendapatkan ilmu juga disertai dengan menggunakannya (*to do*), mempraktekkan dan meninginternalisasikannya ke dalam diri (*to be*) sehingga menjadi karakter, kemudian mengamalkannya (*to act*) dan memanfaatkannya bagi kepentingan bersama (*to life together*). Melalui KBK ini, para lulusan pendidikan di samping memiliki wawasan dan keterampilan, juga memiliki jiwa yang kreatif, inovatif, progressif dan mandiri. Manusia yang demikian itulah yang diperkirakan akan sukses dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Selanjutnya jika pada KBK perumusan kurikulum tersebut masih ditentukan kontennya oleh pusat, maka pada KTSP, konten atau isi kurikulum tersebut diserahkan kepada satuan pendidikan. Yang dilakukan oleh pusat hanya menentukan jumlah mata pelajaran serta jumlah SKS atau jam-nya pada setiap jenjang.

t) Sertifikasi Guru.

Sertifikasi guru adalah upaya memberikan bukti pengakuan tentang keprofesionalan seorang guru dengan cara memberikan sertifikat sebagai guru kepadanya, setelah yang bersangkutan menunjukkan kompetensinya dalam bidang profesional akademik, pedagogik, kepribadian dan sosial. Masing-masing kompetensi tersebut didukung oleh data otentik yang secara keseluruhan menggambarkan keprofesionalan guru tersebut. Dengan adanya sertifikasi guru yang dibarengi dengan pemberian tunjangan untuk hidup layak, menyebabkan terjadinya perubahan yang signifikan pada kinerja guru. Sertifikasi guru ini tidak hanya berlaku bagi guru sekolah umum, melainkan juga bagi guru madrasah. Dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan mutu tenaga guru yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu pendidikan.

u) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Keagamaan adalah merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal tentang pendidikan keagamaan. Dengan lahirnya PP ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan mutu pendidikan keagamaan (madrasah diniyah) agar dapat melaksanakan fungsi tradisionalnya sebagaimana tersebut di atas, yakni sebagai media penyampai pengetahuan agama (*the transfer of Islamic knowledge*); media pemelihara tradisi Islam (*the maintenance of Islamic tradition*), dan media pencetak ulama (*the reproduction of ulama*). Lahirnya PP ini mengesankan adanya kemunduran, namun sesungguhnya ini adalah sebuah kemajuan dalam hal penyediaan pilihan yang lebih bervariasi kepada masyarakat. Saat ini, di samping terdapat madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas keagamaan, juga terdapat madrasah *tafaqquh fi al-din*, yang mutunya lebih baik daripada madrasah diniyah yang ada sebelumnya. Madrasah Diniyah yang berdasar PP tersebut selain secara yuridis diakui keberadaannya, juga mendapatkan anggaran biaya dari APBN untuk merealisasikannya.

v) Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Akreditasi adalah sebuah penilaian secara komprehensif, transparan, dan akuntabel terhadap seluruh komponen pendidikan yang terdapat dalam satuan pendidikan di sekolah atau madrasah, dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Setiap satuan pendidikan baru dianggap sah dan boleh mengeluarkan ijazah apabila satuan pendidikan yang dilaksanakannya sudah diakreditasi. Dalam pelaksanaannya, akreditasi tersebut menilai tentang kegiatan belajar mengajar,

kurikulum, rasio guru dan murid, jumlah murid tiap kelas, rata-rata nilai prestasi para siswa, ketersediaan bahan bacaan, panduan kegiatan akademik, panduan praktikum, pengelolaan keuangan, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya secara mendetail. Dengan adanya akreditasi tersebut, akan mendorong setiap satuan pendidikan umum atau madrasah untuk melaksanakan program kegiatannya sesuai standar yang ditetapkan. Hasil akreditasi tersebut dibuktikan dengan nilai yang dicapai, yang selanjutnya akan menentukan masa depan kelanjutan satuan pendidikan tersebut.

Berdasarkan penelusuran data dan dokumen sejarah sebagaimana tersebut di atas, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, bahwa kebijakan yang mengandung misi pembinaan mutu madrasah sudah berlangsung dari semenjak sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. *Kedua*, bahwa peningkatan mutu madrasah tersebut telah menggunakan berbagai strategi, antara lain dengan cara mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, mengembangkan kurikulum, pengembangan program madrasah yang lebih bervariasi, seperti Madrasah Wajib Belajar, Madrasah Aliyah Program Khusus, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), respon terhadap pendidikan kolonial, pengembangan manajemen berbasis masyarakat dan manajemen mutu terpadu, pembinaan tenaga pendidik dan lain sebagainya. *Ketiga*, dilihat dari segi peran dan fungsinya, dari sekian program tersebut di atas, nampaknya yang paling terkait dengan peningkatan mutu madrasah antara lain masuknya madrasah ke dalam bagian dari sistem pendidikan, program MAPK, MAK, Madrasah Model, sertikasi guru, pelaksanaan KBK/KTSP, penerapan manajemen TQM, Manajemen Berbasis Masyarakat, akreditasi Sekolah/Madrasah. Selanjutnya informasi tentang upaya peningkatan mutu yang pernah ada tersebut akan digunakan sebagai tolak

ukur atau bahan pembandingan dan penganalisa terhadap Madrasah Aliyah yang dijadikan objek penelitian ini. Yaitu dengan cara melihat dan mengetahui tentang strategi peningkatan mutu madrasah mana saja yang telah digunakan.

BAB III

KONDISI SOSIOLOGIS

KOTA TANGERANG SELATAN

A. Hubungan Keadaan Masyarakat dengan Pendidikan

Perlunya mengemukakan kondisi sosiologis Kota Tangerang Selatan dalam bab ini, karena memiliki hubungan yang erat dengan masalah pendidikan pada umumnya, serta dengan peningkatan mutu Madrasah Aliyah pada khususnya. Tanpa membicarakan masalah sosiologi secara substantif penelitian ini menjadi kurang lengkap. Dalam hubungan ini terdapat berbagai teori yang menjelaskan hubungan antara kondisi sosiologis dengan pendidikan.

Ali Khalil Abu al-Ainain misalnya mengatakan sebagai berikut. *Pendidikan adalah kegiatan yang bersifat sosial, dan oleh karenanya keadaan pendidikan yang terdapat pada suatu masyarakat tertentu akan berbeda dengan pendidikan di masyarakat lainnya, sesuai dengan karakter masyarakat tersebut, serta kebudayaan yang berpengaruh di dalamnya, yakni dengan bersandar pada kekuatan spirit dan falsafah yang mereka pilih serta kesediaannya untuk mengembangkan kehidupannya. Hal yang demikian mengandung arti bahwa tujuan pendidikan didasarkan pada tujuan masyarakat tersebut.*⁵⁶

Dalam pada itu Azyumardi Azra berpendapat: Pendidikan Islam pertama kali berlangsung di rumah sahabat tertentu; yang paling terkenal adalah Dar al-Arqam. Tetapi ketika masyarakat Islam sudah terbentuk, maka pendidikan

⁵⁶ Lihat Ali Khalil Abu al-Ainain, *Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), cet. I, hal. 38.

diselenggarakan di masjid. Proses pendidikan pada kedua tempat ini dilakukan dalam halaqah, lingkungan belajar.⁵⁷

Dalam pada itu Ahmad Syalabi mengemukakan, bahwa pendidikan Islam pada mulanya berlangsung di masjid dalam bentuk *halaqah* atau lingkaran belajar. Selanjutnya ketika jumlah pelajaran dan *halaqah* makin banyak, dan suara bersahut-sahutan dari para pelajar yang terdapat pada satu halaqah dengan halaqah lainnya mengganggu fungsi utama masjid sebagai tempat ibadah, serta mengganggu keterangan jama'ah yang shalat, maka dibangunlah madrasah sebagai tempat yang secara khusus digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan.⁵⁸

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, bahwa keadaan suatu pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada di masyarakat. Untuk itu tidaklah mengerangkan jika Azyumardi lebih lanjut mengatakan, bahwa dasar pendidikan Islam selanjutnya adalah nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dan Sunnah serta prinsip mendatangkan kemanfaatan dan menjauhkan kemadoratan bagi manusia. Dengan dasar ini, maka pendidikan Islam dapat diletakkan di dalam kerangka sosiologis, selain menjadi sarana transisi pewarisan kelayaan sosial budaya yang positif bagi kehidupan manusia.⁵⁹

Penggunaan jasa sosiologis dalam memecahkan berbagai masalah pendidikan dikaji secara seksama dalam sosiologi pendidikan, yaitu sosiologi khusus yang tugasnya menyelidiki struktur dan dinamika proses pendidikan yang termasuk dalam pengertian struktur ini adalah teori filsafat pendidikan, sistem kebudayaan, struktur kepribadian dan hubungan kesemuanya itu dengan tata sosial masyarakat.

⁵⁷ Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1420 H./1999 M), hal. vii.

⁵⁸ Lihat A. Syalabi, *Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1985), cet. I, hal. 67-68.

⁵⁹ Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, op, cit, hal.9.

Interaksi antara pendidikan dan masalah sosial dikaji secara seksama. Pendidikan, menurut pendekatan sosiologis ini, dipandang sabagai salah satu konstruksi sosial, atau diciptakan oleh interaksi sosial. Para sosiolog pendidikan telah membuktikan adanya hubungan masalah sosial dengan kelembagaan, tujuan dan kurikulum, proses belajar mengajar, dan berbagai komponen pendidikan lainnya.⁶⁰

Selanjutnya tantangan abad ke-21, sebagaimana yang dialami sekarang, bagaimanapun menuntut respon yang tepat dari sistem pendidikan Islam secara keseluruhan. Jika kaum muslimin termasuk Indonesia, tidak hanya ingin sekedar survive di tengah persaingan gobal yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga berharap mampu tampil ke depan, maka orientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam dan restrukturisasi sistem dan kelembagaan jelas merupakan keniscayaan. Cara pandang yang menganaktirikan lptek tampak tidak bisa dipertahankan.⁶¹

Berbagai teori tentang pengaruh sosiologis terhadap peningkatan mutu pendidikan di Kota Tangerang Selatan perlu dikaji, dengan terlebih dahulu mengemukakan berbagai keadaan sosiologis sebagai berikut.

B. Kondisi Geografis dan Demografis

Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Kecamatan Serpong dengan 102.733 orang penduduk dan kepadatan 4.273/Km². Kecamatan Serpong Utara dengan 79.234 orang penduduk dan kepadatan 4,441 orang/Km², Kecamatan Setu dengan 57.758 orang penduduk dan kepadatan 3,903 orang/Km², Kecamatan Pamulang dengan 254,085 penduduk dan kepadatan 9,474 orang/Km², Kecamatan Ciputat dengan 165,559 orang penduduk dan kepadatan 9,008 orang/Km²,

⁶⁰ Lihat Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1991), hal. 3. Lihat pula Micahel S. Northcott, *Pendekatan Sosiologis* dalam Peter Connolly, (ed), *Aneka Pendekatan Studi Agama* (terj.) Imam Khairi dari judul asli *Approaches to the Study of Religion*, (Yogyakarta:LkiS, 2002), cet. I, hal. 267.

⁶¹ Lihat Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, op, cit, hal. Xvii).

Kecamatan Pamulang Timur dengan 164.207 dan kepadatan 10,642 orang/Km², dan Kecamatan Pondok Aren dengan 252,726 orang penduduk dan kepadatan 8,458 orang/Km².⁶²

Dengan demikian dilihat dari segi banyaknya penduduk, maka 1)Kecamatan Pamulang (254.085 orang); 2)Kecamatan Pondok Aren (252,726 orang); dan 3) Kecamatan Ciputat (165,559 orang). Sedangkan dilihat dari segi kepadatan penduduknya: 1)Kecamatan Ciputat Timur (10,642 orang/Km²); 2)Kecamatan Pamulang (9,474 orang/Km²); dan 3)Kecamatan Ciputat (9,008 orang/Km²).

Selanjutnya dilihat dari segi paling sedikitnya penduduk, maka 1)Kecamatan Setu (57,758 orang); 2)Kecamatan Serpong Utara (79,234 orang), dan Kecamatan Serpong (102,733 orang). Sedangkan dilihat dari yang sedikit kepadatannya adalah; 1)Kecamatan Setu (4,441 orang/Km²); 2)Kecamatan Serpong (4,273 orang/Km²); dan 3)Kecamatan Serpong Utara (4,441).

Dengan memperhatikan data-data tersebut, maka di masa yang akan datang perlu adanya rencana penataan jumlah penduduk pada masing-masing kecamatan tersebut secara proporsional, sehingga terjadi keadaan yang lebih merata, terutama dari segi beban yang harus dipikul oleh wilayah kecamatan tersebut. Kepadatan penduduk yang beragam ini juga perlu diimbangi dengan tersedianya berbagai infra struktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan, seperti infra struktur jalan, jembatan, sarana pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pengendalian penduduk secara proporsional ini juga diperlukan dalam rangka menghindari terjadinya gesekan sosial yang diakibatkan oleh jumlah penduduk yang demikian banyak pada satu daerah.

⁶² Diambil dari hasil olah data Kabupaten Tangerang dalam Angka Tahun 2009 yang didasarkan pada kompolasi data untuk penyusunan RTRW Kota Tangerang Selatan. Disampaikan oleh Drs. H. Ahadi, MM Asisten Daerah I, Bidang Tata Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sektetaris Daerah Kota Tangerang Selatan, disampaikan pada Acara Seminar Alumni Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, 11 November 2010.

C. Kondisi Stratifikasi dan Struktur Sosial

Stratifikasi dan struktur sosial dapat diartikan sebagai keadaan yang memperlihatkan adanya pelapisan, tingkatan atau perbedaan dalam berbagai hal yang terjadi di masyarakat, seperti perbedaan dari segi latar belakang kehidupan ekonomi, dan pendidikan. Sedangkan struktur sosial adalah keadaan yang memperlihatkan bangunan sosial yang terdiri peran dan fungsi masing-masing anggota masyarakat yang terdapat dalam sebuah komunitas. Keadaan ini secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Stratifikasi dan Struktur Ekonomi

Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sebanyak 16.303 RT, jumlah anggota RTM sebanyak 52.644 orang (4,89%), angka pengangguran sebanyak (6,8%), indek pembangunan manusia sebanyak 75,50%, Angka Harapan Hidup (AHH.), 69 tahun, angka melek huruf sebanyak (88,20%), rata-rata lama sekolah (10,5 Tahun), dan daya beli sebanyak Rp. 645.000,-.⁶³

Selanjutnya dilihat dari segi jenis usaha yang dimiliki penduduk di Kota Tangerang Selatan terdiri dari: 1)pertanian (0,78%); 2)jasa-jasa (12,44%); 3)bank, persewaan & jasa perusahaan (11,16%); 4)pengangkutan & komunikasi (20,84%); 5)perdagangan, hotel dan restoran (28,49%); 6)bangunan/konstruksi (6,72%); 7)listrik, gas dan air bersih (4,13%); 8)industri pengolahan (15,42%), dan 9)pertambangan dan penggalian (0,25).

Berdasarkan data-data tersebut di atas, maka sektor ekonomi yang tertinggi di Kota Tangerang Selatan adalah bidang perdagangan, hotel dan restoran (28.49%); disusul dengan bidang pengangkutan dan komunikasi (20.84%); industri

⁶³ Sumber Data BPS 2009, UU No. 51 Tahun 2008, serta Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial 2008. Disampaikan oleh Drs. H.Ahadi, MM, pada Acara Seminar Alumni Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, op, cit.

pengolahan (15.42%), jasa-jasa (12.44), bank, persewaan & jasa perusahaan (11.16%). Dengan demikian Kota Tangerang Selatan dapat dikategorikan sebagai kota perdagangan, transportasi industri dan jasa. Sedangkan sektor pertanian, dan pertambangan termasuk sektor yang paling kecil. Hal yang demikian selanjutnya akan berpengaruh ke dalam usaha dalam bidang pendidikan yakni menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tersebut.

Selanjutnya sebagai akibat dari pembangunan yang sangat cepat di Serpong dan Serpong Utara dibandingkan dengan wilayah lain, terutama Setu, maka PDRB perkapita memperlihatkan, bahwa pendapatan penduduk Kecamatan Pamulang, Ciputat, Pondok Aren dan Setu, kurang dari Rp. 6 juta. Sedangkan PDRB Kecamatan Serpong, Ciputat Timur, dan Serpong Utara mencapai lebih dari Rp. 16 Juta.

Sektor lain di luar perdagangan, jasa dan industri: seperti perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan, tetap menjadi skala prioritas Pemerintahan Kota Tangerang Selatan ke depan. Hal tersebut di samping mempunyai nilai dominan, juga memiliki efek multi dimensi dalam pertimbangan kemanfaatan sumber daya alam serta program penghijauan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Perkembangan dan pengembangan ekonomi kerakyatan, juga harus ditumbuhkan melalui kegiatan gerakan koperasi, sehingga hal ini dapat mempersempit jurang kesenjangan antara pelaku ekonomi kecil dengan pelaku ekonomi besar yang berdampak positif pada peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Stratifikasi dan Struktur Pendidikan

Tingkatan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan terdiri dari: 1)TK, (10,55%); 2)SD (6.02%) 3)Drop Out SD, (0.38%); 4)buta huruf (0,14%); 5)SLTP (24,64%); 6)SLTA (29.22%), 7)sarjana muda (20.42%), dan 8)sarjana (8.63%). Jika tingkat SLTA & Perguruan Tinggi disatukan, maka jumlahnya menjadi (58.26%), dan hal ini

dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan penduduk relatif tinggi.

Selanjutnya dilihat dari segi angka pencari kerja data menunjukkan sebagai berikut: 1)SLTA (61.87%); 2)SLTP (15.63%), 3)sarjana (10.82%); 4)D-III (4.47%); 5)D-I dan D-II (3.62%), 6)SD (3.58%), dan tak tamat SD (0.01%). Jika pencari kerja SLTA dan Perguruan Tinggi (Sarjana, D-I, D-II dan D-III), disatukan maka jumlahnya mencapai (80.78%).⁶⁴

Data tersebut dapat dimaklumi, karena tamatan SLTA yang kurang mampu dan tamatan Perguruan Tinggi memang dididik untuk memasuki lapangan kerja. Jumlah pencari kerja yang tinggi ini mengharuskan adanya upaya membuka lapangan kerja secara lebih sungguh-sungguh lagi melalui berbagai program terobosan, di samping dengan cara mengundang para investor. Adanya jumlah pencari kerja yang cukup besar ini amat berpotensi untuk menimbulkan terjadinya tindakan kejahatan seperti pencurian, penodongan, penipuan, dan tindakan kriminalitas lainnya.

Data tentang penyerapan kerja tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut; 1)usaha kecil (70.16%); 2)usaha menengah (18.47%); dan 3)usaha besar (11.36%). Jika penyerapan tenaga kerja usaha kecil dan menengah disatukan, maka jumlahnya mencapai lebih dari (88%). Untuk itu, dalam rangka penyerapan tenaga kerja, peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah perlu didorong dan dibantu dengan sungguh-sungguh.

Dari data tersebut di atas, maka kontribusinya terhadap PDRB dapat dikemukakan sebagai berikut; 1)usaha besar (44.19%); 2)usaha kecil (28.76%); dan 3)usaha menengah (27.05%). Jika kontribusi usaha kecil dan menengah disatukan maka jumlahnya lebih dari (55%). Dengan demikian kontribusi usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan pendapatan daerah lebih besar daripada usaha besar (lebih dari 55%), dibandingkan dengan usaha besar yang mencapai (44.19%).

⁶⁴ Lihat Drs. H. Ahadi, op, cit.

D. Kondisi Kehidupan Beragama dan Budaya

Kota Tangerang Selatan memiliki sarana peribadatan yang cukup memadai dan tersebar di seluruh kecamatan maupun kelurahan: terdiri dari masjid, surau, gereja, kuil dan wihara di tempat-tempat resmi.

Pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama antar berbagai pemeluk agama dengan perbedaan keyakinan sebatas normal dan keseimbangan dapat terjaga; sehingga seluruh masyarakat merasakan kenyamanan dalam melakukan ibadahnya dan hidup berdampingan secara damai dan saling menghargai.

Pembangunan Masjid Raya Ciputat dan daerah BSD/Bintaro serta pusat pengkajian dan Pengembangan Budaya Islam menjadi target pemerintah. Dukungan proaktif pemerintah dan pembinaan majelis talim, pesantren dan kegiatan ibadah lainnya menjadi prioritas Pemerintah Tangerang Selatan.

Beragam organisasi kepemudaan tumbuh dan berkembang di Wilayah Tangerang Selatan; seperti: PORKABI, FBR, BMB, KEMBANG LATAR, PEMUDA PANCASILA, IKBCS, PUTRA JAGAT PASUNDAN serta organisasi kepemudaan lainnya.

Pembinaan, pendekatan, pengembangan dan penyuluhan perlu dilakukan secara *continue* untuk mengatasi perbedaan pendapat di antara organisasi kepemudaan yang ada, melalui Forum Komunikasi Terbuka perlu digalakan sehingga dapat tercipta suasana persaudaraan dan hidup berdampingan dengan mengedepankan kedamaian dalam perbedaan. Peran serta secara proaktif dari KNPI perlu ditumbuh kembangkan sebagai wadah pengayom dan pemersatu sesama generasi muda dengan mengintensifkan dan membuka saluran komunikasi di antara generasi muda Tangerang Selatan.

Pembinaan dan pengembangan Karang Taruna mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dan Tingkat Kota

perlu dicanangkan serta digalakan melalui program kepemudaan bernuansa pembangunan karakter pemuda yang mandiri, berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perkembangan Balai Latihan Kerja (BLK) mejadi prioritas dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan pemuda dapat menjadi tulang punggung pembangunan dan pemberdayaan pemuda melalui program TKI yang bermutu dan berkualitas menjadi produk andalan Pemerintahan Tangerang Selatan. Sarana dan prasarana olahraga yang tersebar di seluruh wilayah Tangerang Selatan belum sepenuhnya memiliki standar teknis yang dibutuhkan. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan bidang olahraga diperlukan terobosan-terobosan melalui KONI Kota Tangerang Selatan dalam menciptakan iklim olahraga yang kondusif, produktif dan menghasilkan bibit atlit muda berbakat yang berprestasi.

Kerjasama PEMDA dan KONI Tangerang Selatan dalam melahirkan atlit-atlit berbakat dan berprestasi; diperlukan penataan yang sistematis melalui penyelenggaraan even-even olahraga yang berkesinambungan.

Selain itu diperlukan juga perencanaan pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang terpadu, tertata serta memiliki gedung olahraga yang memadai untuk dapat menampung, mengembangkan dan menyalurkan atlit-atlit berprestasi dan berbakat sampai dengan tingkat nasional maupun internasional.

Kegiatan wanita melalui program PKK dan POSYANDU telah berjalan semenjak Kota Tangerang Selatan masih merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang dan telah memperoleh prestasi yang patut dibanggakan. Selain itu juga telah dapat melahirkan wanita-wanita yang produktif dan mandiri dalam berbagai kegiatan usaha *home industry*.

Hal tersebut tentunya harus terus dipertahankan, diberdayakan dan ditumbuh kembangkan secara optimal

melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang difasilitasi oleh PEMDA.

Harapan ke depan ketahanan ekonomi keluarga juga harus dapat diwujudkan dengan baik dan berkesinambungan; melalui pelaksanaan program pemberdayaan wanita mandiri dalam bidang ekonomi keluarga yang ditunjang oleh PEMDA.

Masalah sampah selalu menjadi tantangan bagi masyarakat di seluruh wilayah pedesaan maupun perkotaan di tanah air dan sering menjadi polemik yang berkepanjangan dalam mencari berbagai solusi penanggulangannya. Sampah dapat menjadi problem bagi PEMDA (karena baunya yang tidak sedap), namun melalui pengolahan yang terpadu dan terorganisir; sampah dapat menjadi sumber penghasilan daerah serta dapat menjadi penunjang perekonomian masyarakat Kota Tangerang Selatan. Hal tersebut sangat memerlukan sebuah terobosan yang kreatif dan inovatif dalam melakukan penanggulangannya; yang diawali dengan pemberian penyuluhan, pendidikan, pelatihan agar segenap komponen masyarakat dapat memahami tentang pentingnya penanggulangan dan pengolahan sampah secara terpadu; mulai dari cara pemilihan, pemilahan dan pemuluhan antara sampah organik dan an-organik serta pola pembuangannya secara tepat. Kesulitan dalam melakukan pencarian tempat pembuangan akhir (TPA) dapat diatasi melalui program pengolahan sampah terpadu dan berjenjang yang dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan dan kecamatan dengan dukungan permodalan dari PEMDA.

E. Kondisi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kota Tangerang Selatan memiliki fasilitas pendidikan yang cukup lengkap, mulai dari tingkat pra sekolah hingga tingkat pascasarjana baik yang berbasis agama maupun yang berbasis nasional.

Berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri tersebar di wilayah Tangerang Selatan; seperti: Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Terbuka (UT), Universitas Pamulang (Unpam), Institut Teknologi Indonesia (ITI), Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan lain-lain; demikian pula SMA, SMP dan SD serta pendidikan setara lainnya. Yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai; mulai dari tingkat SD, SLTP (SMP/MTs) dan SLTA (SMA/MA/SMK); serta memperbanyak sekolah-sekolah unggulan. Dan yang lebih utama bagaimana menekan biaya pendidikan semurah mungkin serta dapat memberikan bantuan pendidikan (beasiswa) kepada masyarakat yang tidak mampu, bila perlu melalui pengalokasian dana APBD.

F. Kondisi Kesehatan Masyarakat

Kota Tangerang Selatan memiliki sarana pelayanan kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang didukung dengan pembinaan kesehatan keluarga melalui gerakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

Ke depan perlu ditingkatkan sarana dan prasarana kesehatan dengan mutu pelayanan yang memadai bagi masyarakat tidak mampu, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Khususnya PUSKESMAS; sarana dan prasarananya harus ditingkatkan, dari PUSKESMAS RAWAT JALAN mejadi RAWAT INAP di tingkat kecamatan. Juga perlu didirikan PUSKESMAS BANTU di tingkat kelurahan serta pembangunan RSUD di tingkat kota. Termasuk juga program jaminan aruransi kesehatan yang belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat perlu dicanangkan dan digalakan

G. Infrastruktur Pemerintahan

Perbaikan dan peningkatan mutu sarana jalan utama yang sedang dilaksanakan oleh Pejabat Walikota saat ini diharapkan dapat selesai tahun 2010, sehingga berbagai

masalah kemacetan di sepanjang jalan utama di wilayah perkotaan dapat teratasi dan berfungsi secara layak. Program perbaikan, normalisasi dan peningkatan mutu sarana jalan di tingkat lingkungan dan gang-gang menjadi target pembangunan, sehingga diharapkan pada tahun 2012 seluruh sarana jalan di Wilayah Tangerang Selatan dapat berfungsi secara normal.

Pembangunan kantor-kantor pemerintahan, Fasilitas Sosial (Pasos) dan Fasilitas Umum (Pasum) perlu dicanangkan dan direncanakan pada tempat-tempat yang memiliki nilai strategis; terutama kantor walikota berikut instansi pendukungnya dibangun di tengah kota baik di Bumi Serpong Damai (BSD) ataupun di Bintaro. Pada gilirannya dapat dijadikan sebagai pusat kota maupun pusat kegiatan Pemerintahan Kota Tangerang Selatan yang terpadu, sehingga koordinasi pelayanan berbagai kepentingan masyarakat dapat dilaksanakan dengan mudah, efektif dan efisien.

Normalisasi dan peningkatan pembangunan saluran pembuangan air (drainase) menjadi target yang perlu dilaksanakan dalam program bebas banjir juga menjadi skala prioritas. Perencanaan pembangunan underpass di beberapa titik kemacetan perlu dilaksanakan, seperti di Kampung Utan Rempoa, Jombang, Sudimara, Serpong dan Gaplek yang tentunya perlu menggandeng pihak investor atau swasta.

Normalisasi dan penataan ulang serta pemanfaatan situasi atau danau-danau; perlu dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup, selain dapat dijadikan sebagai daerah resapan/penampungan air, juga dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan olahraga air serta dapat menjadi pusat penjualan makanan khas Tangerang Selatan dan dapat dijadikan daerah wisata. Penataan para pedagang kaki lima di sepanjang pasar tradisional, dapat diatur ke dalam pasar yang telah disediakan, selain dapat menghindari kemacetan lalu lintas juga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara resmi dan dapat menghindari penarikan retribusi liar.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kondisi sosiologis Kota Tangerang Selatan secara umum sudah dapat dikategorikan sebagai kota yang sudah meninggalkan ciri masyarakat tradisional agraris. Mereka sudah meninggalkan usaha ekonomi dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Hal ini sejalan dengan realitas Kota Tangerang Selatan yang di dalamnya terdapat sentra-sentra industri besar, menengah dan kecil, semakin terbatasnya lahan pertanian, berubah daerah pemukiman dan pusat-pusat perdagangan, jalur transportasi.

Dari segi pendidikan, masyarakat Tangerang Selatan rata-rata sudah mencapai pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan perubahan kondisi ekonomi sebagaimana tersebut di atas, yakni bidang jasa dan industri yang membutuhkan pendidikan yang lebih sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri.

Kondisi keberagamaan di Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan cukup kondusif, rukun, damai dan harmonis. Hal ini dapat dilihat dari jarang terjadinya konflik atau pertentangan antara agama. Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hinda, Budha dan Konghucu ada di Kota Tangerang Selatan dan hidup secara berdampingan. Jumlah tempat peribadatan bagi tiap agama sebagaimana tersebut di atas setiap tahun semakin bertambah. Kehidupan beragama yang demikian itu juga ditopang oleh banyak perguruan tinggi agama, khususnya perguruan tinggi agama Islam, seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Muhammadiyah, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dalam bidang jasa dan industri, serta berbagai kehidupan lainnya tetap membutuhkan nilai-nilai agama. Perkembangan dalam bidang jasa industri berdampingan erat dengan kehidupan spiritual keagamaan. Agama sebagai sumber nilai moral, etik dan budaya tetap dibutuhkan oleh masyarakat Tangerang Selatan.

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam arti pemanfaatan iptek dalam berbagai bidang

kehidupan di Kota Tangerang Selatan cukup tinggi. Hal ini sejalan dengan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa sebagaimana telah disebutkan di atas. Teknologi tidak hanya digunakan dalam kegiatan industri dan jasa, melainkan juga dalam kegiatan rumah tangga, seperti pemanfa'atan kompor gas, mesin cuci, kulkas, ac, televisi, alat strika, alat pemanas dan pendingin air dan sebagainya.

Dalam kondisi masyarakat yang demikian itu, maka pendidikan semakin diperlukan, yakni bukan hanya pendidikan umum, tetapi juga pendidikan agama yang memuat penanaman nilai-nilai agama, spiritual dan sebagainya. Keadaan ini erat kaitannya dengan kehadiran Madrasah Aliyah yang semakin diminati daripada sekolah umum.

BAB IV

MUTU MADRASAH ALIYAH DI KOTA TANGERANG SELATAN

A. Profil Madrasah Aliyah Secara Singkat

Profil Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan, Banten secara singkat dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Madrasah Aliyah Negeri Serpong

Madrasah Aliyah Negeri Serpong yang memiliki luas/lahan sekitar 3000 M² berdiri pada tanggal 17 Maret 1997, terletak di Jalan Raya Serpong Desa Kademangan Setu, Tangerang Selatan, Banten. MA Serpong ini berstatus negeri dari 2 MAN yang dimiliki oleh Tangerang Selatan selain MAN Insan Cendekia. Sarana prasarana yang dimiliki oleh MAN Serpong ini cukup memadai, berupa 12 ruangan kelas, ruangan kepala sekolah, beberapa lapangan olahraga dan tak kalah pentingnya adanya Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa dan Komputer, dilengkapi juga dengan Musholla dan ruang pertemuan. Saat ini MAN serpong memiliki 27 orang guru dan 5 orang karyawan yang mendidik sebanyak 395 siswa dan siswi. Dan telah meluluskan lebih dari 1500 peserta didik. MAN Serpong juga telah memperoleh akreditasi dari BAN-SM dengan peringkat B.⁶⁵

Uraian tersebut di atas memperlihatkan, bahwa MAN Serpong telah mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam usianya yang cukup tua, yakni 14 tahun, MAN Serpong ini

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri Serpong, pada hari Selasa, 9 Agustus, 2011.

telah terakreditasi dengan nilai B, mencapai hasil Ujian Nasional dengan hasil 100%, sarana prasarana dan fasilitas cukup mendukung kegiatan proses belajar mengajar. Demikian pula sumber daya manusia (SDM) terutama tenaga gurunya tergolong cukup memadai. Walaupun demikian, dalam hal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) MAN Serpong, berhasil meraih prestasi cukup signifikan lulus 100 %, dengan nilai IPA tertinggi = 9.21; terendah= 6.17; rata-rata= 8.28; sedangkan IPS tertinggi = 9.80; terendah= 5.91; rata-rata= 7.87.

2. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, Serpong didirikan atau mulai menerima siswa baru pada tahun pelajaran 1996/1997, yang berlokasi di Jalan Cendekia Sektor XI Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Madrasah Aliyah Insan Cendekia ini berdiri di atas lahan \pm 5 Ha, memiliki fasilitas yang lengkap dan sangat memadai sebagai sebuah sekolah ideal seperti ruangan kelas, laboratorium lengkap baik IPA maupun bahasa dan komputer, lapangan olahraga, masjid, gedung pertemuan (aula), dan didukung oleh perpustakaan yang baik dan memadai.



Prasarana tempat olahraga dan ibadah



Ruang kelas belajar mengajar



Prasarana perpustakaan



Prasarana Laboratorium IPA

Saat ini MAN Insan Cendekia memiliki 360 siswa dan siswi, 50 orang guru yang kompeten di bidangnya masing-masing, telah memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN-SM) dengan predikat A, dan telah meluluskan lebih dari 1100 peserta didik. MAN Insan Cendekia ini adalah salah satu MA yang berstatus negeri dari 2 MAN yang ada di Tangerang Selatan. Demikian pula prestasi akademiknya sangat menggembirakan, karena dalam mengikuti Ujian Nasional (UN) lulus 100 % baik jurusan IPA maupun IPS⁶⁶ dengan nilai IPA tertinggi = 10.00; terendah= 7.00; rata-rata= 8.80; sedangkan IPS tertinggi = 8.45; terendah= 6.25; rata-rata= 8.43.

3. Madrasah Aliyah Nurul Falah Serpong

Madrasah Aliyah Nurul Falah Serpong didirikan pada tahun 1997, berlokasi di Jalan Ciater Barat, Ciater, Serpong Tangerang Selatan, Banten, merupakan salah satu Madrasah Aliyah Swasta dari sekian madrasah swasta yang dimiliki Tangerang Selatan. Madrasah Aliyah ini hanya memiliki jurusan IPS. Jumlah siswa saat ini adalah 59 orang yang didukung oleh 16 orang guru dan 4 tenaga administrasi. Adapun sarana prasarana yang dimiliki meliputi ruang kelas, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorium komputer, musholla dan

⁶⁶ Hasil wawancara dan observasi dengan Ir. Elly Haswani, M.Pd, pada hari Jum'at, 15 Juli 2011.

lapangan olahraga volley. Madrasah Aliyah Nurul Falah menempati areal seluas 3000 m². Terkait dengan prestasi akademik Madrasah Aliyah Nurul Falah walaupun belum terakreditasi, namun secara akademik dapat meraih prestasi yang sangat menggembirakan, karena hasil Ujian Nasional (UN) lulus 100 %.⁶⁷

4. Madrasah Aliyah Nurasholihat

Madrasah Aliyah Nurasholihat yang beralamatkan di Kampung Perigi Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, telah berdiri sejak tahun 1994. Walaupun belum memperoleh akreditasi dari BAN-SM, MA Nurasholihat di dukung oleh 18 orang guru dan 3 orang tenaga administrasi. Jumlah siswa saat ini mencapai 70 orang. Sarana prasarana yang dimiliki selain 3 ruang kelas, di antaranya: ruang kepala sekolah; perpustakaan; laboratorium komputer; gedung pertemuan, musholla; lapangan olahraga futsal, volley dan bulutangkis. Dalam hal pelaksanaan akreditasi, Madrasah Aliyah Nurasholihat sedang dalam proses, namun dilihat dari prestasi akademik yang diraihinya, lulus 100 % dalam mengikuti Ujian Nasional (UN)⁶⁸ dengan nilai IPS tertinggi = 9.40; terendah= 6.40; rata-rata= 8.07.

5. Madrasah Aliyah Soebono Mantofani

Madrasah Aliyah Soebono Mantofani berdiri pada tahun 1997, terletak di Jl. Jalan Sumatera Nomor 75, Jombang Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Madrasah Aliyah ini telah memperoleh akreditasi dari BAN-SM dengan prediket 'B'. Peserta didik yang belajar di Madrasah ini sebanyak 119 orang yang di dukung oleh 17 orang guru. Memiliki lahan yang

⁶⁷ Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Aliyah Nurul Falah Serpong, pada hari Kamis, 4 Agustus 2011.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan kepala Madrasah Aliyah Nurasholihat Bapak Rohim, pada hari Kamis, 13 Oktober 2011.

lumayan, madrasah ini dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai pula, di antaranya: 6 ruang kelas, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorim bahasa, laboratorium komputer, aula pertemuan, musholla, dan lapangan olahraga. Demikian pula secara akademik telah berhasil lulus 100 % dalam mengikuti Ujian Nasional (UN).⁶⁹

6. Madrasah Aliyah Madinatunnajah

Madrasah Aliyah Madinatunnajah didirikan pada 14 Februari 2001 berlokasi di Jalan Jombang Bumi Serpong Damai Nomor 97 Jombang, Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Dengan akreditasi 'B' dari BAN-SM, Madrasah Aliyah Madinatunnajah telah meluluskan 175 siswa. Saat ini siswa yang belajar di madrasah ini berjumlah 98 orang, yang dibina oleh 19 orang guru dan memiliki 4 orang tenaga administrasi. Dengan luas yang sangat memadai sekitar 25000 M², madrasah ini memiliki sarana dan prasarana yang lumayan lengkap. Di antaranya: 5 ruang kelas, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorim bahasa, laboratorium komputer, laboratorium IPA, aula pertemuan, musholla, dan lapangan olahraga. Madrasah Aliyah Madinatunnajah juga dapat meluluskan dengan prestasi yang mengembirakan, lulus 100 % dalam mengikuti Ujian Nasaional (UN).⁷⁰

7. Madrasah Aliyah Islamiyah

Madrasah Aliyah Islamiyah merupakan salah satu Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kota Tangerang Selatan. Madrasah yang terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 23, Ciputat, Tangerang Selatan ini berdiri pada tanggal 14 Desember 1987. MA Islamiyah dalam perjalanannya telah meluluskan

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Soebono Mantopani, pada hari Jum'at, 15 Juli 2011.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Madinatunnajah Bapak Syukron, pada hari Kamis, 13 Oktober 2011.

sebanyak 385 siswa dan saat ini ada 118 siswa yang sedang belajar atau mengikuti pendidikan. Para siswa itu dibina oleh 17 orang guru yang dibantu oleh beberapa tenaga administrasi. Madrasah ini juga telah memperoleh akreditasi dari BAN-SM dengan prediket A. Menempati areal seluas 2000 M², MA Islamiyah memiliki sarana prasarana yang cukup memadai diantaranya: 5 ruang kelas, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorim bahasa, laboratorium komputer, laboratorium IPA, aula pertemuan, musholla, dan lapangan olahraga. Madrasah Aliyah ini, terkait dengan pelaksanaan akreditasi, masih dalam proses, tetapi walaupun demikian prestasi akademik lulus 100 % dalam mengikuti Ujian Nasional (UN).⁷¹

8. Madrasah Aliyah Muhammadiyah 01

Madrasah Aliyah Muhammadiyah 01 ini berlokasi di Jl. Dewi Sartika Gg. Nangka No. 4 Ciputat, Tangerang Selatan. Juga merupakan madrasah swasta yang berdiri pada tanggal 16 Maret 1978. Di samping belum memperoleh akreditasi dari BAN-SM, dalam perkembangannya mendidik siswa tidak terlalu banyak, dimana saat ini ada 22 siswa yang belajar di madrasah ini. Sampai saat ini baru meluluskan sebanyak kurang lebih 200 siswa. Madrasah ini menempati lokasi seluas 1300 M² dan memiliki sarana prasarana yang terbatas, berupa 5 ruang kelas, ruang kepala sekolah, perpustakaan dan laboratorium komputer. Sementara sarana lain seperti lapangan olahraga, gedung pertemuan belum dimilikinya. Demikian pula Madrasah Aliyah Muhammadiyah 01 walaupun belum terakreditasi, namun dalam mengikuti Ujian Nasional (UN) lulus 100 %.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dan observasi dengan Wakil Kepala Madrasah Aliyah Islamiyah Bidang Kurikulum Bapak Heri, pada hari Rabu, 13 Juli 2011.

⁷² Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Muhammadiyah 01 Ibu Euis Amelia, pada hari Kamis, 13 Oktober 2011.

9. Madrasah Aliyah Sunanul Husna

Madrasah Sunanul Husna adalah Madrasah Aliyah Swasta yang terletak di Jl. Menjangan IV Pd Ranji Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Telah berdiri sejak tahun 1996. Memiliki 22 orang tenaga guru di bantu beberapa orang tenaga administrasi, MA Sunanul Husna telah meluluskan sebanyak 203 siswa. Dan saat ini tengah mendidik sebanyak 120 siswa. Memiliki lahan seluas 5000 M² yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lumayan untuk pembinaan anak didik. Sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain: 6 ruang kelas, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorim bahasa, laboratorium komputer, aula pertemuan, musholla, dan lapangan olahraga. Madrasah ini akreditasinya masih dalam proses, namun dalam prestasi akademik telah lulus 100 % dalam mengikuti Ujian Nasional (UN)⁷³ dengan nilai IPS tertinggi = 9.50; terendah= 2.00; rata-rata= 7.38.

10. Madrasah Aliyah Darussalam

Madrasah Aliyah Darussalam terletak di Jl. H. Rasam Rt 003/02 Kelurahan Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan, yang didirikan pada tahun 1990.



Foto ruang belajar mengajar, tempat olahraga dan ibadah Madrasah Aliyah Darussalam

⁷³ Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Sunanul Husna Bapak Mukhtar, pada hari Kamis, 13 Oktober 2011.

Sebagai madrasah aliyah swasta, MA Darussalam ini dikelola secara baik, walaupun belum memperoleh akreditasi dari BAN-SM. Saat ini mendidik sebanyak 78 siswa. Tenaga pendidik yang dimiliki madrasah ini sebanyak 15 orang ditambah 3 orang tenaga administrasi. Menempati lahan seluas 2000 M², dan memiliki sarana belajar sebanyak 3 kelas, perpustakaan laboratorium IPA dan bahasa, musholla dan lapangan olahraga seperti basket, volly dan bulu tangkis. Madrasah ini walaupun akreditasinya masih dalam proses, namun telah berhasil 100 % lulus dalam mengikuti Ujian Nasional (UN).

11. Madrasah Aliyah Al-Amanah al-Gontory

MA Al-Amanah al-Gontory adalah Madrasah Aliyah Swasta yang terletak di Jl. Taman Makam Bahagia ABRI, Kelurahan Perigi Baru Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, didirikan pada tanggal 11 Oktober 1993. Memiliki 20 orang tenaga pendidik yang dibantu oleh 4 orang tenaga administrasi, madrasah ini mendidik sebanyak 150 siswa. Telah memperoleh akreditasi dari BAN-SM dengan prediket B. Sebagai madrasah swasta, sarana prasarana yang dimiliki tergolong lumayan lengkap berupa 6 ruang kelas, ruang kepala sekolah, laboratorium IPA dan bahasa, aula, perpustakaan dan musholla, serta ada beberapa lapangan olahraga seperti lapangan futsal, basket, volly, dan bulu tangkis. Madrasah Aliyah ini walaupun akreditasinya mendapatkan prediket B akan tetapi prestasi akademiknya lulus 100 % dalam mengikuti Ujian Nasional (UN)⁷⁴ dengan nilai IPS tertinggi = 9.00; terendah= 4.75; rata-rata= 7.55.

12. Madrasah Aliyah Jamiyah Islamiyah

Madrasah Aliyah Jamiyah Islamiyah juga merupakan salah satu Madrasah Aliyah Swasta yang ada di Kota Tangerang Selatan. Madrasah yang terletak di Jalan Pesantren Jurang

⁷⁴Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Al-Amanah al-Gontory Bapak Kurniawan, pada hari Kamis, 13 Oktober 2011.

Mangu Timur Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. MA Jamiyah Islamiyah tahun 2010 meluluskan sebanyak 73 siswa dan saat ini ada 202 siswa yang sedang belajar atau mengikuti pendidikan. Para siswa ini dibina oleh 24 orang guru yang dibantu oleh beberapa tenaga administrasi. Madrasah ini juga telah memperoleh akreditasi dari BAN-SM dengan predikat nilai A. Menempati areal seluas 10000 M², MA Jamiyah Islamiyah memiliki sarana prasarana yang cukup memadai diantaranya: 6 ruang kelas, ruang kepala sekolah, perpustakaan IPA, laboratorim bahasa, laboratorium komputer, laboratorium IPA, aula pertemuan, musholla, dan beberapa lapangan olahraga seperti basket, volly dan bulutangkis. Demikian pula prestasi akademik yang diraihinya dalam mengikuti Ujian Nasional (UN) lulus 100 %⁷⁵ dengan nilai IPA tertinggi = 9.00; terendah= 0.00; rata-rata= 7.33. sedangkan IPS tertinggi = 8.80; terendah= 4.40; rata-rata= 7.35.



Prasarana tempat olahraga, belajar mengajar, dan ibadah serta laboratorium komputer Madrasah Aliyah Jamiyah Islamiyah

13. Madrasah Aliyah Hasanussholihat

Madrasah Aliyah Hasanussholihat berlokasi di Jalan Gading Serpong Kp. Pakulonan Barat, Rt 02/03 Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan.

⁷⁵ Hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Madrasah Jamiyah Islamiyah Bapak Baharuddin, S.Ag, pada hari Senin, 18 Juli 2011.



Foto ruang belajar mengajar dan tempat olahraga pada Madrasah Aliyah Hasanussholihat

Dengan akreditasi 'B' dari BAN-SM, Madrasah Aliyah Hasanussholihat tahun 2010 meluluskan 64 siswa. Saat ini siswa yang belajar di madrasah ini berjumlah 216 orang, yang dibina oleh 26 orang guru dan memiliki 6 orang tenaga administrasi. Dengan luas sekitar 2000 M², madrasah ini memiliki sarana dan prasarana yang lumayan lengkap. Di antaranya: 8 ruang kelas, ruang kepala sekolah, perpustakaan, laboratorim bahasa, laboratorium IPA, laboratorium komputer, laboratorium IPA, aula pertemuan, musholla, dan beberapa lapangan olahraga seperti basket, volly, dan bulutangkis. Namun terkait dengan prestasi akademik telah lulus 100 % dalam mengikuti Ujian Nasional (UN).⁷⁶

14. Madrasah Aliyah Darul Hikmah

Madrasah Aliyah Darul Hikmah terletak di Jl. Surya Kencana No. 21 Pamulang Barat Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Sebagai madrasah aliyah swasta, MA Darul Hikmah ini dikelola secara baik dan telah memperoleh akreditasi dari BAN-SM dengan prediket 'B'. Saat ini mendidik sebanyak 108 siswa. Tenaga pendidik yang dimiliki madrasah ini sebanyak 13 orang ditambah 7 orang tenaga administrasi. Menempati lahan seluas 400 M², dan memiliki sarana belajar sebanyak 3 kelas,

⁷⁶Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah bidang Kurikulum Madrasah Aliyah Hasanussholihat Bapak Abdul Fatah, S.Pd.I, pada hari Kamis, 13 Oktober 2011.

perpustakaan laboratorium komputer dan bahasa, musholla dan lapangan olahraga seperti basket, volly dan bulu tangkis. Madrasah Aliyah Darul Hikmah ini pun dalam bidang akademik sangat menggembirakan, karena telah berhasil dan lulus 100% dalam mengikuti Ujian Nasional (UN)⁷⁷ dengan nilai IPS tertinggi = 10.00; terendah= 5.40; rata-rata= 8.18.



Prasarana tempat belajar mengajar Madrasah Aliyah Darul Hikmah

15. Madrasah Aliyah Ummul Qura

Madrasah Aliyah Ummul Qura adalah Madrasah Aliyah Swasta yang memiliki luas sekitar 3000 M² berdiri pada tanggal 4 Januari 1995, terletak di Jalan Pondok Cabe Ilir Pamulang, Rt 01/04 No. 29 A Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang Selatan. Madrasah Aliyah Ummul Qura belum memperoleh akreditasi dari BAN-SM., namun prestasi akademik Madrasah ini berhasil 100% lulus dalam mengikuti Ujian Nasional (UN) dengan nilai IPS tertinggi = 9.00; terendah= 5.20; rata-rata= 7.33.⁷⁸ Sarana prasarana yang dimiliki oleh Madrasah Aliyah Ummul Qura ini cukup memadai, berupa 6 ruangan kelas, ruangan kepala sekolah, perpustakaan, dan tak kalah pentingnya adanya Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa dan Komputer, dilengkapi juga dengan Musholla dan ruang pertemuan. Saat ini MA Ummul Qura memiliki 24 orang guru dan beberapa

⁷⁷Hasil Wawancara dan observasi dengan Kepala Madrasah Aliyah Darul Hikmah Bapak Jaelani dan K.H. Muhammad Sayidih Ketua Yayasan Darul Hikmah, pada hari Kamis, 20 Juli 2011

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Ummul Qura Bapak Muhalik, pada hari Kamis, 13 Oktober 2011

karyawan yang mendidik sebanyak 200 siswa dan siswi. Tahun 2010 meluluskan sebanyak 30 peserta didik.

16. Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan

Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan terletak di Perum Bukit Cirendeu, Pondok Cabe Iir, Pamulang, Tangerang Selatan, yang didirikan pada tahun 2005. Sebagai madrasah aliyah swasta, madrasah ini dapat berjalan dengan baik, walaupun belum memperoleh akreditasi dari BAN-SM. Saat ini mendidik sebanyak 120 siswa, dan pada tahun 2010 meluluskan sebanyak 36 siswa. Tenaga pendidik yang dimiliki madrasah ini sebanyak 16 orang ditambah 5 orang tenaga administrasi. Memiliki sarana belajar sebanyak 6 kelas, yang dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, perpustakaan laboratorium komputer dan bahasa, musholla dan lapangan olahraga seperti basket, volly dan bulu tangkis. Madrasah Aliyah ini walaupun belum terakreditasi, namun dalam bidang akademik sangat menggembirakan, karena berhasil dan lulus 100 % dalam mengikuti Ujian Nasional (UN)⁷⁹ dengan nilai IPA tertinggi = 9.75; terendah= 6.25; rata-rata= 8.50. sedangkan IPS tertinggi = 9.75; terendah= 5.00; rata-rata= 7.91.

Prasarana tempat belajar mengajar Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan menempati area lantai 3.



⁷⁹ Hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Bambang Indarto, Lc, Kepala Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan Pondok, pada hari Selasa, 19 Juli 2011



Prasarana laboratorium komputer Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan

Khusus yang berkaitan dengan tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) untuk setiap Madrasah Aliyah tersebut di atas pada Tahun 2011 dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Nilai Tertinggi		Nilai Terendah		Nilai Rata	
		IPA	IPS	IPA	IPS	IPA	IPS
1	MA Negeri Serpong	9.21	9.20	6.17	5.91	8.28	7.87
2	MA Negeri Insan Cendikia	10.00	8.43	7.00	6.25	8.80	8.43
3	MA Nurul Falah Serpong						
4	MA Nurasholihat		9.40		6.40		8.07
5	MA Soebono Mantofani						
6	MA Madinatunnajah		8.60		7.10		7.40
7	MA Islamiyah						
8	MA Muhammadiyah 01						
9	MA Sunanul Husna		9.50		2.00		7.38
10	MA Darussalam						
11	MA Al-Manah Al-Gontory		9.00		4.75		7.55
12	MA Jamiyah Islamiyah	9.00	8.80	0.00	4.40	7.33	7.35
13	MA Hasanusholihat						
14	MA Darul Hikmah		10.00		5.40		8.18

15	MA Ummul Quro		9.00		5.20		7.33
16	MA Khazanah Kebajikan	9.75	9.75	6.25	5.00	8.50	7.91

Tabel tersebut di atas menunjukkan sebagai berikut: 1) nilai Tertinggi IPA= 10.00 adalah MA Negeri Insan Cendikia, sedangkan IPS= 10.00 adalah MA Darul Hikmah; 2) nilai Terendah IPA= 0.00 MA Jamiyah Islamiyah, sedangkan IPS= 2.00 MA Sunanul Husna; 3) nilai Rata-rata Tertinggi IPA= 8.80 MA Negeri Insan Cendikia, sedangkan IPS= 8.43 MA Negeri Insan Cendikia juga; dan 4) nilai Rata Terendah IPA= 7.33 MA Jamiyah Islamiyah sedangkan IPS= 7.33 MA Ummul Quro.⁸⁰

Keadaan tersebut di atas memperlihatkan bahwa seluruh Madrasah Aliyah yang ada di Kota Tangerang Selatan telah mengikuti UN dengan hasil yang cukup baik dan bervariasi, hal tersebut menunjukkan adanya tingkat perbedaan dalam berbagai aspek yang mereka miliki terutama pada aspek tenaga pendidik, peralatan laboratorium dan *input* para siswa.

Khusus yang berkaitan dengan hasil akreditasi untuk madrasah aliyah tersebut di atas dapat dilihat perbandingannya sebagai berikut:

No.	Nama Sekolah	Nilai Akreditasi
1	MA Negeri Serpong	B
2	MA Negeri Insan Cendikia	A
3	MA Nurul Falah Serpong	-
4	MA Nurasholihat	Dalam proses
5	MA Soebono Mantofani	B
6	MA Madinatunnajah	B
7	MA Islamiyah	A
8	MA Muhammadiyah 01	-

⁸⁰ Data nilai hasil Ujian Nasional (UN) Tahun 2010/2011 diambil dari Kelompok Kerja Madrasah (KKM) Madrasah Aliyah se-Kota Tangerang Selatan.

9	MA Sunanul Husna	Dalam proses
10	MA Darussalam	-
11	MA Al-Manah Al-Gontory	B
12	MA Jamiyah Islamiyah	A
13	MA Hasanusholihat	B
14	MA Darul Hikmah	B
15	MA Ummul Quro	-
16	MA Khazanah Kebajikan	-

Tabel tersebut di atas memperlihatkan bahwa belum seluruh Madrasah Aliyah ini terakreditasi karena berbagai faktor antara lain belum memiliki wawasan dan keterampilan dalam menyusun dokumen akreditasi serta belum ada upaya untuk mengusulkannya.⁸¹

B. Profil Mutu Madrasah Aliyah

Untuk mengetahui profil mutu Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan, Banten, dapat diketahui melalui profil dari 8 standar yang dicapai sebagai berikut.

1. Standard Isi/Kurikulum

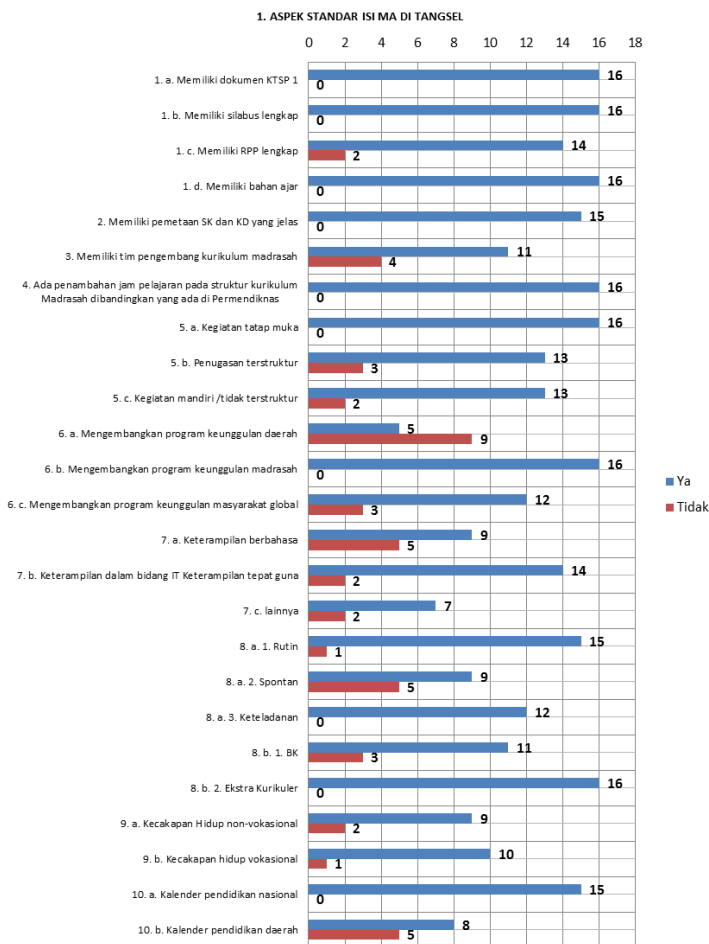
Kurikulum sebagai jantung pendidikan harus segera dimantapkan. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan, pengembangan silabus, pengembangan Rencana Program Pembelajaran (RPP), serta pengembangan sistem penilaian harus segera dilaksanakan dengan maksimal dengan hasil yang memuaskan.

Dengan melihat fungsi kurikulum sebagai referensi, panduan dan alat kontrol kualitas, maka kandungan kurikulum yang ideal harus diciptakan. Selain itu untuk menggali, memompa, dan meningkatkan bakat, potensi dan kompetensi

⁸¹ Data diperoleh dari Profil Madrasah Aliyah, hasil wawancara dengan pihak sekolah terkait dan observasi, yang dilaksanakan pada bulan Juli s.d Agustus 2011.

siswa, ekstra kurikuler harus dirancang dengan kegiatan-kegiatan yang mampu menggugah semangat belajar dan mengembangkan bakat. Manajemen ekstra kurikulum tidak dapat dinomorduakan atau dimarginalkan.

Selanjutnya jika konsep kurikulum yang ideal tersebut dihubungkan dengan hasil penelitian pada Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan menunjukkan keadaan sebagai berikut.



Data tersebut di atas menunjukkan: 1) kepemilikan KTSP (16/100%); 2) kepemilikan sillabus yang lengkap (16/100%); 3) kepemilikan RPP yang lengkap (14/88%); 4) kepemilikan bahan ajar 16/100%; 5) kepemilikan penetapan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang jelas (15/94%); 6) kepemilikan tim pengembang kurikulum madrasah (11/69%); 7) adanya penambahan jam pelajaran pada struktur kurikulum madrasah dibandingkan dengan yang ada di Permendiknas (16/100%); 8) adanya kegiatan tatap muka (16/100%); 9) adanya penugasan terstruktur (13/81%); 10) adanya kegiatan mandiri/tidak terstruktur (13/81%); 11) adanya pengembangan program keunggulan daerah (5/31%); 12) adanya pengembangan program keunggulan madrasah (16/100%); 13) adanya pengembangan program keunggulan masyarakat global (12/75%); 14) adanya program keterampilan berbahasa (9/56%); 15) adanya keterampilan dalam bidang IT keterampilan tepat guna (14/88%); 16) adanya kegiatan lainnya (7/44%); 17) adanya kegiatan rutin (15/94%); 18) adanya kegiatan spontan (9/56%); 19) adanya keteladanan (12/75%); 20) adanya bimbingan dan konseling (BK) (11/69%); 21) adanya ekstra kurikulum (16/100%); 22) adanya kecakapan hidup non vokasional (10/63%); 23) adanya kecakapan hidup vocational (10/63%); 24) adanya kalender pendidikan nasional (15/94%); dan 25) adanya kalender pendidikan daerah (8/50%).

Deskripsi tersebut di atas memperlihatkan, bahwa standar kurikulum yang digunakan oleh Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan adalah kurikulum yang berbasis kompetensi (KBK) dengan mengkombinasikan kekuatan lokal serta penguatan identitas Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama. Berbagai ciri khas sebagai kurikulum KBK sudah nampak digunakan dengan tingkat di atas 75%. Hal ini antara lain dapat dilihat pada penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), sillabus, RPP, bahan ajar, tatap muka, pengembangan ekstra kurikuler, kegiatan mandiri, ciri keunggulan madrasah, penggunaan information technology

(IT), ekstra kurikuler yang disertai dengan adanya keteladan dari para tenaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan telah masuk ke dalam paradigma kurikulum pendidikan yang unggul.

2. Standar Proses Belajar Mengajar

Era globalisasi seperti yang ada saat ini menuntut adanya perlakuan yang lebih demokratis, manusiawi, egaliter, dan adil kepada setiap manusia, termasuk kepada peserta didik. Hal ini sebagai bagian dari tuntutan perlakuan yang baik terhadap hak-hak asasi manusia yang semakin meningkat, sebagai bagian dari isu globalisasi.

Tuntutan era globalisasi yang demikian itu memiliki dampak yang luas terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk terhadap seluruh aspek pendidikan, yang di dalamnya terdapat aspek proses belajar mengajar. Untuk itu, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 telah menetapkan standar proses.

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PPRI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat 6). Adapun PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Proses dituangkan dalam Bab IV, yaitu mencakup aspek: a) perencanaan proses pembelajaran; b) pelaksanaan proses pembelajaran; c) penilaian hasil pembelajaran, dan d) pengawasan proses pembelajaran.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam proses pembelajaran, pendidik memberikan keteladanan.

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

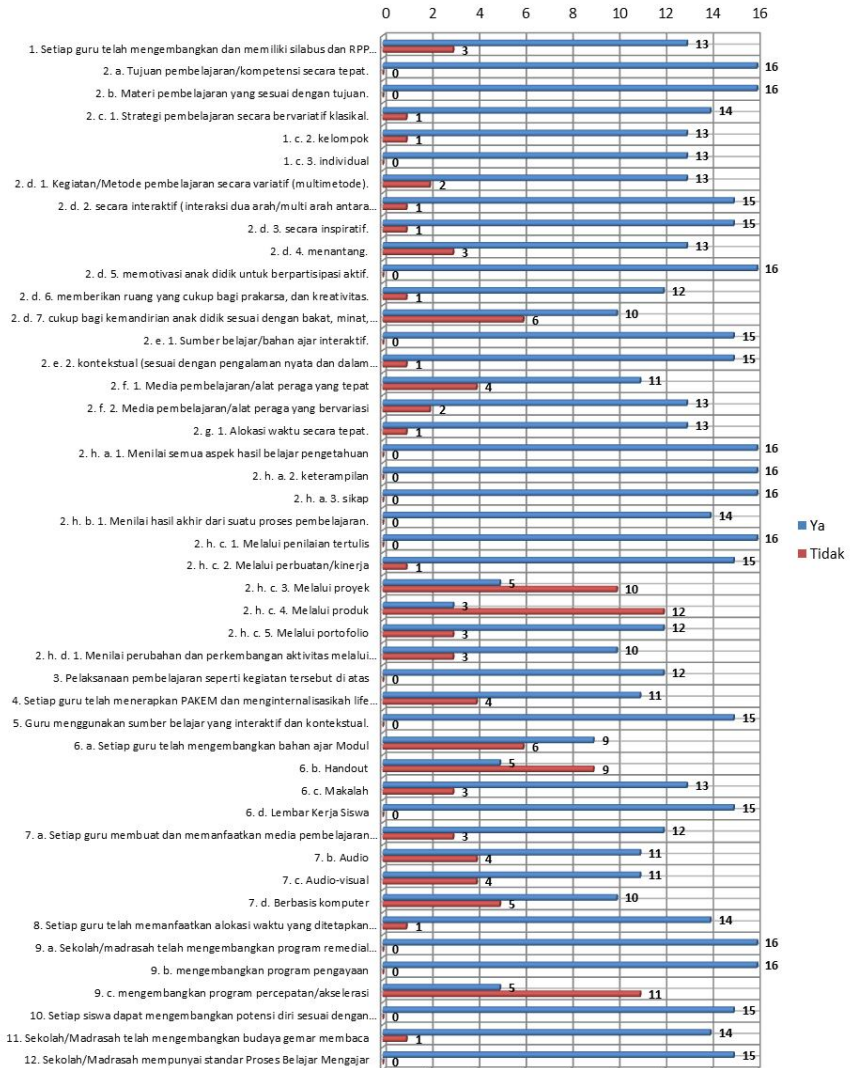
Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.

Pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal per pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap peserta didik, dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya membaca dan menulis.

Adapun penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan menengah menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Untuk mata pelajaran selain kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu semester.

Selanjutnya jika standar proses tersebut digunakan untuk menilai proses pendidikan yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan, menunjukkan keadaan sebagai berikut.

2. ASPEK STANDAR PROSES



Data tersebut di atas menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: 1)adanya guru yang mengembangkan dan memiliki silabus dan RPP secara lengkap (13/81%); 2)adanya RPP setiap mata pelajaran menurut tujuan pembelajaran/kompetensi secara tepat (16/100%); 3)adanya RPP setiap mata pelajaran memuat materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan (14/88%); 4)adanya strategi pembelajaran secara bervariasi klasikal (14/88%); 5)adanya strategi pembelajaran secara bervariasi secara individual (13/81%); 6)adanya kegiatan/metode pembelajaran secara interaktif dua arah/multi arah antara guru-murid, dan murid-murid (15/94%); 7)adanya kegiatan/metode pembelajaran secara inspratif (15/94%); 8)adanya kegiatan/metode pembelajaran yang menantang (13/81%); 9)adanya kegiatan/metode pembelajaran yang memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, dan kreativitas (12/75%); 10)adanya kegiatan/metode pembelajaran yang memberikan ruang yang cukup bagi kemandirian anak didik sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan anak (10/63%); 11)adanya sumber belajar/bahan ajar kontekstual (sesuai dengan pengalaman nyata dan dalam konteks dunia nyata) (10/63%); 12)adanya media pembelajaran/alat praga yang tepat (11/69%); 13)adanya media pembelajaran/alat peraga yang bervariasi (13/81%); 14)adanya media pembelajaran/alat peraga yang alokasi waktunya secara tepat (13/81%); 15)adanya penilaian terhadap semua aspek hasil belajar pengetahuan (16/100%); 16)adanya penilaian semua hasil belajar keterampilan (16/100%); 17)adanya penilaian terhadap semua aspek hasil belajar sikap (16/100%); 18)adanya penilaian hasil akhir dari suatu proses pembelajaran; 17)adanya penilaian perubahan dan perkembangan aktivitas melalui penilaian tertulis (16/100%); 18)adanya penilaian perubahan dan perkembangan aktivitas melalui perbuatan/kinerja (15/94%); 19)adanya penilaian terhadap perubahan dan perkembangan aktivitas melalui proyek (5/31%); 20)adanya penilaian dan perkembangan aktivitas melalui produk (12/75%); 21)adanya penilaian terhadap

perubahan dan perkembangan aktivitas melalui portofolio (12/75%); 22) adanya penilaian terhadap perubahan dan perkembangan aktivitas melalui kriteria penilaian acuan patokan (PAP) (10/70%); 23) adanya pelaksanaan pembelajaran seperti kegiatan tersebut di atas (12/75%); 24) adanya setiap guru telah menerapkan PAKEM dan menginternalisasikan life skill, dalam proses pembelajaran (11/69%); 25) adanya guru yang menggunakan sumber belajar yang integratif dan kontekstual (15/94%); 26) adanya setiap guru telah mengembangkan bahan ajar handout (5/31%); 27) adanya setiap guru yang telah mengembangkan bahan ajar Makalah (15/94%); 28) adanya setiap guru yang telah mengembangkan bahan ajar lembar kerja siswa (15/94%); 29) adanya setiap guru yang membuat dan memanfaatkan media pembelajaran visual (12/75%); 30) adanya setiap guru yang membuat dan memanfaatkan media pembelajaran audio visual (11/69%); 31) adanya setiap guru yang membuat dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis komputer (10/63%); 32) adanya setiap guru yang telah memanfaatkan alokasi waktu yang ditetapkan sesuai dengan tingkat keluasaan serta kedalaman materi dan indikator (14/88%); 33) adanya sekolah/madrasah telah mengembangkan program remedial teaching (16/100%); 34) adanya sekolah/madrasah telah mengembangkan program percepatan/akselerasi (5/31%); 35) adanya setiap siswa dapat mengembangkan potensi diri sesuai dengan bakat dan minatnya (15/94%); 36) adanya sekolah/madrasah telah mengembangkan budaya gemar membaca (14/88%), dan 37) adanya sekolah/madrasah mempunyai standar proses belajar mengajar (15/94%).

Deskripsi tersebut di atas menunjukkan, bahwa Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan telah menggunakan standar proses pembelajaran yang mengarah pada dihasilkannya lulusan yang unggul dan terbina seluruh potensi dirinya. Selain itu, proses pembelajaran tersebut juga telah sesuai dengan prinsip pembelajaran yang sejalan dengan meningkatnya tuntutan terhadap perlakuan hak-hak asasi

manusia secara lebih demokratis, adil, egaliter, manusia, partisipatif, aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Keadaan tersebut dapat dilihat pada penerapan sejumlah komponen penerapan proses belajar mengajar yang unggul yang berada di atas 60% dari jumlah Madrasah Aliyah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Hal ini dapat dilihat pada adanya guru yang menggunakan silabus, Rencana Proses Pembelajaran (RPP) pada setiap mata pelajaran yang sesuai dengan tujuan yang direncanakan, penggunaan strategi pembelajaran yang variatif, seperti penggunaan metode pembelajaran yang interaktif, individual, inspiratif, menantang, membangkitkan kreatifitas, penggunaan pendekatan contextual teaching learning (CTL), penggunaan media pembelajaran. Selain itu, dalam proses pembelajaran juga memperhatikan penguasaan aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), serta adanya penilaian pada seluruh aspek, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik, dengan menggunakan lembar kerja, pembuatan karya tulis (makalah), penggunaan audio visual, dan media pembelajaran lainnya.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan (SKL) adalah bagian dari standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria kompetensi lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan SKL, lembaga pendidikan akan memiliki patok mutu (*benchmark*) baik bersifat evaluasi mikro seperti kualitas proses dan kualitas produk maupun bersifat evaluasi makro seperti efektivitas dan efisiensi suatu program pendidikan, sehingga ke depan pendidikan akan melahirkan standar mutu yang dapat dipertanggung jawabkan pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

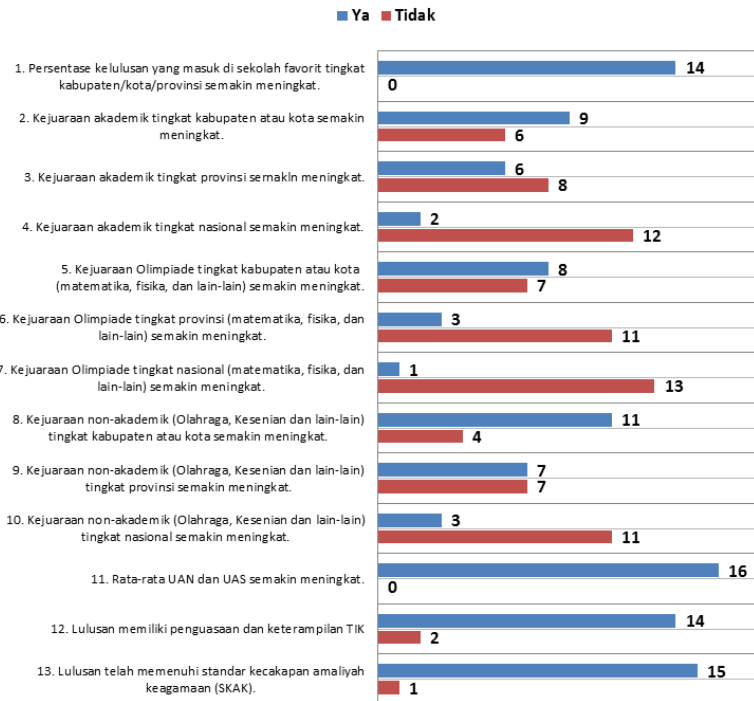
SKL yang dijabarkan ke dalam standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran digunakan sebagai pedoman penilaian. SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan

yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. SKL mencakup standar kompetensi lulusan satuan pendidikan (SKL-SP), standar kompetensi kelompok mata pelajaran (SK-KMP), dan standar kompetensi mata pelajaran (SK-MP).

SKL mempunyai tiga fungsi utama, yaitu (1) kriteria dalam menentukan kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan, (2) rujukan untuk menyusun standar pendidikan lainnya, dan (3) arah peningkatan kualitas pendidikan.

Jika dihubungkan dengan standar kompetensi lulusan yang terdapat pada Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan, keadaan menunjukkan sebagai berikut:

3 . ASPEK STANDAR KOMPETENSI LULUSAN



Data tersebut di atas menunjukkan: 1) persentase kelulusan yang masuk di sekolah favorit tingkat nasional (14/88%); 2) adanya kejuaraan akademik tingkat kabupaten atau kota semakin meningkat (9/56%); 3) adanya kejuaraan akademik tingkat provinsi semakin meningkat (6/38%); 4) adanya kejuaraan akademik tingkat nasional semakin meningkat (2/13%); 5) adanya kejuaraan olimpiade tingkat kabupaten atau kota (matematika, fisika dan lainnya) (8/50%); 6) adanya kejuaraan olimpiade tingkat provinsi (matematika, fisika dan lain-lain) semakin meningkat (3/19%); 7) adanya kejuaraan tingkat nasional (matematika, fisika, dan lain-lain) semakin meningkat (1/6%); 8) adanya kejuaraan non akademik (olahraga, kesenian dan lain-lain) tingkat kabupaten semakin meningkat (11/69%); 9) adanya kejuaraan non akademik (olahraga, kesenian dan lain-lain) tingkat provinsi semakin meningkat (7/44%); 10) adanya kejuaraan non akademik (olahraga, kesenian dan lain-lain) tingkat nasional (3/19%); 11) adanya rata-rata UAN dan UAS semakin meningkat (16/100%); 12) adanya lulusan memiliki penguasaan dan keterampilan TIK (14/88%); 13) Adanya lulusan telah memenuhi kecakapan amaliyah keagamaan (SKAK) (15/94%).

Deskripsi tersebut di atas memperlihatkan bahwa mutu lulusan Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan sudah tergolong tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hasil ujian nasional (UN) yang mencapai 100%, penguasaan terhadap IT (information technology) yang cukup tinggi, serta amaliyah keagamaan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa Madrasah Aliyah sebagai sekolah umum yang berciri keagamaan sudah dapat dipenuhi. Keunggulan tersebut juga masih dapat diperlihatkan oleh lulusan Madrasah Aliyah yang lulus dalam ujian memasuki sekolah favorit. Selain itu, para lulusan juga telah ikut dalam berbagai kejuaraan yang bersifat akademik (matematika, fisika dan lainnya), serta kejuaraan non akademik (olah raga dan seni) baik pada tingkat kabupaten,

propinsi, maupun nasional, walaupun hasil dari berbagai kejuaran olimpiade akademik dan non akademik ini belum mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Namun berbagai kejuaran akademik dan non akademik tersebut tidak mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lulusan Madrasah Aliyah yang menekankan pada hasil ujian nasional (UN) serta diterimanya untuk masuk pada perguruan tinggi pavorit.

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13, serta PP 19 Pasal 1 ayat 1.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.⁸²

Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.⁸³ Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar.⁸⁴

Kompetensi yang harus dimiliki guru adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

⁸² Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab I, Pasal 1, ayat 5 dan 6.

⁸³ Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI, Pasal 39 ayat 1.

⁸⁴ Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab XI, Pasal 39, ayat 1.

kompetensi profesional melalui pendidikan profesi. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik dari perguruan tinggi terakreditasi yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: a)kompetensi pedagogik; b)kompetensi kepribadian; c)kompetensi profesional; dan c)kompetensi sosial.

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

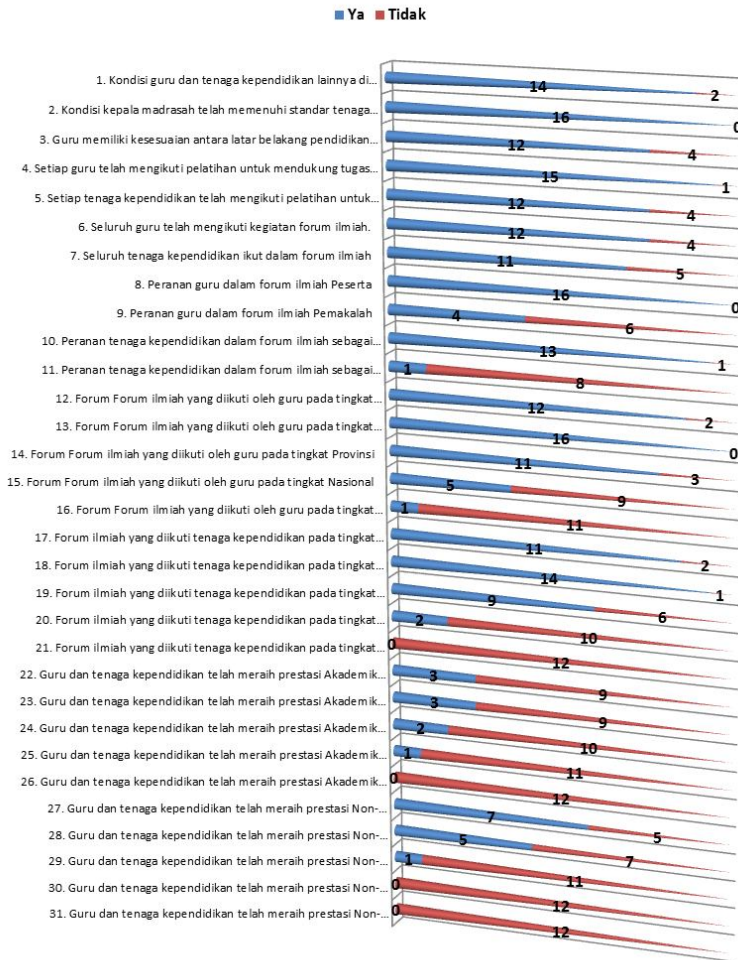
Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.⁸⁵

Jika konsep standar mutu tenaga pendidik tersebut dihubungkan dengan kondisi guru Madrasah Aliyah se Kota Tangerang Selatan, menunjukkan keadaan sebagai berikut:

⁸⁵ Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Menjadi Sekolah Berstandar Nasional dan Internasional*, (Jogjakarta:Harmoni, 2011), cet. I, hal.98.

4. ASPEK STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



Data tersebut di atas menunjukkan: 1) kondisi guru dan tenaga kependidikan lainnya di sekolah/madrasah telah memenuhi standar nasional pendidik dan tenaga kependidikan (14/88%); 2) kondisi kepala madrasah telah memenuhi standar tenaga kependidikan (16/100%); 3) guru memiliki kesesuaian

antara lain latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang dipegang di sekolah/madrasah (12/75%); 4) setiap guru telah mengikuti pelatihan untuk mendukung tugas profesionalnya (15/94%); 5) setiap tenaga kependidikan telah mengikuti pelatihan untuk mendukung tugas profesionalnya (12/75%); 6) seluruh guru telah mengikuti kegiatan forum ilmiah (12/75%); 7) seluruh tenaga kependidikan ikut dalam forum ilmiah (11/69%); 8) peran guru dalam forum ilmiah sebagai peserta (16/100%); 9) peran guru dalam forum ilmiah sebagai pemakalah (4/25%); 10) peran tenaga kependidikan dalam forum ilmiah sebagai peserta (13/81%); 11) peran tenaga kependidikan dalam forum ilmiah sebagai pemakalah (1/6%); 12) adanya forum ilmiah yang diikuti guru tingkat kecamatan (12/75%); 13) adanya forum ilmiah yang diikuti guru tingkat kota/kabupaten (16/100%); 14) adanya forum ilmiah yang diikuti guru tingkat provinsi (11/69%); 15) Adanya forum ilmiah yang diikuti guru tingkat nasional (5/31%); 16) adanya forum ilmiah yang diikuti guru tingkat internasional (1/6%); 17) adanya forum ilmiah yang diikuti tenaga kependidikan tingkat kecamatan (11/69%); 18) adanya forum ilmiah yang diikuti tenaga kependidikan tingkat kota/kabupaten (14/88%); 19) adanya forum ilmiah yang diikuti tenaga kependidikan tingkat provinsi (9/56%); 20) adanya forum ilmiah yang diikuti tenaga kependidikan tingkat nasional (2/13%); 21) adanya forum ilmiah yang diikuti tenaga kependidikan tingkat internasional (0/0%); 22) adanya guru sekolah/madrasah yang telah meraih prestasi non akademik tingkat kecamatan (3/19%); 23) adanya guru sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan telah meraih prestasi akademik tingkat kota/kabupaten (3/19%); 24) guru sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan telah meraih prestasi akademik tingkat provinsi (2/13%); 25) adanya guru sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan telah meraih prestasi akademik tingkat Nasional (1/6 %); 26) adanya guru sekolah/madrasah yang telah meraih prestasi akademik tingkat internasional (0/0%); 27) adanya guru sekolah/madrasah yang telah meraih prestasi non akademik tingkat kecamatan (7/44%);

28) adanya guru sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan telah meraih prestasi non akademik tingkat kota/kabupaten (5/31%); 29) guru sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan telah meraih prestasi non akademik tingkat provinsi (1/6%); 30) adanya guru sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan telah meraih prestasi Non Akademik tingkat Nasional (0/0%); 31) adanya guru sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan yang telah meraih prestasi non akademik tingkat internasional (0/0%).

Deskripsi tersebut di atas memperlihatkan, bahwa tenaga pendidik dan kependidikan Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan telah mencapai standar mutu yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada sejumlah kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan di atas rata-rata 75%. Yaitu dalam hal memenuhi standar profesi, standar sebagai kepala sekolah, kesesuaian latar belakang keahlian guru dengan bidang ilmu yang diajarkannya, keikutsertaan guru dalam mengikuti pelatihan sebagai tenaga pendidikan. Selain itu, para guru juga sudah memiliki pengalaman dalam mengikuti berbagai forum ilmiah, baik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional, walaupun keikutsertaan mereka itu lebih banyak sebagai peserta, serta semakin tinggi tingkat forum ilmiah yang diikuti semakin kecil jumlah peserta yang ikut.

Keadaan mutu tenaga pendidik (guru) yang tergolong unggul tersebut sejalan dengan keunggulan yang dicapai pada kelulusan dalam ujian nasional yang mencapai 100%, keberhasilan lulusan dalam memasuki perguruan tinggi papan atas, seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sebagainya. Keadaan tenaga pendidik yang unggul tersebut juga dapat dilihat dari adanya proses belajar mengajar yang bervariasi dan memberdayakan peserta didik.

5. Standar Sarana Prasarana

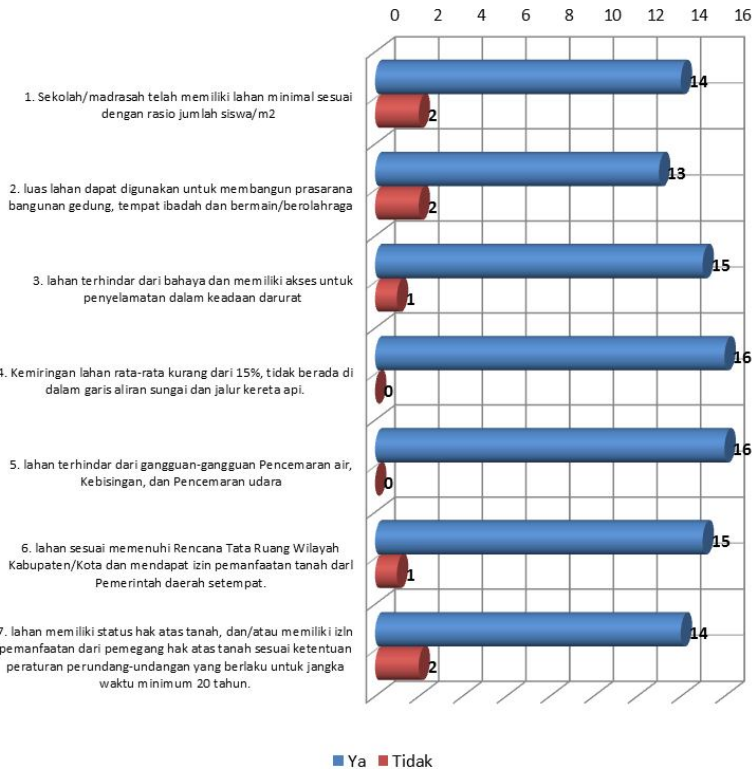
Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, tempat berolah-raga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar sarana dan prasarana mencakup:

1. Pengadaan satuan pendidikan.
2. Kelengkapan prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan gedung, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan.
3. Kelengkapan sarana yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan.

Jika standar Sarana Prasarana tersebut dihubungkan dengan kondisi sarana dan prasarana Madrasah Aliyah se Kota Tangerang Selatan, menunjukkan keadaan sebagai berikut:

5.1. ASPEK STANDAR SARANA DAN PRASARANA

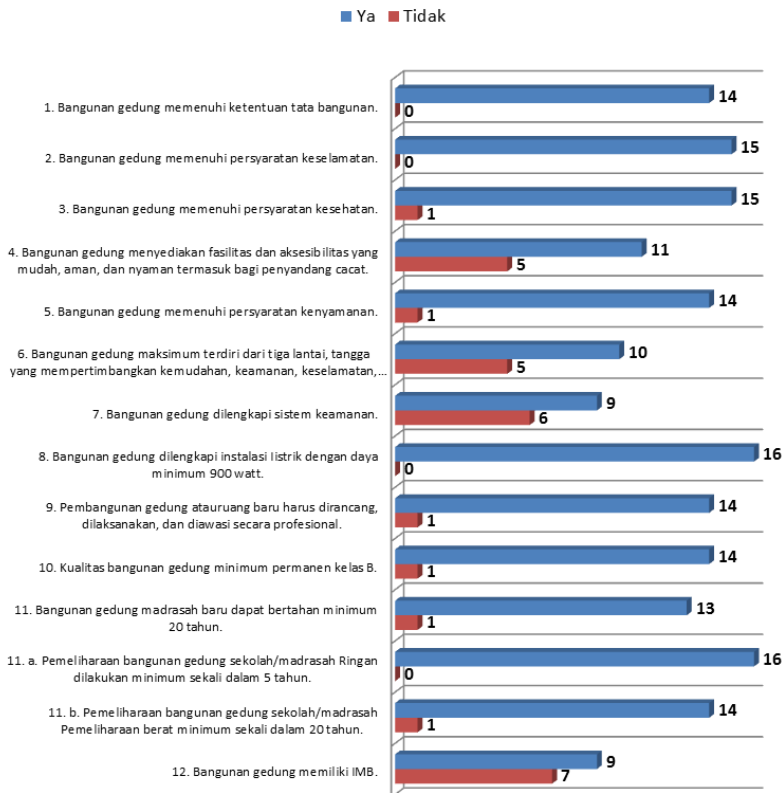


Data tersebut di atas menunjukkan: 1)sekolah/madrasah telah memiliki lahan minimal sesuai dengan rasio jumlah siswa/m² (14/88%); 2)luas lahan dapat digunakan untuk membangun prasarana bangunan gedung, tempat ibadah dan bermain/berolahraga (13/81%); 3)lahan terhindar dari bahaya dan memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat (15/94%); 4)kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam garis aliran sungai dan jalur kereta api (16/100%); 5)lahan terhindar dari gangguan-gangguan Pencemaran air, Kebisingan, dan Pencemaran udara (16/100%); 6)lahan sesuai memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan mendapat izin pemanfaatan tanah darl Pemerintah daerah

setempat (15/94%); 7) lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun (14/88%).

Sedangkan mengenai standar sarana dan prasarana dapat dibaca pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007 dihubungkan dengan kondisi sarana dan prasarana Madrasah Aliyah se Kota Tangerang Selatan, menunjukkan keadaan sebagai berikut:

5.2. Mengenai standar sarana dan prasarana pada Permendiknas nomor 24 tahun 2007



Data tersebut di atas menggambarkan: 1) bangunan gedung memenuhi ketentuan tata bangunan (14/88%); 2) bangunan gedung memenuhi persyaratan keselamatan (15/94%); 3) bangunan gedung memenuhi persyaratan kesehatan (15/94%); 4) bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat (11/69%); 5) bangunan gedung memenuhi persyaratan kenyamanan (14/88%); 6) bangunan gedung maksimum terdiri dari tiga lantai, tangga yang mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna (10/63%); 7) bangunan gedung dilengkapi sistem keamanan (9/56%); 8) bangunan gedung dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt (16/100%); 9) pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara profesional (14/88%); 10) kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B (14/88%); 11) bangunan gedung madrasah baru dapat bertahan minimum 20 tahun (13/81%); 11.a) pemeliharaan bangunan gedung sekolah/madrasah Ringan dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun (16/100%); 11.b) pemeliharaan bangunan gedung sekolah/madrasah Pemeliharaan berat minimum sekali dalam 20 tahun (14/88%); 12) bangunan gedung memiliki IMB (9/56%).

Deskripsi data sebagaimana terlihat di atas memperlihatkan bahwa sarana prasarana Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan telah mencapai mutu yang unggul. Hal ini antara lain dapat dilihat dari adanya berbagai standar sarana prasarana yang unggul di atas 60% Madrasah Aliyah yang ada di Kota Tangerang Selatan, yaitu tata bangunan, persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, mudah diakses (termasuk oleh yang cacat), aman, nyaman. Bangunan Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan juga lebih dari 63% yang sudah mencapai 3 lantai, yang dilengkapi dengan listrik 900 Watt, dibangun oleh tenaga profesional, bangunan dengan kualitas kelas B, dapat bertahan lebih dari 20 tahun, dan pada dilakukan pemeliharaan pada setiap 5 tahun sekali.

Keadaan sarana prasarana yang demikian itu juga sejalan dengan terlaksananya kegiatan belajar mengajar dengan hasil lulusan yang cukup baik sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat antara keadaan sarana prasarana, tenaga pendidik dan , mutu lulusan.

6. Pedoman/Standar Pengelolaan yang Dimiliki Sekolah

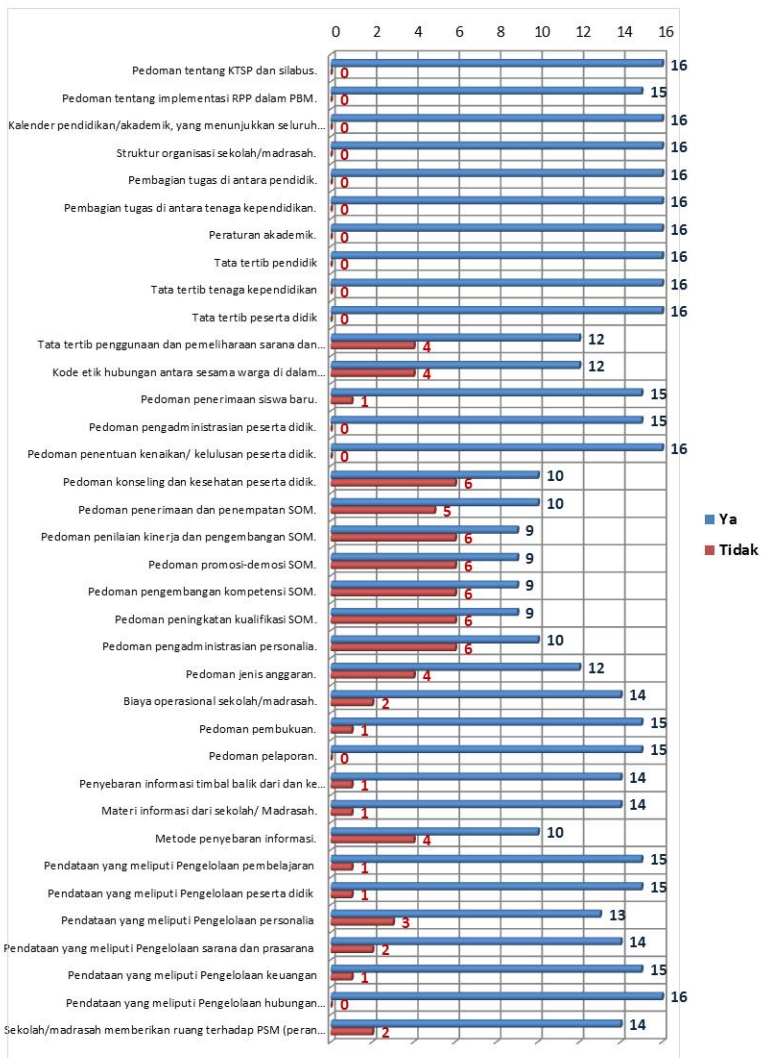
Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi (1)perencanaan program sekolah/madrasah; (2)pelaksanaan rencana kerja sekolah; (3)monitoring dan evaluasi; (4)kepemimpinan sekolah/madrasah; dan (5)sistem informasi manajemen.

Di dalam pengelolaan ini termasuk berbagai macam pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan, standar operating prosedut (SOP), dan berbagai ketentuan pelaksanaan teknis lainnya. Secara umum standar pengelolaan pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan minimal pengelolaan pendidikan nasional. Secara khusus, standar pengelolaan pendidikan bertujuan: (a)memberikan acuan bagi terwujudnya sistem perencanaan pendidikan pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota serta pada tingkat satuan pendidikan/sekolah secara terkordinasi dan terpadu untuk mampu mengantisipasi aspirasi-aspirasi peningkatan mutu pendidikan; (b)memberikan kerangka acuan bagi pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian pendidikan, sejalan dengan tuntutan peningkatan mutu dn standar pelayanan pendidikan pada semua bentuk, jenis, dan jenjang pendidikan; (c)sebagai acuan dasar pengawasan dan penilaian pendidikan yang relevan dan konsisten dengan sistem perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan pada

tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten dan pada tingkat satuan pendidikan; (d)memberikan pedoman kepada seluruh warga bangsa dan khususnya yang berkiprah dalam pengelolaan pendidikan bagaimana merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau, mengawasi, mengendalikan, dan menilai program pendidikan secara efisien, efektif, baik dan benar; dan (e)menciptakan terwujudnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan amanah pendidikan bagi semua rakyat (education for all) baik secara vertikal maupun horizontal antara seluruh unsur kelembagaan yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab dalam pendidikan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, kabupaten/kota dan satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan pada tingkat nasional, daerah, lokal dan individual.⁸⁶ Hasil penelitian terhadap standar mutu pengelolaan Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan, menggambarkan keadaan sebagai berikut.

⁸⁶ Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Menjadi Sekolah Berstandar Nasional dan Internasional*, (Jogjakarta:Harmoni, 2011), cet. II, hal.104-108)

6. JENIS PEDOMAN/STANDAR PENGELOLAAN



Grafik tersebut memperlihatkan keadaan sebagai berikut: (1)KTS/Syllabus (16/100%); (2)pedoman RPP/PBM (15/905); (3)kalender akademik (16/100%); (4)struktur organisasi

(16/100%); (5) pembagian tugas di antara pendidik (16/100%); (6) pembagian tugas di antara tenaga kependidikan (16/100%); (7) peraturan akademik (16/100%); (8) tata tertib pendidik (16/100%); (8) tata tertib tenaga kependidikan (16/100%); (9) tata tertib penggunaan dan pemeliharaan sarana (12/80%); (10) Kode etik hubungan antara semua warga sekolah (12/75%); (11) pedoman penerimaan siswa baru (15/85%); (12) pedoman pengadministrasian peserta didik (15/85%); (13) pedoman penetapan kenaikan kelas/kelulusan (16/100%); (14) pedoman konseling dan kesehatan peserta didik (10/65%); (15) pedoman penerimaan dan penetapan SDM (10/65); (16) pedoman penilaian kinerja dan pengembangan SDM (9/60%); (17) pedoman promosi SDM (9/60%); (18) pedoman pengembangan kompetensi SDM (9/60%); (19) pedoman peningkatan kualifikasi SDM (9/60%); (20) pedoman administrasi personalia (6/40%); (21) pedoman jenis anggaran (12/75%); (21) pedoman biaya operasional sekolah (14/80%); (22) pedoman pembukuan (15/80%); (23) pedoman pelaporan (15/80%); (24) pedoman informasi (14/75%); (25) pedoman pendataan pengelolaan pembelajaran (15/90%); (26) pedoman pengelolaan personalia (13/70%); (27) pedoman sarana prasarana (14/75%); (28) pedoman keuangan (15/90%).

Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa pengelolaan Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan telah mencapai mutu pengelolaan yang sesuai dengan standar mutu pengelolaan pendidikan sebagaimana tersebut di atas. Semua aspek yang mendukung kegiatan pembelajaran telah diatur pedoman pengelolannya sesuai dengan kaidah pengelolaan yang berlaku. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pedoman pengelolaan pendidikan yang dimiliki oleh lebih dari 70% Madrasah Aliyah yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Yaitu pedoman tentang penyusunan sillabus/KTSP, RPP, PBM, Kalender akademik, struktur organisasi, pembagian tugas di antara pendidik dan tenaga kependidikan, pedoman akademik, tata tertib pendidik dan tenaga kependidikan, pedoman

penggunaan dan pengelolaan sarana prasarana, kode etik hubungan antara sesama warga sekolah, pedoman penerimaan peserta didik, pedoman kenaikan kelas/kelulusan, pedoman konseling dan kesehatan, penerimaan dan penempatan SDM, pedoman penilaian kinerja dan pengembangan SDM, promosi SDM, pengembangan kompetensi SDM, peningkatan kualifikasi SDM, administrasi personalia, pedoman jenis anggaran, biaya operasional sekolah, pedoman pembukuan, pelaporan, informasi, pendataan pengelolaan pembelajaran, pengelolaan personalia dan keuangan.

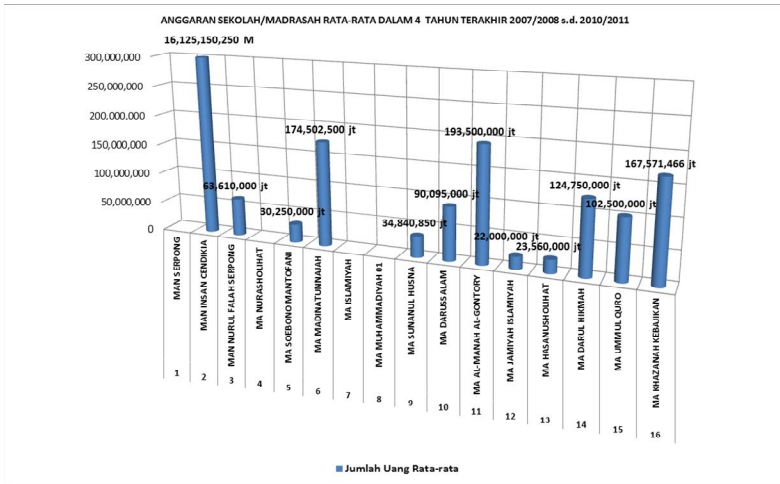
Adanya mutu pengelolaan Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan yang sudah baik itu sejalan pula dengan adanya mutu proses belajar mengajar, mutu lulusan tersedianya sarana prasarana, serta tenaga pendidikan dan kependidikan yang bermutu.

7. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal atau belanja pegawai.⁸⁷

Data hasil penelitian terhadap mutu standar pembiayaan pada Madrasah Aliyah memperlihatkan keadaan sebagai berikut.

⁸⁷ Lihat Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Menjadi Sekolah Berstandar Nasional dan Internasional*, op, cit, hal. 118.



Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 16 Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan yang diteliti, yakni 16 Madrasah, yang mengemukakan keadaan keuangannya hanya 12 Madrasah, dengan urutan dan jumlah keuangannya dalam rata-rata pertahun sebagai berikut. (1)Rp.16.125.150.250; (2)Rp.193.500.000; (3)Rp.174.50.500,- (4)Rp. 167.571.466; (5)Rp.124.750.000,- (6)Rp.102.500.000,- (7)90.095.000; (8)63.610.000; (9)34.840.850; (10)30.250.000; (11)Rp. 23.560.000,- (12)Rp. 22.000.000,-

Uraian tersebut memperlihatkan dengan jelas tentang kemampuan keuangan Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan yang dapat menjamin terlaksananya kegiatan belajar mengajar secara berkelanjutan. Adanya perbedaan anggaran pada masing-masing madrasah tersebut secara berbeda-beda nampaknya tidak menjadi halangan bagi berjalannya kegiatan pembelajaran dengan hasil yang baik, proses belajar mengajar, serta tersedianya sarana prasarana pembelajaran.

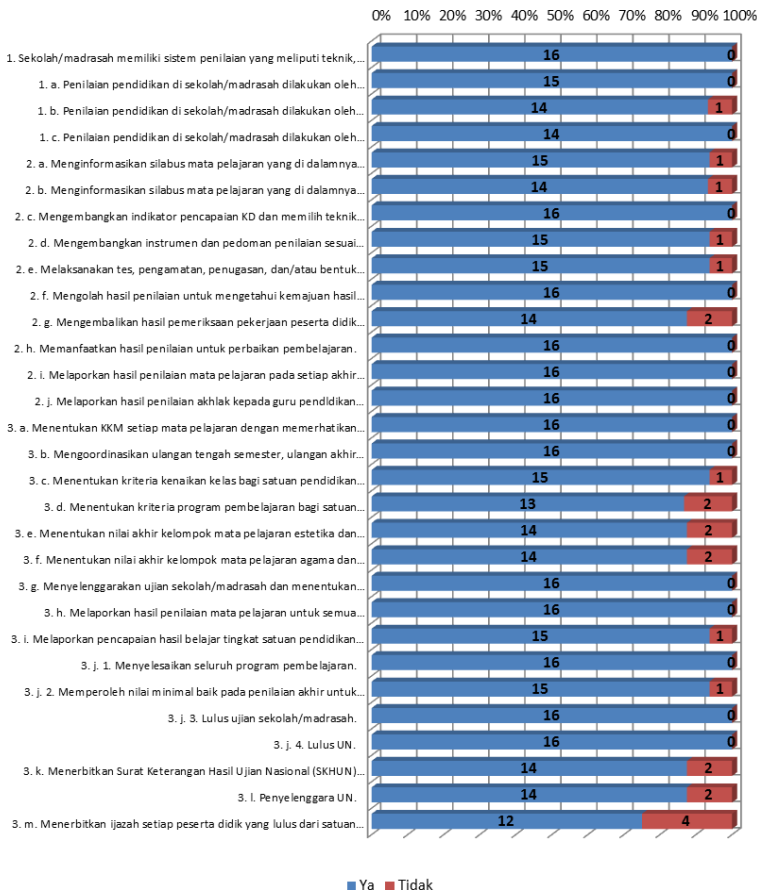
8. Standar Penilaian Pendidikan

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik (PP Nomor 19 2005). Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. Sementara, akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Jika standar penilaian pendidikan tersebut dihubungkan dengan kondisi penilaian pendidikan Madrasah Aliyah se Kota Tangerang Selatan, menunjukkan keadaan sebagai berikut:

8. ASPEK STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN



Data tersebut di atas menunjukkan keadaan sebagai berikut: 1) sekolah/madrasah memiliki sistem penilaian yang meliputi teknik, jenis, dan bentuk penilaian sesuai dengan standar penilaian pendidikan (16/100%); 2) penilaian pendidikan di sekolah/madrasah dilakukan oleh Pendidik (15/94%); 3) penilaian pendidikan di sekolah/madrasah dilakukan oleh Satuan Pendidikan (14/88%); 4) penilaian pendidikan di sekolah/madrasah dilakukan oleh Pemerintah (14/88%);

5)menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat Rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester (15/94%); 6)menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester (14/88%); 7)mengembangkan indikator pencapaian KD dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran (16/100%); 8)mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih (15/94%); 9)melaksanakan tes, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan (15/94%); 10)mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik (16/100%); 11)mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan/komentar yang mendidik(14/88%); 12)memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran (16/100%); 13)melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi utuh (16/100%); 14)melaporkan hasil penilaian akhlak kepada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian kepada guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik, baik, atau kurang baik (16/100%); 15)menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan memerhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik (16/100%); 16)mengoordinasikan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas (16/100%); 17)menentukan kriteria kenaikan kelas bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem paket melalui rapat dewan pendidik (15/94%); 18)menentukan kriteria program pembelajaran bagi satuan pendidikan yang menggunakan sistem kredit semester melalui rapat dewan pendidik (13/81%); 19)menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran estetika

dan kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik (16/100%); 20)menentukan nilai akhir kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui rapat dewan pendidik dengan mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan nilai hasil ujian sekolah/madrasah (14/88%); 21)menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS ujian sekolah/madrasah bagi satuan pendidikan penyelenggara UN (16/100%); 22)melaporkan hasil penilaian mata pelajaran untuk semua kelompok mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku laporan pendidikan (16/100%); 23)melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota (15/94%); 24)menyelesaikan seluruh program pembelajaran (16/100%); 25)memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; kelompok mata pelajaran estetika; dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan (15/94%); 26)lulus ujian sekolah/madrasah (16/100%); 27)lulus UN (16/100%); Menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN); 28)setiap peserta didik yang mengikuti Ujian Nasional bagi satuan pendidikan (14/88%); 29)penyelenggara UN (14/88%); 30)menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan penyelenggara UN (12/75%).

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa penilaian pada seluruh Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan sudah berjalan sesuai dengan standar evaluasi. Hal ini terlihat dari adanya lebih dari 70 Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan yang memiliki sistem penilaian bukan hanya pada hasil belajar

mengajar, melainkan juga penilaian pada proses serta berbagai aspek lainnya yang terkait. Di antara hasil penilaian tersebut yang terpenting adalah adanya hasil Ujian Nasional yang sudah mencapai 100%. Namun sekolah yang melaporkan hasil UN-nya dalam penelitian ini hanya 12 Madrasah Aliyah atau sekitar 75%. Berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Banten, dan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, tingkat kelulusan UN pada Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan mencapai 100%.⁸⁸

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Kemnterian Agama Propinsi Banten, dan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 5 Juli 2011.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisa serta hubungannya dengan permasalahan penelitian sebagaimana tersebut pada bab pendahuluan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, bahwa persepsi dan perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari adanya jumlah Madrasah Aliyah Negeri yang dibangun oleh pemerintah, dan Madrasah Aliyah Swasta yang dibangun oleh masyarakat. Karena jumlah Madrasah Swasta yang didirikan oleh masyarakat lebih banyak dari Madrasah Aliyah yang dibangun oleh pemerintah, maka dapat dikatakan, bahwa perhatian masyarakat terhadap Madrasah Aliyah jauh lebih besar dibandingkan dengan perhatian pemerintah. Keadaan ini menunjukkan adanya watak dasar proses kelahiran madrasah yang berasal dari rahim masyarakat yang berpegang teguh pada agama. Madrasah yang dibangun oleh masyarakat pada awalnya adalah karena ingin melahirkan manusia yang mengetahui, menghayati, mengamalkan, dan memelihara tradisi agama.

Kedua, bahwa seluruh Madrasah Aliyah yang berada di Kota Tangerang Selatan telah merespon secara aktif dan produktif terhadap tantangan era globalisasi yang mengharuskan pendidikan dalam keadaan unggul dan terdepan dalam menghasilkan manusia yang kreatif, inovatif, dan

progressif yang didukung oleh wawasan, pengalaman, dan keterampilan yang ditopang oleh *technical skill*, *conceptual skill*, *communication skill*, *leadership skill*, *moral skill* dan *spiritual skill*. Respon Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan terhadap tantangan era globalisasi ini tidak sampai menghilangkan identitas dan ciri utamanya sebagai sekolah umum yang berciri khas keagamaan. Dengan demikian dalam arus globalisasi tersebut tidak perlu ada kekhawatiran terhadap jati diri Madrasah Aliyah. Ciri keseimbangan dan adanya jati diri yang demikian pada Madrasah Aliyah yang ada di Kota Tangerang Selatan yang demikian itu dibuktikan pula oleh adanya animo dan pilihan masyarakat untuk lebih memiliki Madrasah Aliyah daripada Sekolah Umum sebagai tempat menimba ilmu bagi para putera-puterinya. Alasannya adalah, karena pada Madrasah Aliyah ini selain para siswa akan mendapatkan pengetahuan umum sebagaimana pada Sekolah Menengah Umum (SMU) juga akan mendapatkan pengetahuan, penghayatan dan pengamalan agama yang tidak didapat secara memuaskan pada Sekolah Menengah Umum (SMU).

Ketiga, bahwa secara umum mutu pendidikan Madrasah Aliyah yang terdapat di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik. Hal ini didasarkan pada adanya sejumlah temuan sebagai berikut.

- 1) Seluruh Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan telah mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan (SNP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dengan tingkat pencapaian yang bervariasi. Tingkat pencapaian tersebut meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian. Penerapan standar isi/kurikulum pada Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan antara lain ditandai oleh adanya penerapan kurikulum KTSP; pada standar proses sudah

menerapkan metode dan pendekatan yang variatif dengan berbasis pada pengajaran Paikem; standar kompetensi lulusan ditandai oleh hasil UAN yang 100% lulus; standar pendidik dan tenaga kependidikan ditandai oleh adanya tenaga pendidik yang mengajar sesuai dengan bidang keahliannya dan mencapai rasio yang ideal; standar sarana prasarana pendidikan ditandai oleh tersedianya gedung dan fasilitas pendidikan yang lengkap dan mudah diakses; standar pengelolaan sudah mengarah pada pengelolaan yang berbasis memuaskan pelanggan; standar pembiayaan ditandai oleh tersedianya dana yang mendukung keberlangsungan kegiatan proses belajar mengajar; dan standar penilaian yang ditandai oleh adanya penilaian pada seluruh komponen pendidikan.

- 2) Bahwa dari 16 Madrasah Aliyah yang ada di kota Tangerang Selatan yang sudah terakreditasi sebanyak 9 buah (60%) dengan nilai A sebanyak 3 buah (30%), dan nilai B 7 buah (70%). Yang sedang dalam proses akreditasi sebanyak 2 buah (15%), dan yang belum akreditasi sebanyak 5 buah, karena Madrasah Aliyah tersebut belum didirikan.
- 3) Bahwa dari 16 Madrasah yang ada di Kota Tangerang Selatan, pada tahun 2011 seluruhnya sudah mengikuti ujian nasional (UN). Namun yang berhasil diperoleh informasinya hanya 10 sekolah (62.5%), dengan tingkat pencapaian seluruhnya 100% lulus, dengan ketentuan di bidang IPA tertinggi nilai (10.00)= 1 sekolah. Sedangkan tiga sekolahnya, yakni MA Khazanah Kebajikan, MAN Serpong dan MA Jamiyah Islamiyah, mendapatkan nilai IPA masing-masing (9.75), (9.21), dan (9.00). Sedangkan 9 MA lainnya yang memperoleh nilai dalam bidang IPS adalah MA Khazanah Kebajikan (9.75), MA Sunanul Husna (9.50), MA Nurasholihat (9.40), MAN Serpong (9.20), MA Al-Amanah Al-Gontory dan MA Ummul Qura (masing-masing 9.00), MA Jamiyah Islamiyah (8.80), MA Madinatunnajah (8.60), MAN Insan Cendekia (8.43). Adapun nilai rata-rata IPA, MAN Insan

Cendekia (8.80), MA Khazanah Kebajikan (8.50), MAN Serpong (8.28), dan MA Jamiyah Islamiyah (7.33). Sedangkan nilai rata-rata IPS menunjukkan MAN IC (8.43), MA Darul Hikmah (8.18), MA Nurasholihah (8.07), MA Khazanah Kebajikan (7.91), MAN Serpong (7.87), MA Al-Amanah al-Gontory (7.55), MA Madinatunnajah (7.40), MA Sunanul Husna (7.38), MA Jamiyah Islamiyah (7.35), dan MA Ummul Qura (7.33).

4) Bahwa di samping telah memenuhi standar mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam PP 19 Tahun 2005, Madrasah Aliyah se Kota Tangerang Selatan juga memiliki beberapa ciri keunikan tersendiri yang berbeda dengan Madrasah Aliyah di Kabupaten/Kota lain. Beberapa ciri keunikan tersebut antara lain:

a) Dalam segi kurikulum, selain menggunakan kurikulum KTSP sebagaimana diatur dalam kurikulum Tahun 2006, juga terdapat pengembangan keunggulan yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Pada MAN Insan Cendekia Serpong misalnya, terdapat penguatan pada bidang IT, pembiasaan berbahasa asing (Inggris), penguatan dalam keterampilan menulis karya ilmiah sebagai pengetahuan dasar untuk mengikuti studi pada perguruan tinggi.⁸⁹ Sedangkan pada Madrasah Aliyah Jamiyah Islamiyah, terdapat penguatan pada aspek penguasaan kitab kuning (berbahasa Arab) yang merupakan salah satu ciri dan kekuatan Madrasah sebagai lembaga *tafaqquh fi al-din*, sebagaimana misi awal kelahiran Pesantren dan Madrasah.⁹⁰ Intinya adalah bahwa pada Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan, selain menggunakan kurikulum dengan standar nasional, juga telah diperkaya

⁸⁹ Lihat hasil wawancara dengan Ir. Elly Haswani, M.Pd, Wakil Kepala Bidang Kurikulum MAN Insan Cendekia Serpong, Tangerang Selatan, pada hari Jum'at, 15 Juli 2011.

⁹⁰ Lihat hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Jamiyah Islamiyah Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada hari Senin, 18 Juli 2011.

oleh muatan lokal atau *local wisdom* (kebijakan lokal) yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Kebijakan tentang muatan lokal (*local wisdom*) yang demikian juga sejalan dengan pendapat Prof. Dr. Husni Rahim, pakar pendidikan Islam;⁹¹

- b) Dalam proses penerimaan peserta didik tidak semua Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan mendasarkan pada keunggulan calon (*input*) dalam kemampuan akademik, melainkan ada pula yang mendasarkan pada aspek ketidak mampuan ekonomi dan kepedulian sosial terhadap orang-orang yang kurang mampu (kaum *dhu'afa*). Keadaan ini misalnya dapat dijumpai pada Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan, Pondok Cabe, Tangerang.⁹² Dengan pendekatan yang demikian, maka terdapat keberpihakan yang kuat terhadap berlakunya prinsip demokrasi pendidikan, pendidikan untuk semua (*education for all*), dan program wajib belajar;
- c) Dari segi pembiayaan, sebagian besar (80%) Madrasah Aliyah Tangerang Selatan bersumber dari dana sendiri (swasembada). Hal ini dapat dilihat dari statusnya sebagai Madrasah Aliyah Swasta;
- d) Dari segi sarana prasarana, terdapat Madrasah Aliyah yang telah mencapai keadaan yang sudah bertaraf nasional, bahkan internasional, seperti tersedianya peralatan MIPA, bahasa, perpustakaan digital dan lainnya, sebagaimana yang dijumpai pada Madrasah Aliyah Insan Cendekia Serpong;
- e) Dari segi proses pembelajaran, selain menggunakan model dan pendekatan yang berbasis siswa (*student centris*) dengan metode yang menyebabkan para peserta

⁹¹ Lihat hasil wawancara dengan Prof. Dr. Husni Rachim, dan Prof. Dr. Dede Rosyada, MA., pada hari Senin, 6 Juni 2011.

⁹² Lihat hasil wawancara dengan Bapak Bambang Indarto, Lc, Kepala Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan Pondok Cabe Pamulang, Tangerang Selatan, pada hari Selasa, 19 Juli 2011.

didik menjadi partisipatif, aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan (Paikem) juga menggunakan metode pembiasaan, keteladanan yang baik (*uswah hasanah*), serta penanaman nilai akhlak mulia. Dengan cara demikian, maka terjadi keseimbangan antara penguasaan Iptek dengan penguasaan Imtaq, antara penguatan intelektual dan keterampilan fisik, juga kedalaman penghayatan nilai-nilai agama serta nilai-nilai moral dan nilai-nilai spiritual;

- f) Dari segi animo masyarakat, terdapat kecenderungan yang kuat bahwa Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan lebih mendapatkan perhatian atau prioritas utama daripada Sekolah Menengah Umum (SMU).⁹³ Hal ini antara lain, karena di samping MA dan SMU sama-sama memberikan pengetahuan umum, namun khusus pada Madrasah Aliyah terdapat penguatan pada segi agama, baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik, serta mencapai kelulusan pada UAN yang mencapai 100%;
- g) Telah tumbuh keinginan yang kuat dari para pengelola Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan untuk menerapkan visi sebagai sekolah yang unggul dan terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan konsep/wawasan pengetahuan, keterampilan dalam penguasaan teknologi canggih (*high technology*), kemampuan untuk mempraktekkan berbagai konsep ilmu pengetahuan, sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi;
- h) Dari segi pengelolaan pendidikan, di samping telah menggunakan pendekatan yang memuaskan pada semua pelanggan (*to give good service and satisfaction for all costumers*) dengan menggunakan manajemen *corporate*, sebagaimana terdapat dalam TQM (*Total Quality*

⁹³ Lihat hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Asep Maman Kurnia M. Si, Kasi Mapenda Kemenag Kabupaten Tangerang, pada hari Kamis, 19 Juli 2011.

Management) dan *International Certificate Organization* (ISO) dan manajemen strategik dalam rangka mencapai keunggulan yang bersaing (*competitive advantage*), juga menggunakan pendekatan keagamaan, yaitu dengan cara tidak sepenuhnya tunduk pada hukum traksaksional (*suplay and demand*), atau hukum ada ada uang ada barang. Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan menggunakan pendekatan manajemen *corporate* dengan *spirit* nirlaba dan ibadah kepada Allah SWT. Dengan pendekatan manajemen yang demikian itu, maka sungguhpun masih terdapat kekurangan dalam memberikan insentif kepada para guru, namun kegiatan proses belajar mengajar masih dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena kekurangan insentif yang mereka terima masih dapat diimbangi dengan niat ibadah kepada Allah SWT;⁹⁴

- i) Dari segi inovasi, telah tumbuh upaya-upaya inovatif yang dilakukan oleh setiap Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan untuk memberikan pelayanan yang makin baik kepada masyarakat, serta peningkatan mutu pendidikan, seperti adanya program pembinaan terhadap berbagai konsep kurikulum, proses belajar mengajar, pembinaan kemampuan profesional secara berkelanjutan melalui program pengembangan profesi secara berkelanjutan (*Continous Professional Development+CPD*), serta berbagai inovasi lainnya dengan melibatkan Komite Madrasah;⁹⁵

⁹⁴ Kesimpulan tersebut antara lain didasarkan pada hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah Khazanah Kebajikan Pondok Cabe Pamulang, dan Madrasah Aliyah Jamiyah Islamiyah Pondok Aren, Bintaro, Tangerang Selatan; dan Bapak K.H. Muhammad Sayidih, Ketua Yayasan Darul Hikmah, Pamulang Barat, Tangerang Selatan, pada hari Kamis, 20 Juli 2011.

⁹⁵ Lihat hasil wawancara dengan Drs. H. Ngatimin Al-'Arif, M. Si, Kekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, pada hari Rabu, 20 Juli 2011; Lihat pula hasil wawancara dengan Drs.H. Asep Maman Kurnia, M.SI, Kasi Mapenda Kemenag Kabupaten Tangerang, pada hari Kamis, 19 Juli 2011, khususnya yang berkaitan dengan adanya Kelompok Kerja (Pokja) dengan

- j) Dari segi sumber daya manusia, yakni tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan telah mencapai keunggulan baik pada segi kualitas maupun kuantitas.⁹⁶ Hal ini terjadi karena untuk mendapatkan tenaga pendidik dan kependidikan tidak mengalami kesulitan, karena berada di Kota Tangerang yang di dalamnya terdapat perguruan tinggi yang menghasilkan tenaga guru, dan tenaga ahli lainnya, seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Serang, Universitas Muhammadiyah, Universitas Syaikh Yusuf dan sebagainya.

Keempat, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu Madrasah Aliyah di Kota Tangerang Selatan, antara lain:

- 1) Adanya penduduk yang mayoritas beragama Islam yang lebih memilih Madrasah Aliyah daripada Sekolah Menengah Umum (SMU);
- 2) Adanya nilai lebih pada lulusan Madrasah Aliyah sebagai dampak dari penerapan kurikulum 2004, yaitu di samping para lulusan Madrasah Aliyah tersebut menguasai ilmu umum dan dapat melanjutkan studi ke perguruan tinggi umum, sebagaimana dicapai oleh lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU), juga memiliki tingkat pengetahuan, penghayatan dan pengalaman agama;
- 3) Letak geografis Kota Tangerang Selatan dengan Ibukota Jakarta yang memiliki berbagai perguruan tinggi agama Islam terkemuka yang dapat mensuplai tenaga pendidik dan kependidikan yang bermutu;
- 4) Adanya berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memberikan perhatian yang lebih besar pada sektor

Kelompok Kerja Pengawas (Pokjawas) yang melakukan uji materi KTSP pada sejumlah Madrasah Aliyah yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dengan cara demikian, kemampuan para guru dalam membuat KTSP makin meningkat.

⁹⁶ Lihat hasil wawancara dengan Ir. Elly Haswani, Wakil Kepala MAN Insan Cendekia Bidang Kurikulum, pada hari Jum'at, 15 Juli 2011.

pendidikan, baik dari segi penyediaan SDM yang bermutu, sarana prasarana yang memadai, pembinaan manajemen, pembinaan kurikulum, pembinaan proses belajar mengajar, menyediakan anggaran dan sebagainya.

Kelima, masih terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi Madrasah Aliyah Kota Tangerang Selatan, baik yang negeri maupun swasta. Masalah yang dihadapi Madrasah Aliyah Negeri, antara lain dalam hal pengelolaan keuangan yang terbatas dan prosedurnya yang ketat dan birokratis sehingga kurang mendukung upaya-upaya inovasi dan pengembangan. Masalah ini antara lain dijumpai oleh Madrasah Aliyah Insan Cendekia. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh Madrasah Aliyah Swasta antara lain: terbatasnya lahan untuk pengembangan, terbatasnya kemampuan daya beli masyarakat, serta sumber daya manusia tenaga pendidik dan kependidikan yang unggul.

B. Rekomendasi

Berdasarkan beberapa temuan sebagaimana tersebut di atas, beberapa rekomendasi dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, perlu adanya upaya mewujudkan pemerataan mutu dan keunggulan pada seluruh Madrasah Aliyah yang ada di Kota Tangerang Selatan, dengan cara melakukan upaya deseminasi atau menerapkan sekolah pembina. Keunggulan yang terdapat pada satu Madrasah Aliyah perlu dideseminasikan kepada Madrasah Aliyah yang lain. Keunggulan pada Madrasah Aliyah Insan Cendekia misalnya perlu dideseminasikan kepada Madrasah Aliyah lainnya.

Kedua, perlu adanya upaya pendampingan atau pembinaan kemampuan profesional tenaga pendidik dan kependidikan secara berkelanjutan (*The Sustainability of Professional Teacher Development*). Dengan cara demikian

kemampuan para tenaga pendidik dan kependidikan dapat terus dibina secara terus menerus.

Ketiga, perlu adanya sebuah tim yang tangguh dan solid yang dapat melakukan upaya inovasi dan pengembangan (*research, inovation and development*) pada setiap Madrasah Aliyah yang didukung oleh Kantor Kementerian Agama Tingkat Propinsi dan Kabupaten serta Dinas Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

Keempat, perlu memberikan otonomi yang lebih luas dalam hal pengelolaan keuangan pada Madrasah Aliyah Negeri (khususnya Insan Cendekia) dalam bentuk bantuan hibah, penarikan biaya pendidikan dari masyarakat melalui penerapan konsep Badan Layanan Umum (BLU), dan lainnya yang strategis.

Kelima, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, melalui Dinas Pendidikan perlu membantu pengembangan mutu Madrasah Aliyah, terutama dalam hal peningkatan mutu tenaga guru melalui program *Continuity Profesional Development (CPD)*.

Keenam, perlu ada dukungan yang kuat dari pemerintah dalam bentuk beasiswa penuh bagi siswa yang mengambil program agama.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim, (ed), *Metodologi Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), cet. I.
- Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (terj.) Bustami A. Gani dan Djohar Bahri, dari judul *al-Mabadi' al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974).
- Abdullah, Abdurrahman Saleh, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, (terj.) H.M. Arifin dari judul asli *Educational Theory: a Qur'anic Outlook*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet. III.
- Abul 'Ainain, Ali Khalil, *Falsafah al-Tarbiyah al-Islamiyah fi al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabiym 1980)m cet. I.
- Ahadi, H, *Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan 2011 (Bidang Pendidikan)*. Makalah disampaikan pada acara Seminar Alumni Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Tangerang Selatan, 11 November 2010, di Gedung Fakultas Dirasat Islamiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ahmad, Mohammad Akhlaq, *Traditional Education among Muslim*, (New Delhi: N.R. Publisher Corporation, 1985).
- Alavi, Zianuddin, *Pemikiran Pendidikan Islam pada Abad Klasik dan Pertengahan*, (terj.) Abuddin Nata dari judul asli *Islamic Education in Moddle Age*, (Bandung: Angkasa, 2003), cet. I.
- Ahmed, Ziauddin, *Influence of Islam on World Civilization*, (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1996), First Edition.

- Ahmed, Akbar, *Discovering Islam Making Sense of Muslim History and Society*, (London and New York: Routledge, 2003).
- Al-Ahwany, Ahmad Fu'ad, *al-Tarbiyah fi al-Islam*, (mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.).
- Arifin, H.M. *Ilmu Pendidikan Islam suatu Tinjauan Teoritis dan Praksis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta:Bina Ilmu, 1991), cet. I.
- Asmani, Jamal Ma'mur, *Tips Efektif Menjadi Sekolah Berstandar Nasional dan Internasional*, (Jogjakarta:Harmoni, 2011), cet. I.
- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I.
- Azra, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. I
- Briggs, Ann R.J. and Marianne Coleman, *Research Methodes in Educational Leadership and Management*, (Los Angeles-London, New Delhi-Singapore:Sage Publications, 2007).
- Clement, James P., and Jack Gido, *Effective Project Management*, (South-Western Cengage Learning, no year).
- David, Fred R., *Strategic Management Concepts and Cases*, (Pearson Education International, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta:Direktorat Pendidikan Menengah Umum, 2001), cet. I.
- Dess, Gregory G., and G.T. Lumpkim, *Strategic Management Creating Competitive Advantage*, (McGraw-Hill Irwin, 2003).
- Fadjar, A. Malik, *Reorientasi Pendidikan Islam*, (Jakarta:Fadjar Dunia, 1999), cet. I.
- Gitlow, Howard S., Ect., *Quality Management*, (McGraw-Hill Irwin, 2005).
- Goleman, Daniel, *Primal Leadership Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006), cet. IV.

- Halebsky, Sandor (ed.), *The Sociology of the City*, (New York:Charles Scribner's Sons, no year).
- Hewit, W.E., Ect., *Intoduction to Sociology*, (Pearson Prentice Hall, 2008).
- Himpunan Permendiknas, tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, (Tanpa Nama Tempat: Asa Mandiri, 2008), cet. I.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia, 1983), cet. V.
- Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), cet. II.
- Nata, Abuddin, "Menyikapi Paradigma Baru Pendidikan di Indonesia", dalam *Tahdzib*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. I, No. 2, Juli 2007, Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- , *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010), cer. I.
- , *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta:UIN Jakarta Press, 2011), cet. I.
- , *Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2009), cet. I.
- Maksum, *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*, (Jakarta:Logos`Wacana Ilmu, 1999), cet. I.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta:INIS, 1994), cet. I.
- Moeljono, Djokosantoso dan Steve Sudjatmiko, *Corporate Culture Challenge to Excellence*, (Jakarta:Gramedia, 2007), cet. I.
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2006), cet. I.
- Mursi, Muhammad Munir, *al-Tarbiyah al-Islamiyah Ushuluha wa Tathawwuruha fi Bilad al-'Arabiyah*, (Qahirah: Alam al-Kutub, 1977).

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (Jakarta:Depdiknas, 2005).
- Qombar, Mahmud, *Dirasat Turatsiyah fi al-Tarbiyah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Tsaqafah al-Dauhah, 1405 H./1985M.),
- Renard, John, *Windows on the House of Muslim Sources on Spirituality and Religion's, Life*, (Berkeley, Los Angeles and London University of California Press, 1998).
- Sallis, Edward. *Total Quality Management in Education Manajemen Mutu Pendidikan*, (Jogjakarta:IRCiSoD, 2006), cet. II.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, (ed), *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:LP3ES, 1995), cet. II.
- Stanton, Michail, *Higher Learning in Islam*, (Pendidikan Tinggi Islam), (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1994), cet. I.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2006), cet. II.
- Tepperson, Lorne dan James Curtis, *Principles of Sosiology Canadian Perspectives*, (Oxford University Press, 2006).
- Tjahjono, Herry, *Culture Based Leadership Menuju Kebesaran Diri & Organisasi Melalui Kepemimpinan Berbasis Budaya dan Budaya Kinerja Tinggi*, (Jakarta:Kompas Gramedia, 2011), cet. I.
- Tjiptono, Fandy & Anastasia Diana, *Total Quality Management*, (Yogyakarta:Andi Yogyakarta, 2003), cet. II.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, 2003), cet. I.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, 2005), cet. I.
- Uwes, Sanusi, *Manajemen Pengembangan Mutu Dosen*, (Jakarta:Logos, 1999), cet. I.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 1994), cet. I.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Mutiara Sumber Widya, 1995), cet. IV.

- Wahab, Abdul Azis, *Anatomi Organisasi dan Kepemimpinan Pendidikan Telaah terhadap Organisasi dan Pengelolaan Organisasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2008), cet. II.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri, *Madrasah Pemberdayaan dan Peningkatan Mutu*, Volume I, Nomor 1, (Jakarta:Media Komunikasi untuk Peningkatan Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2005).
- , *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2005), cet.I.
- Zuhri, Saefuddin, *Integrasi Biologi dan Agama dalam Perspektif Islam*, (Jakarta:Pascasarjana UIN Jakarta, 2009).